



**PEMERINTAH KOTA
BALIKPAPAN**



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirrobbil'alamin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kota Balikpapan tahun 2021 telah selesai disusun dan disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti pelaksanaannya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa diamanatkan LPPD disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LPPD merupakan informasi utama dan dasar untuk Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), perumusan kebijakan dan pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah. LPPD bertujuan untuk memberikan gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam upaya peningkatan kinerja untuk mendukung pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan prinsip tata pemerintahan yang baik. Sebagai sarana laporan capaian kinerja

penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka paling tidak ada 4 (empat) substansi pokok capaian kinerja disajikan, yaitu: (1) capaian kinerja penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum yang diukur dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK), (2) capaian realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah tahun 2020, (3) capaian kinerja penyelenggaraan tugas pembantuan, dan (4) capaian kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Penyusunan LPPD Kota Balikpapan Tahun 2021 mengacu pada surat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 120.04/926/OTDA Tanggal 26 Januari 2022 perihal Penyampaian pedoman penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah daerah Tahun 2021. Dengan demikian penyajiannya secara maksimal telah memenuhi semua aspek, fokus dan indikator yang ditetapkan dalam rangka evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Akhirnya, perkenankan kami atas nama Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan aktif mengisi pembangunan Kota Balikpapan di berbagai sektor pembangunan, dengan produktivitas dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman dihuni, dan semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota

Balikpapan Tahun 2021 ini memberi manfaat serta dapat dijadikan landasan sebagai dasar pertimbangan pengambilan kebijakan yang strategis untuk kepentingan rakyat dan demi kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

Demikian laporan ini disampaikan sebagai bahan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah. Semoga seluruh upaya yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Jawa Barat dan dapat terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat sehingga terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua. Aamiin.

“Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela, Kubangun dengan Iman, Kujaga dengan Amal, dan Kubela dengan Doa”

Balikpapan, 28 Maret 2022

WALIKOTA BALIKPAPAN



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.1.1 PENJELASAN UMUM	1
A. Undang-Undang Pembentukan Daerah	1
B. Data Geografis Wilayah.....	3
C. Jumlah Penduduk.....	15
D. Jumlah Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan.....	18
E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah.....	19
F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah	22
1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	23
A. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah.....	23
B. Visi Dan Misi Kepala Daerah	24
C. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah	36
D. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	57
1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	83
BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.....	87
2.1 Capaian Kinerja Makro	87
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	87
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Luaran.....	88
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	169
2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan.....	202
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.....	206
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	342
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	344

A. Urusan Pendidikan.....	344
B. Urusan Kesehatan.....	356
C. Urusan Pekerjaan Umum.....	372
D. Urusan Perumahan Rakyat.....	379
E. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.....	386
F. Urusan Sosial.....	402
BAB V PENUTUP	420

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah Dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan	5
Tabel 1.2	Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan	11
Tabel 1.3	Luas Wilayah Dirinci Menurut Topografi Ketinggian).....	12
Tabel 1.4	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan	10
Tabel 1.5	Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan	15
Tabel 1.6	Umlah Penduduk Lahir Dan Datang Serta Persentasenya Terhadap Total Penduduk Di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021	16
Tabel 1.7	Kecamatan Dan Kelurahan Kota Balikpapan	18
Tabel 1.8	Jumlah Perangkat Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Kota Balikpapan	20
Tabel 1.9	Realisasi Belanja Apbd Tahun 2021	22
Tabel 1.10	Korelasi Isu Strategis Dengan Visi	28
Tabel 1.11	Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	29
Tabel 1.12	Tujuan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021	32
Tabel 1.13	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Dan Sasaran Kota Balikpapan	33
Tabel 1.14	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dan Target RPJMD Kota Balikpapan	36
Tabel 1.15	Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2021	39
Tabel 1.16	Program Dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan	40
Tabel 1.17	Kegiatan Dan Anggaran Di Pemerintah Kota Balikpapan	57
Table 1.18	Penerapan SPM Kota Balikpapan Pada Tahun 2021	83
Tabel 2.1	Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan Tahun 2021	87
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Kunci Luaran	88
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Kunci Hasil	169
Tabel 2.4	Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	201
Tabel 2.5	Skala Nilai Peringkat Kinerja	207
Tabel 2.6	Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	208
Tabel 2.7	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1	215
Tabel 2.8	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2	220
Tabel 2.9	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3	228
Tabel 2.10	Angka Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2015 2021	236
Tabel 2.11	Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021	239
Tabel 2.12	engukuran Capaian Sasaran Strategis 4	250
Tabel 2.13	Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan	252
Tabel 2.14	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5	254

Tabel 2.15	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6	260
Tabel 2.16	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7	263
Tabel 2.17	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8	273
Tabel 2.18	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9	277
Tabel 2.19	Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10	317
Tabel 2.20	Realisasi Anggaran Tahun 2021	319
Tabel 2.21	Program dan Kegiatan Yang Mendukung Tercapainya Target Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021	307
Tabel 2.22	Nama dan Bentuk Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan	324
Tabel 2.23	Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan	330
Tabel 4.1	Target pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini	345
Tabel 4.2	Target pencapaian SPM Pendidikan Sekolah Dasar	345
Tabel 4.3	Target pencapaian SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	346
Tabel 4.4	Target pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan	346
Tabel 4.5	Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pendidikan anak usia dini	347
Tabel 4.6	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Sekolah Dasar	348
Tabel 4.7	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	348
Tabel 4.8	Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan	349
Tabel 4.9	Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2021	350
Tabel 4.10	Dukungan Personil Urusan Bidang Pendidikan	351
Tabel 4.11	Jenis layanan Bidang Kesehatan	357
Tabel 4.12	Target Capaian SPM Bidang Kesehatan	358
Tabel 4.13	Pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan	360
Tabel 4.14	Indikator Pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan	362
Tabel 4.15	Pembiayaan Program/Kegiatan SPM Kesehatan	368
Tabel 4.16	Dukungan Personil	369
Tabel 4.17	Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum	374
Tabel 4.18	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari	374
Tabel 4.19	Indikator Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik	375
Tabel 4.20	Alokasi Anggaran Tahun 2021	377
Tabel 4.21	Dukungan Personil	377
Tabel 4.22	Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	381
Tabel 4.23	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat	382
Tabel 4.24	Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat	383
Tabel 4.25	Alokasi Anggaran Bidang Perumahan	384
Tabel 4.26	Dukungan Personil	385

Tabel 4.27	Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	387
Tabel 4.28	Target Pencapaian SPM oleh Daerah.....	388
Tabel 4.29	Realisasi Pelayanan informasi rawan bencana	389
Tabel 4.30	Realisasi Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	390
Tabel 4.31	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	390
Tabel 4.32	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.....	391
Tabel 4.33	Realisasi Realisasi Pelayanan SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban Umum	392
Tabel 4.34	Alokasi Anggaran Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum ...	393
Tabel 4.35	Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum Badan Penanggulangan Bencana Daerah	395
Tabel 4.36	Dukungan Personil Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas	397
Tabel 4.37	Target Pencapaian SPM Urusan Sosial 403	
Tabel 4.38	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	404
Tabel 4.39	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	406
Tabel 4.40	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	408
Tabel 4.41	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	410
Tabel 4.42	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota	412
Tabel 4.43	Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kota Balikpapan	413
Tabel 4.44	Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2021	414
Tabel 4.45	Dukungan Personil	416
Tabel. 4.46	Permasalahan Bidang Sosial	417

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan Sebagai Penyangga IKN	4
Gambar 1.1	Peta Wilayah Kota Balikpapan Per Kecamatan dan Kelurahan	5
Gambar 1.2	Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020 ...	8
Gambar 1.3	Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45	8
Gambar 1.4	Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45	8
Gambar 1.5	Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020 ...	9
Gambar 1.6	Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020	9
Gambar 1.7	Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45	10
Gambar 1.8	Peta DAS Kota Balikpapan	12
Gambar 1.9	Peta Ketinggian Kota Balikpapan	13
Gambar 1.10	Peta Kelerengan Kota Balikpapan	14
Gambar 1.13	Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan 15 Tahun 2017-2021	12
Gambar 1.14	Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Di Kota Balikpapan Tahun 2021	17
Gambar 1.15	Persentase Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2021	17
Gambar 2.1	Target dan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah Kota Balikpapan	87
Gambar 2.2	Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah	214
Gambar 2.3	Perbandingan Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah 2017-2021	216
Gambar 2.4	Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan	219
Gambar 2.5	Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan	225
Gambar 2.6	Target dan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	227
Gambar 2.7	Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (TPAK) 2017-2021	229
Gambar 2.8	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan 2016-2021	232
Gambar 2.9	Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan (TKm) Kota	237

Gambar 2.10	Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan	245
Gambar 2.11	Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	253
Gambar 2.12	Perbandingan IKLH Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional	254
Gambar 2.13	Target dan Realisasi <i>Livable City Index</i> Kota Balikpapan 2016-2021 ..	59
Gambar 2.14	Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Kota Balikpapan	264
Gambar 2.15	Target dan Realisasi Indeks Gini Ratio (GR) Kota Balikpapan.....	269
Gambar 2.16	Perbandingan Indeks Gini Ratio (GR) Kota Balikpapan,.....	270
Gambar 2.17	Target dan Realisasi PDRB perkapita Kota Balikpapan.....	272
Gambar 2.18	Target dan Realisasi PDRB Non Migas Kota Balikpapan	277
Gambar 2.19	Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan Kota Balikpapan.....	282
Gambar 2.20	Target dan Realisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Balikpapan 2016-2021	284
Gambar 2.21	Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan 2016-2021	293
Gambar 2.22	Target dan Realisasi Nilai Evaluasi LAKIP Kota Balikpapan.....	298
Gambar 2.23	Predikat Zona Kepatuhan	304
Gambar 2.24	Target dan Realisasi Penilaian Kepatuhan Kota Balikpapan	305
Gambar 2.25	Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Kota Balikpapan	310

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

A. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pembentukan suatu wilayah tidak bisa lepas dari sejarah pembentukannya sebagai perjalanan sejarah dari masa ke masa. Secara historis yuridis, dasar pembentukan Kota Balikpapan sejak awal pendiriannya setelah kemerdekaan Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Nomor 55/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penyempurnaan dan Penegasan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Timur Tanggal 2 Februari 1969 Nomor 18/T.H.-Pem/SK/1969 tentang Penetapan Batas dan Luas Daerah Kotamadya Balikpapan, Samarinda dan Kabupaten Kutai;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 45 Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3364);
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 384 Tahun 1990 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 277 A Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa/Kelurahan di Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 140/SK.149/1995 tanggal 16 Mei 1995 tentang Penetapan Pemecahan Kelurahan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;
8. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 146/SK.144/1996 tanggal 17 Mei 1996 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan pada Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Barat pada Kota Administratif Tarakan Kabupaten

Daerah Tingkat II Bulungan dan Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai, Berau, Bulungan, Paser, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda dan Balikpapan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 56);
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 1996 tentang Penetapan 7 (Tujuh) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan dan 5 (Lima) Kelurahan Persiapan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda menjadi Kelurahan Definitif;
11. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam Wilayah Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2012 Nomor 8).

B. Data Geografis Wilayah

1. Luas, Batas Wilayah, Letak dan Kondisi Geografis

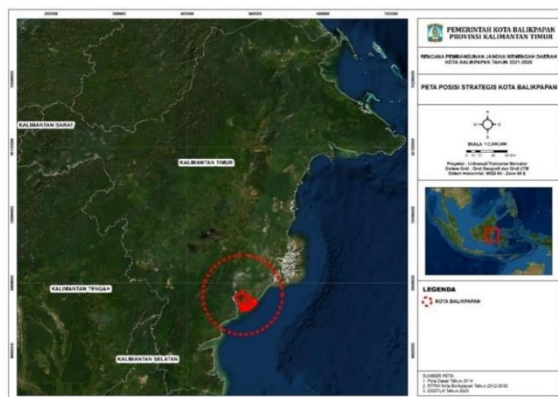
Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 51.101,24 Ha. Secara geografis, Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5° Bujur Timur dan 117,0° Bujur Timur serta

diantara 1,0° Lintang Selatan dan 1,5° Lintang Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Kota Balikpapan sendiri disiapkan sebagai *Buffer Zone* (Zona Penyangga) bagi IKN baru yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung.

Gambar 1.1 Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan Sebagai

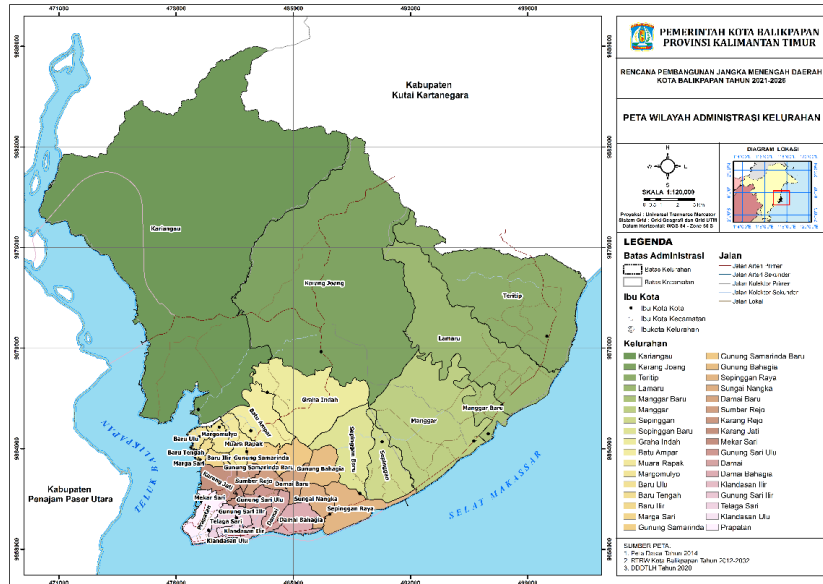


Penyangga IKN

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996, Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan. Namun sejak dikeluarkannya Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012

Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, kini Kota Balikpapan terdiri dari 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tiga puluh empat) Kelurahan, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1.2 Peta Wilayah Kota Balikpapan

PerKecamatan dan Kelurahan (Sumber: Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032)

Tabel 1.1

Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
Kecamatan Balikpapan Selatan		3.880,97
1	Damai Baru	215,53
2	Damai Bahagia	375,63
3	Sepinggan Baru	1.063,70
4	Sungai Nangka	319,95

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
5	Sepinggan Raya	662,58
6	Gunung Bahagia	373,86
7	Sepinggan	869,72
Kecamatan Balikpapan Kota		1.109,82
1	Prapatan	442,47
2	Telaga Sari	176,39
3	Klandasan Ulu	106,97
4	Klandasan Ilir	161,67
5	Damai	222,31
Kecamatan Balikpapan Timur		11.915,52
1	Manggar	3.303,73
2	Manggar Baru	521,35
3	Lamaru	3.607,02
4	Teritip	4.483,42
Kecamatan Balikpapan Tengah		1.082,58
1	Gunung Sari Ilir	108,51
2	Gunung Sari Ulu	205,61
3	Mekar Sari	72,37
4	Karang Rejo	121,90
5	Sumber Rejo	216,10
6	Karang Jati	358,10
Kecamatan Balikpapan Barat		19.288,02
1	Baru Ilir	71,31

No	Kelurahan	Luas Wilayah (Ha)
2	Margo Mulyo	197,07
3	Marga Sari	56,94
4	Baru Tengah	91,25
5	Baru Ulu	121,21
6	Kariangau	18.750,25
Kecamatan Balikpapan Utara		13.824,34
1	Gunung Samarinda	266,42
2	Muara Rapak	316,71
3	Batu Ampar	780,04
4	Karang Joang	10.232,37
5	Gunung Samarinda Baru	266,42
6	Graha Indah	1.924,59
Total Luas		51.101,24

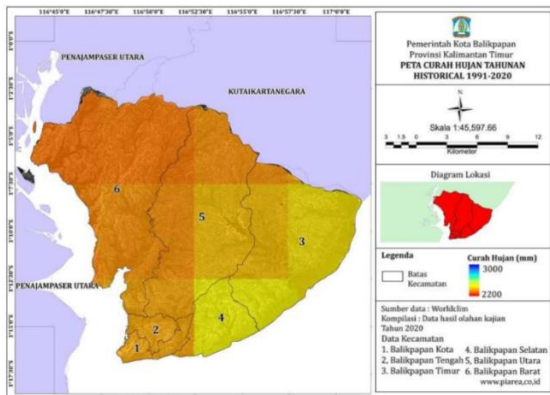
Sumber: Rencana Detail Tata RuangKota Balikpapan Tahun 2021-2041

2. Iklim

2.1 Curah Hujan Kota Balikpapan

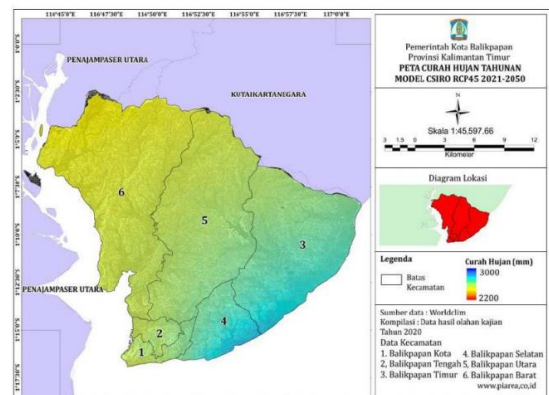
Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang dari 2200 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah. Pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan

mengalami peningkatan secara merata dimasa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan pola sebaran pola tinggi hujan tetap.



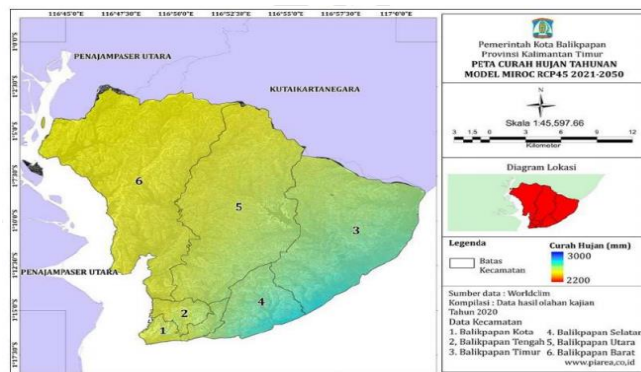
Gambar 1.3 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020

Sumber: DLH Kota Balikpapan, Dikplhd Kota Balikpapan, 2019.



Gambar 1.4 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050

Sumber: DLH Kota Balikpapan, Dikplhd Kota Balikpapan, 2019.

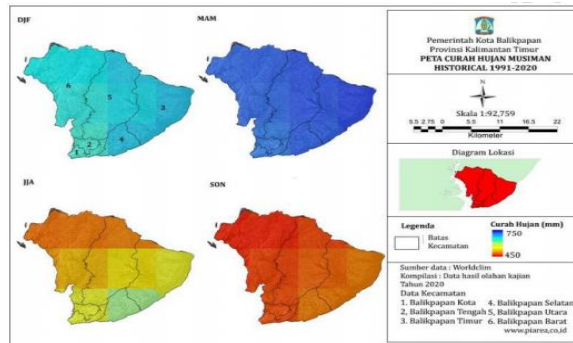


Gambar 1.5 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050

Sumber: DLH Kota Balikpapan, Dikplhd Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750–450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan

dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya.

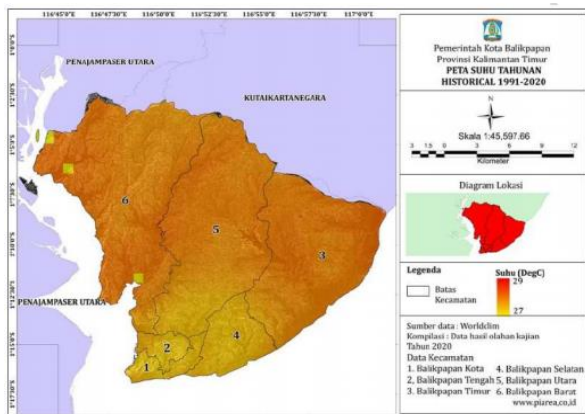


Gambar 1.6 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.

2.2. Suhu Kota Balikpapan

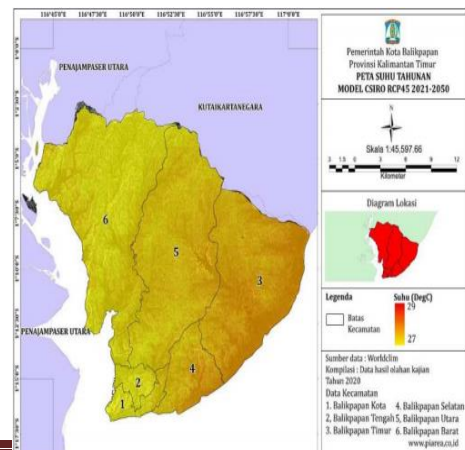


Gambar 1.7 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan

Sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna



Gambar 1.8 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050

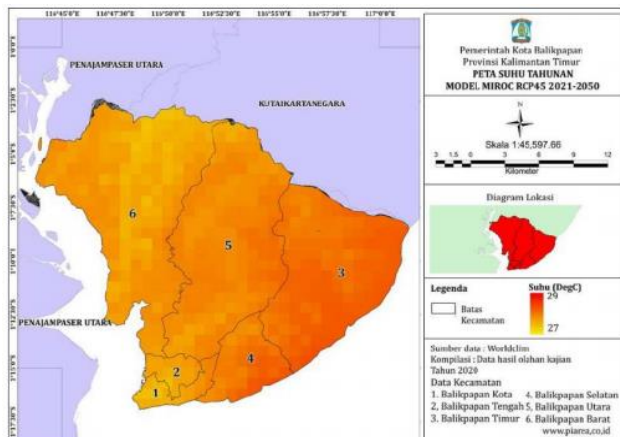
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah.

Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki suhu yang lebih rendah

dibandingkan dengan kecamatan lainnya.

Sebaran suhu udara dengan model CSIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*)



Gambar 1.9 Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 2021-2050

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

menunjukkan pada tahun 2021-2050

mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991- 2020. Sedangkan, sebaran suhu udara model MIROC (*Model for Interdisciplinary Research on Climate*) tahun 2021-2050 tidak terdapat perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991-2020.

3. Hidrologi

Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai). Potensi air tanah di Kota Balikpapan termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Sesuai dengan kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit, menyebabkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota. Adanya keterbatasan penyediaan

air bersih PDAM menyebabkan banyak penduduk yang memanfaatkan air tanah untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Berikut dibawah ini DAS di Kota Balikpapan sebagai berikut.

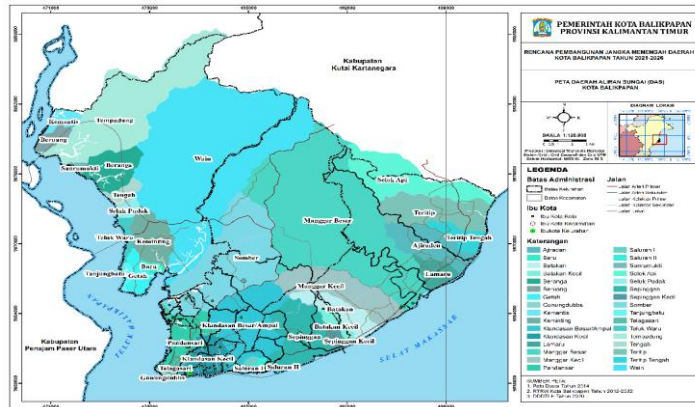
Tabel 1.2

Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

No.	Nama DAS	Grand Total	No.	Nama DAS	Grand Total
1	Gunungdubbs	42.05	17	Teluk Waru	479.71
2	Klandasan Besar/Ampal	4894.65	18	Tempadung	6571.97
3	Klandasan Kecil	1328.52	19	Tengah	657.52
4	Pandansari	1795.77	20	Wain	25349.31
5	Saluran I	245.83	21	Ajiraden	2806.05
6	Telagasari	210.75	22	Batakan	1866.75
7	Baru	221.12	23	Batakan Kecil	623.73
8	Beranga	2064.17	24	Lamaru	1075.14
9	Beruang	634.21	25	Manggar Besar	19752.86
10	Getah	887.38	26	Manggar Kecil	3998.02
11	Kemantis	641.42	27	Selok Api	3209.32
12	Keminting	2171.84	28	Sepinggan	3801.39
13	Sanrumukti	160.81	29	Teritip	3649.82
14	Seluk Pudak	374.54	30	Teritip Tengah	1061.29
15	Somber	8619.13	31	Saluran II	251.97
16	Tanjungbatu	236.02	32	Sepinggan Kecil	494.57

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

Berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian.



Gambar 1.10 Peta DAS Kota Balikpapan (Sumber: DDDTLH, Tahun 2020)

4. Topografi

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67 ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

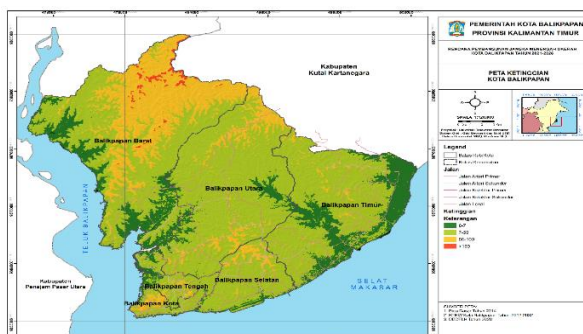
Tabel 1.3

Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian).

No	Ketinggian (mdpl)	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%)
1.	0-10	6.980,00	13,66
2.	>10-20	18.030,67	35,28
3.	>20-100	26.090,57	51,06
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

Untuk mengetahui kondisi ketinggian Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian.



Gambar 1.11 Peta Ketinggian Kota Balikpapan
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.4 berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

Tabel 1.4

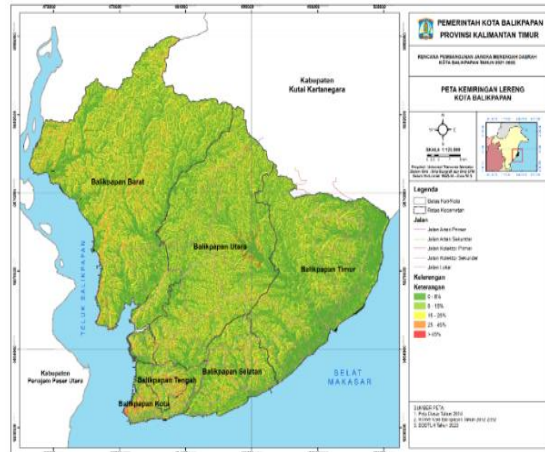
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	13,80
2	> 2-15	3.325,00	6,51
3	> 15-40	21.305,57	41,69
4	> 40	19.420,67	38

Jumlah	51.101,24	100
--------	-----------	-----

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

Untuk mengetahui kondisi ketinggian Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi ketinggian Kota Balikpapan dalam bentuk peta ketinggian.



Gambar 1.12 Peta Kelerengn Kota Balikpapan
Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

Untuk mengetahui kondisi kelerengn Kota Balikpapan berikut merupakan visualisasi dari kondisi kelerengn Kota Balikpapan dalam bentuk peta kelerengn.

Dari sisi topografis sebagian besar wilayah Kota Balikpapan berada pada kemiringan lereng antara 15-40% yaitu seluas seluas 21.305,57 Ha atau 41,69% dari luas wilayah keseluruhan. Tabel 2.5

berikut ini menunjukkan rincian luas wilayah Kota Balikpapan berdasarkan kelerengan.

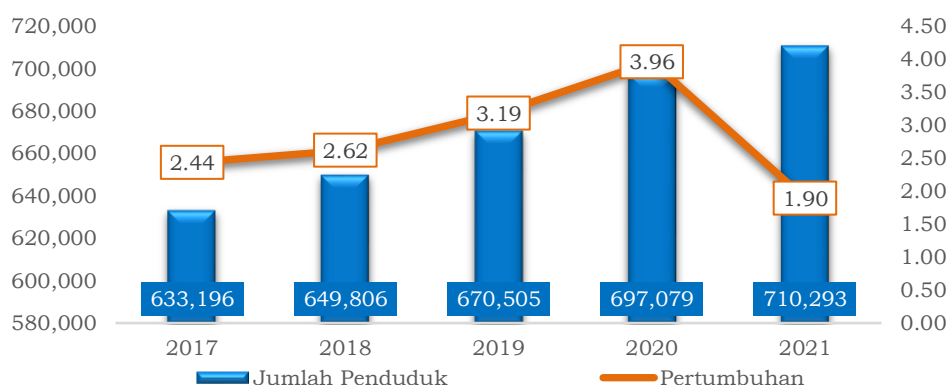
Tabel 1.5
Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Kelerengan

No	Kelas Lereng	Luas Wilayah	
	(%)	(Ha)	(%)
1	0-2	7.050,00	13,80
2	> 2-15	3.325,00	6,51
3	> 15-40	21.305,57	41,69
4	> 40	19.420,67	38
Jumlah		51.101,24	100

Sumber: DPPR Kota Balikpapan, 2021

C. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Balikpapan setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebanyak 710.293 orang. Pada tahun 2017, tumbuh sebesar 2,44% dan terus tumbuh hingga mencapai 3,96% di tahun 2020, namun angka pertumbuhan penduduk mengalami penurunan menjadi 1,90% pada tahun 2021. Secara rata-rata, angka pertumbuhan penduduk selama tahun 2017-2021 tumbuh sebesar 2,82%.



Gambar 1.13 Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2017-2021 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan)

Jika ditelusuri lebih lanjut, jumlah penduduk di Kota Balikpapan dipengaruhi oleh banyaknya penduduk migrasi ke Balikpapan, bahkan proporsi penduduk yang datang lebih banyak ketimbang penduduk yang lahir. Berdasarkan data, misalnya pada tahun 2021 sebanyak 17.743 orang merupakan penduduk pendatang, sedangkan penduduk lahir sebanyak 10.466 orang. Jika angka ini diproporsikan dengan jumlah penduduk tahun berkenaan, maka jumlah penduduk pendatang berkontribusi sebesar 2,50% terhadap jumlah total penduduk tahun 2021, sedangkan kontribusi dari penduduk lahir hanya sebesar 1,47%. Tingginya migrasi ke Kota Balikpapan perlu dilakukan antisipasi oleh Pemerintah Kota Balikpapan, apalagi adanya rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) akan mengakibatkan meningkatnya jumlah penduduk ke Balikpapan secara signifikan. Antisipasi tersebut meliputi berbagai faktor, baik faktor sosial, lingkungan, maupun infrastruktur.

Tabel 1.6

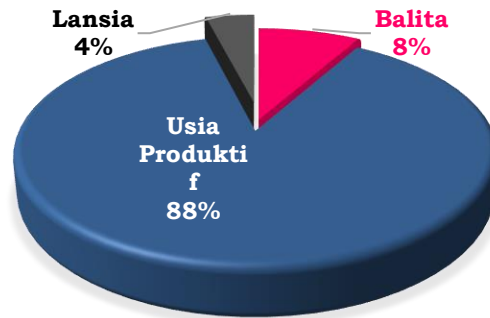
Jumlah Penduduk Lahir dan Datang serta Persentasenya Terhadap Total Penduduk di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021

TAHUN	LAHIR	DATANG	%Kelahiran terhadap Total Penduduk	%Pendatang terhadap Total Penduduk
2017	19.211	18.142	3,03%	2,87%
2018	20.095	13.499	3,09%	2,08%
2019	19.044	12.218	2,84%	1,82%
2020	10.366	13.165	1,49%	1,89%
2021	10.466	17.743	1,47%	2,50%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan

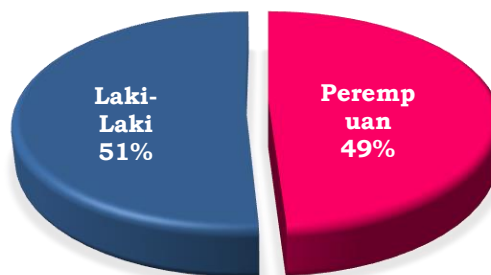
Kelompok usia penduduk yang dominan berada di Kota Balikpapan adalah usia produktif, yaitu sebesar 88% dari total

penduduk pada tahun 2021 (623.088 orang). Sedangkan, untuk kelompok usia balita hanya 8% (58.699 orang) dan 4% (28.506 orang) untuk lansia.



Gambar 1.14 Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Di Kota Balikpapan Tahun 2021 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan)

Pada tahun 2021, jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin terbanyak adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51% (362.754 orang) dan perempuan sebanyak 49% (347.539 orang). Banyaknya jumlah penduduk perempuan tersebut perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Balikpapan terutama dalam hal pembangunan berbasis gender, sehingga kaum perempuan lebih berdaya dan derajat kesejahteraannya semakin meningkat.



Gambar 1.15 Persentase Penduduk Berdasarkan Gender Tahun 2021 (Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan)

D. Jumlah Kecamatan Dan Kelurahan

Secara administratif sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 (lima) Kecamatan dan 27 (dua puluh tujuh) Kelurahan.

Pada tahun 2012 terdapat pemekaran kecamatan dan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah, Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan, sehingga kecamatan dan kelurahan di Kota Balikpapan berubah menjadi 6 (enam) Kecamatan dan 34 (tigapuluh empat) Kelurahan, sebagai berikut:

Tabel 1.7

Kecamatan Dan Kelurahan kota Balikpapan

No	Kelurahan
Kecamatan Balikpapan Selatan	
1	Damai Baru
2	Damai Bahagia
3	Sepinggan Baru
4	Sungai Nangka
5	Sepinggan Raya
6	Gunung Bahagia
7	Sepinggan
Kecamatan Balikpapan Kota	
1	Prapatan

No	Kelurahan
2	Telaga Sari
3	Klandasan Ulu
4	Klandasan Ilir
5	Damai
Kecamatan Balikpapan Timur	
1	Manggar
2	Manggar Baru
3	Lamaru
4	Teritip
Kecamatan Balikpapan Tengah	
1	Gunung Sari Ilir
2	Gunung Sari Ulu
3	Mekar Sari
4	Karang Rejo
5	Sumber Rejo
6	Karang Jati
Kecamatan Balikpapan Barat	
1	Baru Ilir
2	Margo Mulyo
3	Marga Sari
4	Baru Tengah
5	Baru Ulu
6	Kariangau
Kecamatan Balikpapan Utara	
1	Gunung Samarinda
2	Muara Rapak
3	Batu Ampar
4	Karang Joang
5	Gunung Samarinda Baru
6	Graha Indah

E. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah Dan Pegawai Pemerintah

Dalam rangka mendesain Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pemerintah Kota Balikpapan menganut prinsip efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, dengan

memperhatikan ketersediaan sumber daya aparatur dan ketersediaan pembiayaan untuk melaksanakan seluruh Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ini terdiri dari pembentukan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan serta kecamatan. Untuk Kelurahan yang dulunya adalah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam Peraturan Daerah ini berubah menjadi Perangkat Kecamatan (bukan SKPD mandiri).

Berikut jumlah Perangkat Daerah, dan Pegawai Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021.

Tabel 1.8

Jumlah Perangkat Daerah dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SEKRETARIAT DAERAH	82	54	136
2	SEKRETARIAT DPRD	17	11	28
3	INSPEKTORAT	18	27	45
4	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	22	25	47
5	BADAN KESBANGPOL	15	4	19
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	150	9	159
7	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	21	28	49
8	BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	49	21	70
9	BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN	15	20	35

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
	PENGEMBANGAN			
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	22	13	35
11	DINAS KESEHATAN	85	463	548
12	DINAS KETENAGAKERJAAN	14	17	31
13	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	13	12	25
14	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN	14	18	32
15	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	50	21	71
16	DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	42	29	71
17	DINAS PEKERJAAN UMUM	43	21	64
18	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	6	26	32
19	DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	22	14	36
20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU	24	27	51
21	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	529	1524	2053
22	DINAS PERDAGANGAN	42	21	63
23	DINAS PERHUBUNGAN	104	13	117
24	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	8	17	25
25	DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG	26	10	36
26	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	18	13	31
27	DINAS SOSIAL	15	16	31
28	KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT	39	19	58
29	KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA	28	18	46
30	KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN	37	29	66
31	KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH	29	28	57

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PNS		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
32	KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR	34	15	49
33	KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA	37	18	55
34	RSKB SAYANG IBU	6	49	55
35	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	31	89	120
36	SATPOL PP	159	18	177
TOTAL		1866	2757	4623

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

F. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Pemerintah kota Balikpapan dalam melaksanakan penganggaran mengacu pada peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Berikut Tabel Realisasi belanja APBD Kota Balikpapan tahun 2021;

Tabel 1.9
Realisasi Belanja APBD Tahun 2021

REALISASI BELANJA APBD TAHUN 2020	TOTAL BELANJA TAHUN 2021	KETERANGAN
2,145,207,734,777.38	2,838,907,307,519.00	Sebelum dilakukannya audit BPK-RI

Sumber data: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Kota Balikpapan, 2021

Berdasarkan tabel diatas menggambarkan kondisi belanja daerah Tahun 2021 dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi Tahun 2021 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 2.063.978.928.761,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp.1.744.051.495.995,96 atau 84,50%;
- b. Belanja Modal Tahun 2021 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 660.917.847.530,00 dengan kemampuan realisasi Sejumlah Rp.545.701.475.495,62 atau 82,57%; dan
- c. Belanja Modal Tahun 2021 setelah perubahan dialokasikan sejumlah Rp. 114.010.531.228,00 dengan kemampuan realisasi sejumlah Rp.85.268.846.303,70 atau 74,79%.

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintahan Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Isu strategis daerah menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 -2021 dan seiring dinamika perkembangan jaman maka secara umum Kota Balikpapan menghadapi permasalahan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas daya saing sumber daya manusia daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja;
2. Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana;
3. Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (*green city*).
4. Peningkatan daya saing perekonomian daerah yang berwawasan lingkungan (*green economy*);
5. Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik.

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Visi pembangunan daerah Kota Balikpapan untuk periode RPJMD 2016 - 2021 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah sebagai berikut:

"Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka Yang Nyaman Dihuni, Danberkelanjutan Menuju Madinatul Iman"

Visi RPJMD Kota Balikpapan 2016-2021 tersebut selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kota Terkemuka.

Adalah suatu kondisi kota yang berkembang dengan keberadaan beragam infrastruktur moda perhubungan (darat, laut, udara); keberadaan kantor-kantor pelayanan pemerintah dan swasta skala Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara; sumber daya alam yang tidak dieksploitasi, serta keberadaan fasilitas penunjang perkotaan lainnya, baik di bidang jasa kesehatan dan pendidikan maupun jasa di bidang pariwisata (perhotelan, restoran). Kota Balikpapan juga diharapkan berkembang menjadi kota yang Unggul di Bidang Industri, Perdagangan, Jasa, Pariwisata, Pendidikan, & Budaya baik dalam Skala Regional, Nasional maupun Global. Pengembangan pusat perekonomian terbaru dalam kawasan Coastal Road, pengembangan pusat pendidikan teknologi se-Kalimantan, posisi strategis sebagai pintu gerbang utama Kalimantan Timur yang secara langsung berdampak pada laju perekonomian Kota Balikpapan bahkan Provinsi Kalimantan Timur, pengembangan Kawasan Industri Kariangau sebagai pusat industri dan investasi daerah serta pengembangan objek wisata hutan lindung mangrove sebagai destinasi ekowisata Kalimantan Timur. Pesatnya pembangunan dan pengembangan infrastruktur akan semakin memperluas jaringan lingkup pelayanan jasa Kota Balikpapan kedepan. Tingginya intensitas berbagai pertemuan, pameran dan konferensi baik skala regional, nasional maupun internasional menjadikan Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (Meeting, Incentive,

Conference and Exhibition) yang memperkuat peran dan fungsi Kota Balikpapan sebagai kota terkemuka.

2. Kota Nyaman Dihuni (*Livable City*)

Adalah suatu kondisi lingkungan dan suasana kota yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik (fasilitas perkotaan, prasarana, tata ruang, dll) maupun aspek non-fisik (hubungan sosial, aktivitas ekonomi, dll). Prinsip-prinsip dari *Livable City* diantaranya:

1. Tersedianya berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik);
2. Tersedianya berbagai fasilitas umum dan fasilitas sosial (transportasi publik, taman kota, fasilitas kesehatan/kesehatan/ ibadah);
3. Tersedianya ruang dan tempat publik untuk bersosialisasi dan berinteraksi;
4. Keamanan, bebas dari rasa takut;
5. Mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya;
6. Sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik.

3. Kota Balikpapan Sebagai Kota Yang Berkelanjutan.

Adalah suatu kondisi kota yang memiliki identitas berbasis karakter fisik, keunggulan ekonomi dan budaya lokal. Bertambahnya jumlah penduduk yang terus meningkat membuat layanan kota akan semakin tidak efektif, kecuali kota dapat memberikan fasilitas layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat secara keseluruhan yang tinggal di kota. Oleh

karena itu, Kota Balikpapan harus dapat mewujudkan diri sebagai kota yang mampu melayani penduduknya dengan fasilitas yang memadai dan berkualitas. Kemampuan untuk menyediakan fasilitas layanan infrastruktur untuk mewadahi aktivitas masyarakat sehari-hari di Kota Balikpapan akan menimbulkan rasa nyaman bagi seluruh penduduk Kota Balikpapan. Perkembangan kota yang pesat akan membuat terjadinya perubahan lingkungan. Oleh karena itu, ke depan, pengelolaan Kota Balikpapan harus berkesinambungan dengan sistem ekologi dan kenyamanan hidup bagi masyarakat Kota Balikpapan. Upaya menaikkan kualitas hidup yang masyarakat yang tinggal di kota Balikpapan terkait dengan kemampuan mereka untuk mengakses infrastruktur (transportasi, komunikasi, air bersih, dan sanitasi), makanan, udara bersih, perumahan yang terjangkau, lapangan kerja dan ruang terbuka hijau. *Konsepsilivable city* sesungguhnya merupakan representasi *sustainable city*, yang merupakan kemampuan untuk mempertahankan (dan meningkatkan) kualitas hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat Kota Balikpapan.

4. Madinatul Iman,

Mengandung makna sebagai suatu sistem sosial yang tumbuh dan berkembang, yang berasaskan pada prinsip moral dan menjamin kebebasan perorangan dengan tetap memperhatikan kestabilan masyarakat. Kestabilan masyarakat mendorong daya usaha dan inisiatif individu di segala bidang penyelenggaraan

pemerintahan dengan mengacu pada peraturan perundanganundangan, dan menjadi tatanan masyarakat yang beriman, sejahtera, religius dan berperadaban maju. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan. Madinatul Iman juga dapat diartikan sebagai kota berperadaban maju dan modern, hidup sejahtera dan bahagia, dalam nuansa kota beriman dengan mewujudkan masyarakat beriman, bertaqwa, beramal shaleh, berbudaya, taat hukum, bermoral dan berakhlak mulia serta membangun masyarakat yang berprestasi, pekerja keras, kreatif, inovatif, mandiri dan menciptakan kondisi lingkungan yang bersih, indah aman dan nyaman.

Tabel 1.10
Korelasi Isu Strategis Dengan Visi

Isu Strategis	Yang akan dicapai pada Tahun 2021	Visi
Peningkatan daya saing perekonomian Daerah yang berwawasan lingkungan (<i>greeneconomy</i>)	Kota terkemuka	Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul
Peningkatan kualitas daya saing SDM daerah, pengendalian kuantitas penduduk dan perluasan lapangan kerja		

Isu Strategis	Yang akan dicapai pada Tahun 2021	Visi
Peningkatan ketersediaan infrastruktur yang berorientasi pada konsep hijau (<i>green city</i>)	Kota Nyaman dihuni dan Kota Balikpapan Sebagai Kota Yang Berkelanjutan	iman
Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta adaptif terhadap perubahan iklim dan berketahanan bencana		
Pemantapan reformasi birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	Madinatul Iman	

Untuk mewujudkan Visi jangka menengah di atas, ditetapkan

Misi dari Walikota dan Wakil Walikota terpilih tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;
2. Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;
5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

Uraian keterkaitan visi dengan misi serta penjelasan misi bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.11

Penjelasan Misi Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

VISI	MISI	PENJELASAN VISI MISI
------	------	----------------------

VISI	MISI	PENJELASAN VISI MISI
<p>Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman</p>	<p>Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;</p>	<p>Meningkatkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja tinggi, berkemampuan/ memiliki kompetensi yang tinggi, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan agama dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. Prioritas pembangunan diharapkan pada tercapainya peningkatan kualitas sumber daya manusia yang semakin unggul dan berkarakter, ditopang dengan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan yang makin baik serta penghayatan dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya dan agama.</p>
	<p>Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;</p>	<p>Menetapkan tata kelola untuk memantapkan Balikpapan menjadi kota layak huni yang aman dan nyaman (<i>livable city</i>) dengan memantapkan penyediaan berbagai kebutuhan dasar masyarakat perkotaan (hunian yang layak, air bersih, listrik, sanitasi lingkungan dan keindahan lingkungan fisik, fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan) yang memadai, berkualitas, dan berkelanjutan yang antisipatif terhadap perubahan iklim dan bencana (<i>green city</i>) dengan mengedepankan pengolahan sampah terpadu (<i>zero waste</i>) serta ketersediaan Ruang Terbuka Hijau minimal 30% dari luas kota, serta meningkatkan partisipasi masyarakat (komunitas hijau).</p>

VISI	MISI	PENJELASAN VISI MISI
	Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;	Menyediakan infrastruktur untuk semua baik pengguna infrastruktur maupun pemerataan kewilayahan yang mendukung pengembangan wilayah dan aksesibilitas Kota Balikpapan melalui pembangunan jalan dan infrastruktur transportasi berkelanjutan dengan mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor (<i>nonmotorized vehicle</i>) yaitu jalur pejalan kaki dan jalur sepeda serta mendorong penggunaan transportasi massal.
	Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif;	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang akseleratif dan kokoh berbasis pada ekonomi kerakyatan yang berwawasan lingkungan (<i>green economy</i>) dan berkeadilan. Pengembangan potensi sektor unggulan daerah berfokus pada industri pengolahan yang mengolah bahan mentah sumber daya alam menjadi produk turunan sehingga memberikan nilai tambah tinggi, perdagangan dan jasa, serta pariwisata. Peningkatan daya saing perekonomian Kota Balikpapan tetap memperhatikan kearifan lokal disertai semakin besarnya peranan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, dan partisipasi aktif segenap pemangku kepentingan dalam pengelolaan aktivitas ekonomi yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

VISI	MISI	PENJELASAN VISI MISI
	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	Mewujudkan pemerintahan yang baik, kapasitas daerah, dan jaringan kerjasama dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam suasana politik yang demokratis berdasarkan pada semangat penegakan supremasi hukum dan HAM; daerah yang kondusif, aman, tertib dan tentram; dengan prioritas terjadi perbaikan yang signifikan dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, ditunjukkan dengan meningkatnya kemampuan keuangan daerah, dan meningkatnya kualitas aparatur daerah, yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas kelembagaan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menjalankan pemerintahan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Hasil perumusan tujuan pembangunan Kota Balikpapan tahun 2016-2021 dan keterkaitannya dengan misi pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016- 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1. 12
Tujuan Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

NO	MISI	NO	TUJUAN
1	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;	1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing
		2	Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan
		3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan
2	Mewujudkan kota layak huni berwawasan yang lingkungan;	4	Meningkatkan kualitas berwawasan lingkungan
3	Meningkatkan kualitas berwawasan lingkungan;	5	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur
4	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur;	6	Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat
		7	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau
5	Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.	8	Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima

Berdasarkan masing-masing tujuan yang telah ditetapkan maka dirumuskan sasaran pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2016-2021 yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.13
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
------	------	--------	---------

VISI	MISI	TUJUAN		SASARAN	
Mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni dan berkelanjutan menuju madinatul iman	Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing	1.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan
		2.	Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan	2.	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan
		3.	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan	3.	Menurunnya Jumlah Pengangguran
			4.	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	
	Misi 2 : Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan	4.	Meningkatkan kualitas berwawasan lingkungan	5.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup
			6.	Meningkat	

VISI	MISI	TUJUAN		SASARAN	
					kan Kenyaman an, Keamanan dan Ketertiban Lingkunga n
	Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif	5.	Meningkatka n Pelayanan Infrastruktur	7.	Terwujudn ya Infrastrukt ur Yang Handal
	Misi 4 : Mengembangk an ekonomi kerakyatan yang kreatif	6.	Menggerakka n sendi-sendi Perekonomia n Masyarakat	8.	Meningkat kan pemerataa n pendapata n masyarakat
		7.	Meningkatka n pertumbuhan ekonomi hijau	9.	Mendorong pembangu nan ekonomi yang berkelanjut an
	Misi 5 : Mewujudkan penyelenggara an tata kelola pemerintahan yang baik	8.	Terselenggara nya tata kelola pemerintaha n yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	10 .	Tata Kelola Pemerintah an yang baik

**c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen
Perencanaan Jangka Menengah**

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2016 - 2021 memiliki Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja yang menentukan program pembangunan daerah Kota Balikpapan.

Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2016 – 2021 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.14
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran Dan Target RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2016-2021

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
						2017	2018	2019	2020	2021	
Misi 1 : Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas intelektual, cerdas emosional, cerdas spiritual dan berdaya saing	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	10,43	10,45	10,47	10,49	10,51	10,53	10,53
			Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13.73	13.73	13.93	14.73	14.93	15.73	15.73
	Mewujudkan Masyarakat yang sehat jasmani dan rohani secara berkelanjutan	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	73.95	73.96	73.97	73.99	74	74.04	74.04
	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas melalui pengembangan partisipasi yang menyeluruh dan berkesinambungan	Menurunnya Jumlah Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,95%	5,55%	5,30%	5,05%	4,85%	4,55%	4,55%
			Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	62,50	63,28	63,68	64,09	64,5	64,92	64,92
		Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka Indeks	78,18	78,33	78,73	79,13	79,53	79,53	79,53
			Tingkat Kemiskinan (TKm)	%	2,35%	2,34%	2,33%	2,32%	2,31%	2,3%	2,3%

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PR.IMP	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka Indeks	90,1	91	91	92	92	92	92
Misi 2 : Mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka Indeks	58,58	59,18	59,5	59,82	60,14	60,46	60,46
		Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	<i>Livable City Index</i>	Angka Indeks	71,12	72,5	73	73,5	74	74,5	74,5
Misi 3 : Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif	Meningkatkan Pelayanan Infrastruktur	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Angka Indeks	73,40	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00	79,00
Misi 4 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif	Menggerakkan sendi-sendi Perekonomian Masyarakat	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	Indeks Gini Ratio (GR)	Angka Indeks	0,34	0,34	0,33	0,32	0,31	0,30	0,30
			PDRB perkapita	Rupiah (Juta)	Rp 120,32 (Juta)	Rp 120,55 (Juta)	Rp 121,78 (Juta)	Rp 122,70 (Juta)	Rp 124,63 (Juta)	Rp 126,64 (Juta)	Rp 126,64 (Juta)
	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi hijau	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	PDRB Non Migas	Rupiah (Triliun)	Rp 33,39 (Triliun)	Rp 34,73 (Triliun)	Rp 35,37 (Triliun)	Rp 36,40 (Triliun)	Rp 37,48 (Triliun)	Rp 38,62 (Triliun)	Rp 38,62 (Triliun)
Misi 5 : Mewujudkan	Terselenggaranya tata kelola	Tata Kelola Pemerintahan yang	Opini Laporan Keuangan	Kategori	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA AWAL PR. IMD	TARGET CAPAIAN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR
an penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik	pemerintahan yang baik dan penyediaan layanan publik yang prima	baik	Indeks Persepsi Korupsi	Angka Indeks	6,62	6,62	6,70	6,75	6,80	6,90	6,90
			Survey Kepuasan Masyarakat	Angka Skala	79,36	79,56	79,76	79,96	80,16	80,36	80,36
			Nilai Evaluasi LAKIP	Predikat	CC	B (67-69)	B(69-71)	B(71-73)	BB(73-74)	BB(75)	BB(75)
			Penilaian Kepatuhan	Angka Skala	50	55	65	70	75	79	79
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka Indeks	82	83	84	85	86	87	87

Perjanjian Kinerja Perubahan Pemerintah Kota Balikpapan

Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1.15
Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas pendidikan	1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10.53
		2.	Angka Harapan Lama Sekolah (tahun)	15.73
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat berkelanjutan	1.	Angka Harapan Hidup (tahun)	74.04
3	Menurunnya jumlah pengangguran	1.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.55
		2.	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (%)	64.92
4	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	1.	Indeks Pembangunan Manusia	79.53
		2.	Tingkat Kemiskinan (%)	2.30
		3.	Indeks Pembangunan Gender	92.00
5	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60.64
6	Meningkatnya kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan	1.	<i>Livable City Index</i>	74.50
7	Terwujudnya infrastruktur yang handal	1.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (skala)	79.00
8	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat	1.	Indeks Gini Ratio	0.30
		2.	PDRB Perkapita (Rp. Juta)	126.64
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	1.	PDRB Non Migas (Rp . Triliun)	38.62

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1.	Opini Laporan Keuangan (Kategori)	WTP
		2.	Indeks Persepsi Korupsi	6.90
		3.	Survey Kepuasan Masyarakat (Nilai SKM)	80.36
		4.	Nilai Evaluasi LAKIP (Predikat)	75.00
		5.	Penilaian Kepatuhan (nilai kepatuhan berdasarkan zona warna)	79.00
		6.	Indeks Profesionalitas ASN	87.00

Adapun program dan anggaran perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan untuk mendukung capaian sasaran pada tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 1.16

Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Perubahan Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	PROGRAM PRIORITAS		
1	Program Pengelolaan Pendidikan	373.696.040.020	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
2	Program Pengembangan Kurikulum	728.949.100	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	1.907.383.050	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	177.997.504.754	Dinas Kesehatan
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	11.749.201.500	Dinas Kesehatan
6	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	382.683.500	Dinas Kesehatan
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.744.359.575	Dinas Kesehatan
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	4.010.020.224	RSKB Sayang Ibu
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	34.604.233.408	RSUD Beriman
10	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	8.318.000.000	RSUD Beriman
11	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	12.170.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
12	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	19.500.082.910	Dinas Pekerjaan Umum
13	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	71.077.799.837	Dinas Pekerjaan Umum
14	Program Pengembangan Permukiman	164.961.999.700	Dinas Pekerjaan Umum
15	Program Penataan Bangunan Gedung	72.397.122.000	Dinas Pekerjaan Umum

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
16	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	30.950.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
17	Program Penyelenggaraan Jalan	138.625.886.705	Dinas Pekerjaan Umum
18	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	250.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
19	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.853.467.000	Dinas Perumahan Dan Permukiman
20	Program Penataan Bangunan Gedung	207.975.000	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
21	Program Penyelenggaraan Jalan	5.000.000.000	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
22	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	1.914.073.600	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
23	Program Pengembangan Perumahan	4.155.000.000	Dinas Perumahan Dan Permukiman
24	Program Kawasan Permukiman	2.301.511.000	Dinas Perumahan Dan Permukiman
25	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	-	Dinas Perumahan Dan Permukiman
26	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	23.550.590.916	Dinas Perumahan Dan Permukiman
27	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	5.236.793.492	Satuan Polisi Pamong Praja
28	Program Penanggulangan Bencana	3.674.105.300	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
29	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	5.669.305.312	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
30	Program Pemberdayaan Sosial	1.369.162.600	Dinas Sosial
31	Program Rehabilitasi Sosial	1.497.858.068	Dinas Sosial
32	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.579.737.550	Dinas Sosial
33	Program Penanganan Bencana	741.471.100	Dinas Sosial
34	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	336.056.833	Dinas Sosial
35	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	958.616.500	Dinas Ketenagakerjaan
36	Program Penempatan Tenaga Kerja	163.888.000	Dinas Ketenagakerjaan
37	Program Hubungan Industrial	226.209.200	Dinas Ketenagakerjaan
38	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	249.999.910	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
39	Program Perlindungan Perempuan	834.189.550	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
40	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	219.086.360	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
41	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	293.146.400	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
42	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	229.297.700	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
43	Program Perlindungan Khusus Anak	918.724.113	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
44	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	609.589.536	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
45	Program Pengawasan Keamanan Pangan	100.000.000	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
46	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	40.000.000	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
47	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	39.684.394.000	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
48	Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	291.199.700	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
49	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	297.999.736	Dinas Lingkungan Hidup
50	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	956.150.954	Dinas Lingkungan Hidup
51	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	5.453.811.925	Dinas Lingkungan Hidup
52	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	1.695.113.028	Dinas Lingkungan Hidup
53	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	79.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
54	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	528.053.500	Dinas Lingkungan Hidup
55	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	34.988.500	Dinas Lingkungan Hidup
56	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	99.643.000	Dinas Lingkungan Hidup
57	Program Pengelolaan Persampahan	50.113.893.160	Dinas Lingkungan Hidup
58	Program Pendaftaran Penduduk	2.486.442.576	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
			Sipil
59	Program Pencatatan Sipil	632.786.396	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
60	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	942.117.716	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
61	Program Pengendalian Penduduk	586.352.100	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
62	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.412.922.450	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
63	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	1.504.396.600	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
64	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	42.322.687.700	Dinas Perhubungan
65	Program Pengelolaan Pelayaran	290.000.000	Dinas Perhubungan
66	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	4.114.464.880	Dinas Komunikasi Dan Informatika

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
67	Program Aplikasi Informatika	3.652.497.300	Dinas Komunikasi Dan Informatika
68	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	77.485.550	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
69	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	545.304.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
70	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	317.099.800	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
71	Program Pengembangan UMKM	116.399.900	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
72	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	249.994.400	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
73	Program Promosi Penanaman Modal	299.999.800	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
74	Program Pelayanan Penanaman Modal	999.002.148	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
75	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	564.889.598	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
76	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	980.933.752	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu
77	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	4.874.755.000	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
78	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing	11.289.843.064	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
	Keolahragaan		Pariwisata
79	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	1.000.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
80	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	217.150.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
81	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	49.918.000	Dinas Komunikasi Dan Informatika
82	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	1.398.970.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
83	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	1.372.850.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
84	Program Pembinaan Perpustakaan	1.295.359.150	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
85	Program Pengelolaan Arsip	649.999.750	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
86	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	99.999.300	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
87	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	638.440.072	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
88	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	4.027.329.212	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
89	Program Pemasaran Pariwisata	2.546.792.608	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
90	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	480.000.000	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
91	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana	848.004.446	Dinas Pangan, Pertanian Dan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
	Pertanian		Perikanan
92	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.455.869.827	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
93	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	783.315.540	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
94	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	98.850.000	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
95	Program Penyuluhan Pertanian	444.960.672	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
96	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	10.753.734.482	Dinas Perdagangan
97	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	99.945.000	Dinas Perdagangan
98	Program Pengembangan Ekspor	474.918.000	Dinas Perdagangan
99	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	548.880.207	Dinas Perdagangan
100	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	99.850.000	Dinas Perdagangan
101	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	8.983.416.345	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
102	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	79.985.700	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
103	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	200.000.000	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
104	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	57.793.815.231	Sekretariat Daerah
105	Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.333.174.631	Sekretariat Daerah
106	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	15.909.285.600	Sekretariat DPRD
107	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.437.613.450	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
108	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
109	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	120.228.031.228	Badan Pengelola Keuangan Daerah
110	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	22.583.600.000	Badan Pengelola Keuangan Daerah
111	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.835.392.900	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
112	Program Kepegawaian Daerah	3.734.393.090	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
113	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.826.461.136	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
			Manusia
114	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	587.312.250	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
115	Program Penyelenggaraan Pengawasan	111.435.000	Inspektorat
116	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	177.300.000	Inspektorat
117	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.765.890.000	Kecamatan Balikpapan Barat
118	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.155.760.650	Kecamatan Balikpapan Barat
119	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	99.424.900	Kecamatan Balikpapan Barat
120	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.115.055.250	Kecamatan Balikpapan Tengah
121	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.940.440.474	Kecamatan Balikpapan Tengah
122	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	47.905.000	Kecamatan Balikpapan Tengah
123	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.471.349.500	Kecamatan Balikpapan Kota
124	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	2.790.032.517	Kecamatan Balikpapan Kota

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
125	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	187.131.207	Kecamatan Balikpapan Kota
126	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	4.235.456.800	Kecamatn Balikpapan Utara
127	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.620.683.050	Kecamatn Balikpapan Utara
128	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	217.675.000	Kecamatn Balikpapan Utara
129	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	3.879.341.025	Kecamatan Balikpapan Selatan
130	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	3.130.944.110	Kecamatan Balikpapan Selatan
131	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	326.282.000	Kecamatan Balikpapan Selatan
132	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	2.652.232.200	Kecamatan Balikpapan Timur
133	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	1.897.463.756	Kecamatan Balikpapan Timur
134	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	212.180.000	Kecamatan Balikpapan Timur
135	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	286.875.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
136	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta	1.509.997.960	Kesatuan Bangsa Dan Politik

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
	Budaya Politik		
137	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1.824.995.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
138	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	432.525.000	Kesatuan Bangsa Dan Politik
II	PROGRAM PENUNJANG		
139	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	314.643.175.698	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
140	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	102.517.850.758	Dinas Kesehatan
141	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	21.502.588.500	RSKB Sayang Ibu
142	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	78.121.521.000	RSUD Beriman
143	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.213.632.612	Dinas Pekerjaan Umum
144	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.299.165.758	Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang
145	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.197.610.202	Dinas Perumahan Dan Permukiman
146	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.632.004.013	Satuan Polisi Pamong Praja
147	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.530.119.946	Badan Penanggulangan

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
	Kabupaten/Kota		Bencana Daerah
148	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.375.663.652	Dinas Sosial
149	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.266.424.328	Dinas Ketenagakerjaan
150	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.661.945.612	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
151	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.766.799.022	Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan
152	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.286.890.047	Dinas Lingkungan Hidup
153	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	9.304.434.752	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
154	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	25.367.490.272	Dinas Perhubungan
155	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.118.733.801	Dinas Komunikasi Dan Informatika
156	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.735.108.150	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian
157	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.754.911.403	Dinas Penanaman Modal Dan Perizinan Terpadu

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
158	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.764.745.382	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata
159	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.220.400.960	Dinas Perpustakaan Dan Arsip
160	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.765.892.294	Dinas Perdagangan
161	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98.720.411.490	Sekretariat Daerah
162	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	70.584.498.824	Sekretariat DPRD
163	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.234.553.941	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian Dan Pengembangan
164	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	36.542.904.676	Badan Pengelola Keuangan Daerah
165	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	39.315.849.530	Badan Pengelola Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
166	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	8.815.361.006	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
167	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12.078.399.696	Inspektorat
168	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.837.265.534	Kecamatan Balikpapan Barat

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
169	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14.890.617.184	Kecamatan Balikpapan Tengah
170	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.506.739.076	Kecamatan Balikpapan Kota
171	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	15.020.133.234	Kecamatn Balikpapan Utara
172	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	16.909.973.552	Kecamatan Balikpapan Selatan
173	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	11.863.739.444	Kecamatan Balikpapan Timur
174	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.567.724.388	Kesatuan Bangsa Dan Politik

Sumber data : Bappeda Litbang dan BPKD Kota Balikpapan, 2021

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan dan anggaran pendukung program kinerja yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kinerja perubahan tahun 2021 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1.17
Kegiatan dan Anggaran di Pemerintah Kota Balikpapan

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
----	----------	-------------------------

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149,999,850
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	311,181,610,854
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,671,828,000
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	773,872,540
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	865,864,454
6	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	190,585,040,754
7	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	146,283,438,988
8	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	18,884,023,490
9	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	17,943,536,788
10	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	728,949,100
11	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan	1,907,383,050
12	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	88,819,958,150
13	Administrasi Umum Perangkat Daerah	8,640,538,000
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,358,604,608
15	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,698,750,000
16	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	40,722,867,500
17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	136,050,314,004

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
18	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	886,323,250
19	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	338,000,000
20	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	200,000,000
21	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	10,907,500,000
22	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	641,701,500
23	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	40,715,000
24	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P- IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	247,842,500
25	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	94,126,000
26	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2,925,442,000
27	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	818,917,575
28	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,502,588,500
29	Peningkatan Pelayanan BLUD	15,000,000,000
30	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1,000,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3,010,020,224
32	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18,121,521,000
33	Peningkatan Pelayanan BLUD	60,000,000,000
34	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	20,996,002,000
35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	13,608,231,408
36	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/ Kota	8,318,000,000
37	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,608,659,100
38	Administrasi Umum Perangkat Daerah	756,700,000
39	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5,100,000,000
40	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,857,472,512
41	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,890,801,000
42	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12,170,000,000
43	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	19,500,082,910
44	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/ Kota	71,077,799,837
45	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/ Kota	164,961,999,700

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
46	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	72,397,122,000
47	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	30,950,000,000
48	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/ Kota	138,625,886,705
49	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	250,000,000
50	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,853,467,000
51	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,057,322,000
52	Administrasi Umum Perangkat Daerah	466,934,850
53	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	514,908,908
54	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	260,000,000
55	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	207,975,000
56	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	5,000,000,000
57	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1,258,448,600
58	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/ Kota	500,000,000
59	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	155,625,000
60	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,146,400,540
61	Administrasi Umum Perangkat Daerah	510,856,508

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
62	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	200,500,000
63	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	686,114,404
64	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,653,738,750
65	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	3,900,000,000
66	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	255,000,000
67	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	437,000,000
68	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1,864,511,000
69	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/ Kota	0
70	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	23,550,590,916
71	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	23,071,301,350
72	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,789,439,780
73	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	989,100,000
74	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	628,871,100
75	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,153,291,783
76	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	5,116,135,492
77	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	83,640,000
78	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	37,018,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
79	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19,940,148,150
80	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	650,000,000
81	Administrasi Umum Perangkat Daerah	699,971,800
82	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	634,999,996
83	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,605,000,000
84	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	80,000,000
85	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1,801,565,300
86	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1,617,540,000
87	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	175,000,000
88	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	4,943,455,312
89	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	725,850,000
90	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,648,461,550
91	Administrasi Umum Perangkat Daerah	819,472,850
92	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306,050,000
93	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,046,151,252
94	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555,528,000
95	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	739,162,500
96	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	630,000,100

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
97	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	622,670,839
98	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	875,187,229
99	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,579,737,550
100	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	650,471,400
101	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	90,999,700
102	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	336,056,833
103	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,615,654,000
104	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	264,150,000
105	Administrasi Umum Perangkat Daerah	903,905,076
106	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	188,107,752
107	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	294,607,500
108	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	908,835,000
109	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	49,781,500
110	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota	97,988,000
111	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	65,900,000
112	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	21,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
113	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota	205,209,200
114	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,214,242,000
115	Administrasi Umum Perangkat Daerah	628,020,100
116	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	425,922,712
117	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393,760,800
118	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	214,101,310
119	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	25,000,000
120	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	10,898,600
121	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	280,392,750
122	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	358,438,000
123	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	195,358,800
124	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	72,899,796
125	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	43,099,800

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
126	Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	103,086,764
127	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	293,146,400
128	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/ Kota	229,297,700
129	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	15,624,810
130	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	819,374,303
131	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	83,725,000
132	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	13,920,094,656
133	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,125,023,850
134	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,366,223,516
135	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,355,457,000
136	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/ Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	0
137	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/ Kota	199,997,000
138	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	409,592,536

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
139	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000
140	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000
141	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39,684,394,000
142	Penerbitan Izin Membuka Tanah	291,199,700
143	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,494,611,083
144	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	1,554,370,264
145	Administrasi Umum Perangkat Daerah	505,375,000
146	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,647,154,100
147	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16,085,379,600
148	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	297,999,736
149	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	806,150,954
150	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	150,000,000
151	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	5,453,811,925
152	Penyimpanan Sementara Limbah B3	236,113,028
153	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,459,000,000
154	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	79,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
155	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	528,053,500
156	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	34,988,500
157	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota	99,643,000
158	Pengelolaan Sampah	50,113,893,160
159	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,387,367,000
160	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,857,409,500
161	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	508,564,252
162	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	551,094,000
163	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2,486,442,576
164	Pelayanan Pencatatan Sipil	632,786,396
165	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	620,117,716
166	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	322,000,000
167	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	13,500,000
168	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	572,852,100
169	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	728,455,467
170	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	313,200,000
171	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan	1,855,413,983

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
	Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	
172	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	515,853,000
173	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	1,504,396,600
174	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	16,638,750,000
175	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	600,000,000
176	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,113,000,000
177	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4,651,500,272
178	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,364,240,000
179	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	149,720,000
180	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	30,513,000,000
181	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	400,000,000
182	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	3,999,999,900
183	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2,800,000,000
184	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	1,720,000,000
185	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	1,700,201,800
186	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1,039,766,000
187	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	70,000,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
188	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	220,000,000
189	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,492,443,000
190	Administrasi Umum Perangkat Daerah	528,562,500
191	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	412,780,000
192	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	428,173,301
193	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	256,775,000
194	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4,114,464,880
195	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3,652,497,300
196	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,926,094,000
197	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,341,000,000
198	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	978,514,150
199	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	489,500,000
200	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	77,485,550
201	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	342,400,000
202	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	202,904,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
203	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	317,099,800
204	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	116,399,900
205	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,535,207,000
206	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,466,578,435
207	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,202,202,968
208	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	550,923,000
209	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	249,994,400
210	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	299,999,800
211	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	999,002,148
212	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	564,889,598
213	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	980,933,752
214	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,173,145,950
215	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,124,660,462
216	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	900,000,000
217	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,940,513,970
218	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	626,425,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
219	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2,425,035,000
220	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,449,720,000
221	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3,250,739,536
222	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	1,676,692,488
223	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	3,474,998,040
224	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2,887,413,000
225	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	1,000,000,000
226	Penyelenggaraan Statistik Sektorial di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	217,150,000
227	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	49,918,000
228	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	1,398,970,000
229	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1,372,850,000
230	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	55,000,000
231	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4,425,541,750
232	Administrasi Umum Perangkat Daerah	465,761,674
233	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,542,105,936
234	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	731,991,600

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
235	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,129,359,150
236	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	166,000,000
237	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	250,000,000
238	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	120,000,000
239	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	279,999,750
240	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	0
241	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	99,999,300
242	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	313,585,000
243	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	74,920,000
244	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	249,935,072
245	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,391,934,672
246	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	1,629,999,540
247	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	5,395,000
248	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2,546,792,608
249	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	480,000,000
250	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	649,994,446

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
251	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	198,010,000
252	Pengembangan Prasarana Pertanian	573,684,500
253	Pembangunan Prasarana Pertanian	882,185,327
254	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	556,953,000
255	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	226,362,540
256	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	98,850,000
257	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	444,960,672
258	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,228,056,250
259	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,242,897,050
260	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,695,728,244
261	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599,210,750
262	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	7,209,824,842
263	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3,543,909,640
264	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	99,945,000
265	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	474,918,000
266	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	548,880,207

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
267	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	99,850,000
268	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	8,983,416,345
269	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	79,985,700
270	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	200,000,000
271	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30,000,000
272	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	28,552,089,835
273	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1,030,000,000
274	Administrasi Umum Perangkat Daerah	26,267,959,490
275	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,350,000,000
276	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	17,589,361,500
277	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13,688,483,000
278	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1,192,107,115
279	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	5,379,167,000
280	Penataan Organisasi	676,998,650
281	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	1,964,244,900
282	Administrasi Tata Pemerintahan	35,620,571,560
283	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	16,770,769,971
284	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1,434,130,550

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
285	Fasilitasi Kerjasama Daerah	3,968,343,150
286	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	562,348,131
287	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	953,926,500
288	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	816,900,000
289	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,300,286,000
290	Administrasi Umum Perangkat Daerah	17,460,132,030
291	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,981,471,964
292	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5,852,989,580
293	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	32,404,106,700
294	Layanan Administrasi DPRD	6,585,512,550
295	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4,341,315,600
296	Pembahasan Kebijakan Anggaran	1,506,163,300
297	Peningkatan Kapasitas DPRD	6,020,300,000
298	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	2,178,000,000
299	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	607,506,700
300	Fasilitasi Tugas DPRD	1,256,000,000
301	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7,204,664,000
302	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,912,249,753
303	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	372,666,688
304	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	624,973,500
305	Penataan Organisasi	120,000,000
306	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1,000,000,000
307	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1,257,613,450

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
308	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	180,000,000
309	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	0
310	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	335,000,000
311	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32,876,279,000
312	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,889,667,600
313	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	666,958,076
314	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	775,000,000
315	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2,263,000,000
316	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	1,194,500,000
317	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	710,000,000
318	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	115,010,531,228
319	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	1,050,000,000
320	Pengelolaan Barang Milik Daerah	22,583,600,000
321	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	36,737,059,500
322	Administrasi Umum Perangkat Daerah	999,862,950
323	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	842,298,300
324	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	736,628,780
325	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	6,835,392,900
326	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6,922,763,000
327	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,430,415,470

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
328	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	121,692,536
329	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	340,490,000
330	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1,502,000,640
331	Mutasi dan Promosi ASN	981,268,200
332	Pengembangan Kompetensi ASN	1,139,381,000
333	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	111,743,250
334	Pengembangan Kompetensi Teknis	1,029,770,300
335	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	6,796,690,836
336	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	225,000,000
337	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	0
338	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	300,000,000
339	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	62,312,250
340	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,367,326,800
341	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	76,350,000
342	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,266,949,104
343	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	763,062,396
344	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	596,336,396
345	Penataan Organisasi	8,375,000
346	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6,000,000
347	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	105,435,000
348	Pendampingan dan Asistensi	177,300,000
349	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	29,999,450

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
	Kinerja Perangkat Daerah	
350	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,031,633,300
351	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,276,397,692
352	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,752,391,092
353	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	715,196,000
354	Penataan Organisasi	31,648,000
355	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	223,132,600
356	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2,470,351,750
357	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	72,405,650
358	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,914,496,600
359	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	241,264,050
360	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	99,424,900
361	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25,424,950
362	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,982,829,256
363	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	21,000,000
364	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,850,396,978
365	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,970,495,600
366	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	988,090,400
367	Penataan Organisasi	52,380,000
368	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21,350,350

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
369	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3,003,995,900
370	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	89,709,000
371	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,797,182,474
372	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	143,258,000
373	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	47,905,000
374	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,998,000
375	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,152,406,400
376	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,583,621,237
377	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,919,675,439
378	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690,338,000
379	Penataan Organisasi	140,700,000
380	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	176,971,100
381	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2,204,378,400
382	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90,000,000
383	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	2,470,483,517
384	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	319,549,000
385	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	187,131,207
386	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,005,451,300
387	Administrasi Umum Perangkat Daerah	819,796,122
388	Pengadaan Barang Milik Daerah	0

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
389	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,307,819,706
390	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	800,311,106
391	Penataan Organisasi	86,755,000
392	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	121,131,000
393	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3,959,562,500
394	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	154,763,300
395	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,468,679,750
396	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	152,003,300
397	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	217,675,000
398	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10,000,000
399	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,496,067,800
400	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,269,731,791
401	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	443,823,044
402	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2,505,625,737
403	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,184,725,180
404	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	545,200,300
405	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	3,148,111,725

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
406	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	70,075,000
407	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	115,954,000
408	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	3,103,167,110
409	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	27,777,000
410	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	326,282,000
411	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40,000,000
412	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8,078,197,700
413	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,315,101,840
414	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,719,383,904
415	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	690,056,000
416	Penataan Organisasi	21,000,000
417	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	163,912,000
418	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	2,336,479,200
419	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	82,999,000
420	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	68,842,000
421	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	64,999,200
422	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	1,627,546,556
423	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	204,918,000
424	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	212,180,000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN (Rp)
425	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,339,528,656
426	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11,820,000
427	Administrasi Umum Perangkat Daerah	735,911,850
428	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	235,881,378
429	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244,582,504
430	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	286,875,000
431	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	1,509,997,960
432	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	1,824,995,000
433	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	432,525,000

Sumber data : Bappeda Litbang dan BPKD Kota Balikpapan, 2021

1.1.3 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Penerapan Standar Pelayanan Minimal di kota Balikpapan telah sesuai dengan Permendagri No.100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana hal tersebut telah dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Balikpapan ditahun 2021.

Adapun Penerapan Standar Pelayanan Minimal kota Balikpapan yang telah di tuangkan dalam kebijakan RPJMD dan RKPD adalah sebagai berikut:

Table 1.18
Penerapan SPM kota Balikpapan Pada Tahun 2021

NO	Uraian SPM	Kebijakan dalam RPJMD	Kebijakan dalam RKPD	Keterangan
1	Pendidikan	Program Pendidikan Non Formal	Program Pendidikan Non Formal	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu	
		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
		Program Pendidikan Dasar	Program Pendidikan Dasar	
2	Kesehatan	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	
		Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya	Program Peningkatan Kualitas, Kuantitas Sumber Daya Manusia serta Sarana Prasarana	

NO	Uraian SPM	Kebijakan dalam RPJMD	Kebijakan dalam RKPD	Keterangan
		Manusia serta Sarana Prasarana		
		Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Bidang Perumahan dan Permukiman	
5	Ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana dan Bahaya Kebakaran	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Tanggap Darurat penanggulangan Bencana	Program Tanggap Darurat penanggulangan Bencana	

NO	Uraian SPM	Kebijakan dalam RPJMD	Kebijakan dalam RKPD	Keterangan
		Program Sarana dan Prasarana Logistik	Program Sarana dan Prasarana Logistik	
		Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana	
		Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	
		Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	
		Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	
			Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	
6	Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	sudah melakukan integrasi SPM kedalam Dokrenda
		Program Penanganan Bencana	Program Penanganan Bencana	

Sumber data:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Balikpapan, 2021

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Makro Kota Balikpapan Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Makro	Indikator Kinerja Tahun 2020	Indikator Kinerja Tahun 2021	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia	80,01	80,71	0,7
2	Angka Kemiskinan	2,57	2,89	0,32
3	Angka Pengangguran	9,00	8,94	-0,06
4	Pertumbuhan Ekonomi	0,69	4,56	5,25
5	Pendapatan Perkapita	151,20 Juta Rupiah	160,10 Juta Rupiah	8,91 Juta Rupiah
6	Ketimpangan Pendapatan	0,311	0,325	0,014

Sumber data badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan Kota Balikpapan.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN

PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan Kota Balikpapan dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Luaran.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Kunci Luaran.

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
PENDIDIKAN	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)	271		DISDIKBUD
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	0		DISDIKBUD
		Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	1		DISDIKBUD
		Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)	1476		DISDIKBUD
		Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)	1135		DISDIKBUD
		Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini	888		DISDIKBUD
	tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	67		DISDIKBUD
		jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	159		DISDIKBUD
		Jumlah peserta didik SD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	52792		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar	Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	0		DISDIKBUD
		jumlah peserta didik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	52792		DISDIKBUD
		jumlah peserta didik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20404		DISDIKBUD
		jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	3580		DISDIKBUD
		jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1694		DISDIKBUD
		jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	1209		DISDIKBUD
		jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1712		DISDIKBUD
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	463		DISDIKBUD
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	342		DISDIKBUD
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	165		DISDIKBUD
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	362		DISDIKBUD
		Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	492		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	959		DISDIKBUD
		Jumlah kepala sekola pada jenjang SD Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	40		DISDIKBUD
		Jumlah kepala sekola pada jenjang SMP Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	57		DISDIKBUD
		Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	71		DISDIKBUD
		Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	112		DISDIKBUD
	Tingkat partisipasi warga negara Usia 13-15 tshun ysng berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama	Jumlah SD dan SMP Negeri Yang Terakreditasi	159		DISDIKBUD
		Jumlah peserta didik SD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	52792		DISDIKBUD
		Jumlah peserta didik jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari pemerintah Daerah	0		DISDIKBUD
		jumlah peserta didik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	52792		DISDIKBUD
		jumlah peserta didik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	20404		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	3580		DISDIKBUD
		jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1694		DISDIKBUD
		jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	1209		DISDIKBUD
		jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	1712		DISDIKBUD
		Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	463		DISDIKBUD
		jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	342		DISDIKBUD
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SD (Negeri dan Swasta)	165		DISDIKBUD
		Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta)	362		DISDIKBUD
		Jumlah pendidik pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	492		DISDIKBUD
		Jumlah pendidik pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 dan sertifikat pendidikan.	959		DISDIKBUD
		Jumlah kepala sekola pada jenjang SD Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah.	40		DISDIKBUD
		Jumlah kepala sekola pada jenjang SMP Negeri dan Swasta yang memiliki ijazah D.IV atau S.1, srtifikat penddik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala	57		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	71		DISDIKBUD
		Jumlah tenaga penjunjang lainnya pada jenjang SMP (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA / sederajat	112		DISDIKBUD
	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	jumlah satuan pendidikan Kesetaraan terkakreditasi (Negeri dan Swasta)	12		DISDIKBUD
		jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima Perlengkapan dasar dari pemerintah daerah	0		DISDIKBUD
		Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	2964		DISDIKBUD
		jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	570		DISDIKBUD
		Jumlah Pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	190		DISDIKBUD
		Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma IV (D IV) atau sarjana S.1	127		DISDIKBUD
		Jumlah kepala sekolah pada jenjang SD yang memiliki ijazah D.IV atau S.1 Sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	5		DISDIKBUD
		jumlah kepala sekolah pada satuan kependidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D.IV atau S.1	19		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
KESEHATAN	Rasio Daya tampung Rumah sakit rujukan	jumlah RS Rujukan Kabupaten/Kota yang memenuhi sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	14		DINKES
	Presentase Rumah Sakit Rujukan Tingkat Kota yang terakreditasi	Jumlah RS yang dibina dan dipersiapkan akreditasinya	2		DINKES
	Presentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	53165		DINKES
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan Antenatal	248		DINKES
	Presentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan bersalin	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	30444		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	232		DINKES
	Presentase Bayi baru lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	50310		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	369		DINKES
	Presentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	373059		DINKES
		Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	382		DINKES
	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	159860		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar (7-15) sesuai standar	382		DINKES

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	standar				
	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	58856		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	268		DINKES
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	72312		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	268		DINKES
	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	29172		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	238		DINKES
	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	9015		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	268		DINKES
	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	2088		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	225		DINKES

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	sesuai standar				
	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	28595		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	3213		DINKES
	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	41046		DINKES
		jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	1476		DINKES
PEKERJAAN UMUM	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kab/Kota (ha)	6788		DINAS PU
		panjang sungai di kawasan pemukiman yang rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (m)	9039265		DINAS PU
		luas kawasan pemukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/kota (ha)	458,42		DINAS PU
		panjang pantai dikawasan pemukiman yang rawan abrasi,erosi,akresi di WS kewenangan Kab/kota (m)	11618,31		DINAS PU
		rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD air WS kewenangan Kab/kota	0		DINAS PU
		Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan SD air kewenangan Kab/kota	0		DINAS PU
		Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kab/kota.	414702.88		DINAS PU

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	Rasio luas Daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	presentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	33%		DINAS PU
		presentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik (m)	20.5%		DINAS PU
		presentase panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik	panjang jaringan irigasi tersier dalam kondisi baik (m)	0		DINAS PU
			panjang jaringan irigasi tersier (m)	0		DINAS PU
	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh kab/kota	pemenuhan dokume RISPAM kab/kota		TIDAK ADA		DINAS PU
		tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kab/kota		TIDAK ADA		DINAS PU
		jumlah BUMD dan atau UPTD kab/kota penyelenggaraan SPAM		ADA		DINAS PU
		jumlah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		0		DINAS PU
		Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain		0		DINAS PU
	persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan	jumlah rumah tangga dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		0		DINAS PERKIM

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
	pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	150			DINAS PERKIM	
		Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	N/A			DINAS PERKIM	
		jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	150			DINAS PERKIM	
		jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja	0			DINAS PERKIM	
		jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	4939			DINAS PERKIM	
		kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tangki septik	33461	0		DINAS PERKIM
			rumh diwilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa/ha	0			DINAS PERKIM
		kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Nihil		Dikelola Oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB Yang berlokasi di PTAS Manggar)	DINAS PERKIM

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
			rumh diwilayah pengembangan SPALDS dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun kurang dari 25 jiwa/ha	Nihil			DINAS PERKIM
		kinerja penyediaan pelayanan SPALD T Akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD Rumah diwilayah pengembangan SPALDT	Baik Baik		Pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur atau petunjuk teknis yang telah diselesaikan	DINAS PERKIM
		kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	Baik		Pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur atau petunjuk teknis yang telah diselesaikan	DINAS PERKIM
			jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah penegmbangan SPADLD-S	Baik			DINAS PERKIM
		kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	N/A		Dikelola Oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB Yang berlokasi di PTAS Manggar)	DINAS PERKIM
			jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota	N/A			DINAS PERKIM
		kinerja penyediaan prasarana pengolahan	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	N/A		Dikelola Oleh Perumda Tirta Manuntung	DINAS PERKIM

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
		lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota	N/A		Balikipapan (PTMB Yang berlokasi di PTAS Manggar)		
		kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	Baik		Pelayanan dilakukan sesuai dengan prosedur atau petunjuk teknis yang telah diselesaikan	DINAS PERKIM	
			umlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T pada kota	Baik				
		Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	N/A		Dikelola Oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB Yang berlokasi di PTAS Manggar)	DINAS PERKIM	
			jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah penegmbangan SPADLD-S				DINAS PERKIM	
	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan Gedung (kecuali rumha tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi yang berlaku	15slf			DINAS PU	
			Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	745			DINAS PU	
			Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Perda Kota Balikpapan No.3 Tahun 2016			DINAS PU
			Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		SK Walikota Balikpapan Tentang Tim Ahli Bangunana Gedung			DINAS PU

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	Tidak Ada Karena Dinas PU Tahun 2021 Belum Menangani Tentang Bangunan Gedung yang dilindungi dan dilestarikan		DINAS PU
		Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	N/A		DINAS PU
		Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	273 Gedung		DINAS PU
		Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/kota yang dipelihara/dirawat	273 Gedung		DINAS PU
	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/Kota	501.18		DINAS PU
		Panjang jalan yang dibangun	1808.9		DINAS PU
		Panjang jembatan yg dibangun	tidak ada		DINAS PU
		Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	25777.15		DINAS PU
		Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	tidak ada		DINAS PU
		Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	tidak ada		DINAS PU
		Panjang jembatan yang direhabilitasi	tidak ada		DINAS PU
		Panjang jalan yang dipelihara	tidak ada		DINAS PU
		Panjang jembatan yang dipelihara	tidak ada		DINAS PU
	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	150		DINAS PU
		Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Yang Terlatih Di Wilayah Kabupaten/Kota	660		DINAS PU

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah kabupaten/kota	4014		DINAS PU
		Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Cakupan kabupaten/kota yang aktif dengan data termutakhir	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBD Kab/Kota	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi	150		DINAS PU

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		pemerintah lainnya			
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis	Tersedia Data Tahun 2019 (Sumber Data Lpjk)		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak ada		DINAS PU
		Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak ada		DINAS PU

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	tidak ada		DINAS PU
		Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	tidak ada		DINAS PU
		Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	tidak ada		DINAS PU
		Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	tidak ada		DINAS PU
		Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	tidak ada		DINAS PU
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak ada		DINAS PU
		Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak ada		DINAS PU
		Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	tidak ada		DINAS PU
PERUMAHAN RAKYAT	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kot	jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	12		DISPERKIM
		Jumlah rumah yang terkena bencana alam	17		DISPERKIM
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam	49		DISPERKIM

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	a	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	11		DISPERKIM
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	0		DISPERKIM
		Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi	0		DISPERKIM
		Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	1		DISPERKIM
		Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	37		DISPERKIM
		Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	0		DISPERKIM
	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	1		DISPERKIM
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	0		DISPERKIM
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan	1		DISPERKIM
		Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	12		DISPERKIM

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
		Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	5			DISPERKIM	
		Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	0			DISPERKIM	
	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/kota yang ditangani	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	5,4			DISPERKIM	
		Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	351			DISPERKIM	
		Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	3963			DISPERKIM	
	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah rumah di kab/kota	240078			DISPERKIM	
		Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	351			DISPERKIM	
		Jumlah rumah tidak layak huni	630			DISPERKIM	
		Jumlah rumah yang tidak dihuni	27465			DISPERKIM	
		Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	100	132%		DISPERKIM
			jumlah Total Unit rumah	76			DISPERKIM
			Jumlah rumah pembangunan baru	76			DISPERKIM
	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	76			DISPERKIM	
		Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	0			DISPERKIM	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	0		DISPERKIM
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	150		DISPERKIM
		Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	0		DISPERKIM
		Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	240.078		DISPERKIM
		Jumlah pengembang yang tersertifikasi	25		DISPERKIM
		Jumlah pengembang yang teregistrasi	35		DISPERKIM
		Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	50		DISPERKIM
KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/Kota yang ditangani	9557		SATPOL PP
		Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	126		SATPOL PP
		Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	15		SATPOL PP
		Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	4		SATPOL PP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Permendagri NO.54 Tahun 2011	ADA (4 SOP)			SATPOL PP
		Tersedianya sarana prasarana minimal		452			SATPOL PP
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/lega	kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	0	0%		BPBD
jumlah satuan dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan			0			BPBD	
Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana				1945			BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal		0			BPBD
		Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal		100			BPBD
		Persentase warga negara yang ikut pelatihan	jumlah warga negara yang ikut pelatihan	70	4%		BPBD
			jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	1945			BPBD
		Persentase warga negara yang mendapat layanan	jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdolops	1945	100%		BPBD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	1945			BPBD
		Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan	262	100%		BPBD
			jumlah warga negara yang berada dikawasan rawan bencana	262			BPBD
	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	15 MENIT			BPBD
			jumlah seluruh penetapan status KLB				BPBD
		Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	15			BPBD
			jumlah seluruh penetapan status darurat				BPBD
			Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana			

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
			jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana				BPBD
		Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi				BPBD
			perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana				BPBD
	presentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota		756			BPBD
		Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		8			BPBD
		Tersedianya aparaturnya selama 24 jam yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		24 regu			BPBD
		Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		8			BPBD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		26		BPBD
		Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		291		BPBD
		Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		70		BPBD
		Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran		291		BPBD
SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Layanan Pengaduan Anak (1 layanan)	1 layanan pengaduan masalah sosial anak (LAGU ASIK)		DINSOS
		Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM		total 255 orang dengan rincian disabilitas terlantar 1 orang, gepeng 254 Orang		DINSOS
		Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		1 tim beranggotakan 12 orang		DINSOS
		Jumlah penyandang	PMKS Anak	23		DINSOS

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA	
		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Lanjut usia terlantar	56		DINSOS
			Penyandang Disabilitas terlantar	31		DINSOS
			gepeng	24		DINSOS
		Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	Rehabilitasi Sosial (ODGJ)	1 unit toyota HIACE		DINSOS
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	lanjut usia	56		DINSOS
			Penyandang Disabilitas Terlantar	31		DINSOS
			Anak terlantar	2		DINSOS
		Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	RPSA	1		DINSOS
			RPLUT	1		DINSOS
			Asrama Penyandang Disabilitas	1		DINSOS
			Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	1		DINSOS
			Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS	1		DINSOS
		Jumlah penyandang	PMKS Anak	0		DINSOS

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA	
		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	lanjut usia	33		DINSOS
		terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	Penyandang Disabilitas	31		DINSOS
			PMKS Tuna Sosial	0		DINSOS
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia	PMKS Anak	0		DINSOS
		terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	lanjut usia	0		DINSOS
			Penyandang Disabilitas	32		DINSOS
			gepeng	5		DINSOS
		Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/ shelter	RPSA	0		DINSOS
			RPLUT	0		DINSOS
			Asrama Penyandang Disabilitas	0		DINSOS
			Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa	0		DINSOS
		Jumlah paket perbekalan Kesehatan yang tersedia	RPSA	0		DINSOS
			RPLUT	0		DINSOS
			Asrama Penyandang Disabilitas	0		DINSOS
			Rumah Penampungan Orang Dengan Gangguan Jiwa	0		DINSOS

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
			Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) PMKS	0		DINSOS
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	PMKS Anak	0		DINSOS
			lanjut usia	0		DINSOS
			Penyandang Disabilitas	0		DINSOS
			PMKS Tuna Sosial	0		DINSOS
		Jumlah tenaga Kesehatan yang disediakan di rumah singgah		113		DINSOS
		Jumlah pekerja sosial professional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan				DINSOS
		jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	PMKS Anak	23		DINSOS
			Lanjut usia terlantar	33		DINSOS
			Penyandang Disabilitas	2		DINSOS
			Gepeng	159		DINSOS
		Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		0		DINSOS
		Jumlah penyandang	PMKS Anak	7		DINSOS

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA	
		disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	Lanjut usia terlantar	6		DINSOS
			Penyandang Disabilitas	2		DINSOS
			PMKS Tuna Sosial	0		DINSOS
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	PMKS Anak	5		DINSOS
			Lanjut usia terlantar	33		DINSOS
			Penyandang Disabilitas	4		DINSOS
			PMKS Tuna Sosial	0		DINSOS
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	PMKS Anak	0		DINSOS
			Lanjut usia terlantar	7		DINSOS
			Penyandang Disabilitas	1		DINSOS
			PMKS Tuna Sosial	0		DINSOS
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anakterlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	PMKS Anak	0		DINSOS
			Lanjut usia terlantar	7		DINSOS
			Penyandang Disabilitas	1		DINSOS
			PMKS Tuna Sosial gepeng	136		DINSOS
		Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	PMKS Anak	0		DINSOS
			Lanjut usia terlantar	12		DINSOS
			Penyandang Disabilitas	0		DINSOS
			PMKS Tuna	0		DINSOS

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
			Sosial			
	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		668		DINSOS
		Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		668		DINSOS
		Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		7		DINSOS
		Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		0		DINSOS
		Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		0		DINSOS
		Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		87		DINSOS
TENAGA KERJA	Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Dokumen perencanaan tenaga kerja kabupaten/kota		ADA		DISNAKER
		Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja	realisasi indikator	5	20%	DISNAKER
			target indikator realisasi	4		DISNAKER
			realisasi	5		DISNAKER
		Jumlah perusahaan yang menyusun rencana tenaga kerja di kabupaten/kota		0		DISNAKER

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
	Persentase tenaga kerja berertifikat kompetensi	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	jumlah penerapan program PKB kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahunnya (n)	6	100%		DISNAKER
keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun (n)			6			DISNAKER	
Persentase instruktur bersertifikat kompetensi		jumlah insruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2021	79	95%		DISNAKER	
		jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2021	83			DISNAKER	
Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan		jumlah isntruktur pada tahun 2021	93	78%		DISNAKER	
		jumlah peserta pelatihan pada tahun 2021	119			DISNAKER	
Persentase LPK yang terakreditasi		jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2021	1	100%		DISNAKER	
		jumlah seluruh LPK pada tahun 2021	1			DISNAKER	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Persentase LPK yang memiliki perizinan	jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2020	0	0%		DISNAKER
			jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020	37			DISNAKER
		Jumlah penganggur yang dilatih Sudah cukup jelas		NIHIL		Karena yang diberikan pelatihan oleh disnaker adalah pencaker yang terdaftar	DISNAKER
		Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pada pelatihan bersertifikat pada tahun 2021	119	100%		DISNAKER
			jumlah orang yang dilatih pada tahun 2021	119			DISNAKER
		Persentase penyerapan lulusan	jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2021	83	70%		DISNAKER
			jumlah lulusan pada tahun 2021	119			DISNAKER

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
		Lulusan bersertifikat kompetensi	jumlah lulusan pelatihan berseertifikat kompetensi pada tahun 2021	37	31%		DISNAKER	
			jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2021	119			DISNAKER	
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang diberikan pelatihan	jumlah CPMI dilatih	nihil			DISNAKER	
			jumlah CPMI Terdaftar	nihil			DISNAKER	
		Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI)		nihil			DISNAKER	
	tingkat produktifitas tenaga kerja	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktifitas pada tahun 2021	85	100%		DISNAKER	
			jumlah perusahaan pada tahun 2021	85			DISNAKER	
		Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi					DISNAKER
			pertumbuhan modal					DISNAKER
			pertumbuhan tenaga kerja					DISNAKER

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020	40	nihil karena kewenangan ada di provinsi	Nihil karena kewenangan ada di provinsi	DISNAKER	
			jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	0			DISNAKER	
		Persentase perusahaan yang telah memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020	4			DISNAKER	
			jumlah perusahaan yang memiliki SP/SB	160			DISNAKER	
		Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		156				DISNAKER
		Persentase perusahaan yang sudah menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	16	40%		DISNAKER	
			jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (yang diatur dalam PP/PKB)	40			DISNAKER	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan	5096			DISNAKER
			jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor	0		Kewenangan disnakertrans provinsi	DISNAKER
		Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	jumlah perusahaan yang berselisih	50	100%		DISNAKER
			jumlah perusahaan pada tahun 2021	50		DISNAKER	
		Jumlah mogok kerja	jasas	45		PT. Ossiana Saktu Ekamaju	DISNAKER
		Jumlah penutupan perusahaan	jasas	0			DISNAKER
		Jumlah perselisihan kepentingan	SDA	1			DISNAKER
		Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan	SDA	0			DISNAKER
		Jumlah perselisihan PHK	SDA	46			DISNAKER
		Jumlah pekerja/buruh yang ter-PHK	SDA	116			DISNAKER

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartite	SDA	0		DISNAKER
		Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit kabupaten/kota yang diberdayakan	Ada/tidak	1		DISNAKER
		Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	jumlah perjanjian bersama	35	70%	DISNAKER
			jumlah kasus perselisihan	50		DISNAKER
	persentase tenaga kerja yang ditempatkan (Dalam Wilayah Kabupaten/Kota)	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah kabupaten/kota	jelas			DISNAKER
		Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota	SDA			DISNAKER
		Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota	SDA	0		DISNAKER
		Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu kabupaten/kota	SDA	0		DISNAKER
		Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja	SDA	1		DISNAKER

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota	SDA	0		DISNAKER
		Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/Kota	SDA	142		DISNAKER
		Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)	SDA	0		DISNAKER
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	jumlah CPMI/CTKI yang mendapatkan sosialisasi	0		DISNAKER
			jumlah CPMI	0		DISNAKER
			jumlah CTKI	0		DISNAKER
		Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		0		DISNAKER
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan fasilitasi kepulangan	jumlah faslitas yang dipulangkan	0		DISNAKER
			jumlah PMI yang pulang	0		DISNAKER

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA	
		Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	jumlah PMI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		DISNAKER
			jumlah TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	0		DISNAKER
			Jumlah PMI	0		DISNAKER
			jumlah TKI	0		DISNAKER
		Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Jumlah PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	0		DISNAKER
			Jumlah PMI atau TKI purna dan keluarganya	0		DISNAKER
		Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk		1		DISNAKER
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG		7		DP3AKB
		Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota		23		DP3AKB

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA	
	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan pemkab/kota (dinas pppa) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		2		DP3AKB	
		Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		6		DP3AKB	
		Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	26	33%		DP3AKB
			jumlah korban kekerasan anak ditingkat kota	79			DP3AKB
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		3		DP3AKB	
		Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh pemkab/kota (APBD kab/kota)		5		DP3AKB	
	rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPI (per 10.000 penduduk perempuan)	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan		2		DP3AKB	
		Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih		94		DP3AKB	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		1		DP3AKB	
		Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota		20		DP3AKB	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	3			DP3AKB
		Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	1			DP3AKB
		Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	64	100%		DP3AKB
		jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	64			DP3AKB
		jumlah korban kekerasan terhadap perempuan	64			DP3AKB
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PANGAN	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	belum ada infrastruktur penyimpanan CPPD, (dititip digudang bulog)	belum ada infrastruktur penyimpanan CPPD, (dititip digudang bulog)		DP3
		Tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	jenis pangan beras			DP3
		Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	nihil			DP3
		Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	ada 5 kegiatan			DP3

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan		ada 1 buku peta dan ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA Tahun 2021)		DP3
		Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak	Tidak ada prioritas 1		DP3
		Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak	Tidak tersalurkan karena tidak ada daerah prioritas 1 dan belum ada perda tentang penyelenggaraan pangan		DP3
		Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Tidak ada	Tidak Ada		DP3
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PERTANAHAN	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	jumlah izin lokasi yang diterbitkan	11		DPPR
						DPPR

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	0	0%	tidak dapat di peroleh isian datanya pada tahun 2021 karena kegiatan landreform atau reformagraria	DPPR
			jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan landreform	0		tdak dilaksanagn dikota balikpapan , perencanaan kegiatan tersebut akan mulai dilakukan pada tahun 2022	DPPR
		SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilih tanah kelebihan maksimum absentee	0			DPPR
			jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	0			DPPR

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Dokumen Izin membuka tanah	jumlah dokumn izin membuka tanah yagdisetujui	0		TIDAK ADA	DPPR
			jumlah izin membuka tanah yang ditolak	0		TIDAK ADA	DPPR
			jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	0		TIDAK ADA	DPPR
		Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	0		TIDAK ADA	DPPR
			jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	0		TIDAK ADA	DPPR
LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	a.Indeks kualitas air (IKA) Indeks Kualitas Udara (IKU)		49,44	69.66 %		DLH
		b. Indeks tutupan hutan (ITH)		88,52			DLH
		c. Indeks Tutupan Hutan (ITH)		69,49			DLH
	Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab/Kota	1. Tersedianya informasi terkait rasio angkutan pengelolaan sampah terhadap volume timbulan sampah		0,22526			DLH
		2. Tersedianya informasi terkait kapasitas TPA terhadap volume timbulan sampah		0,22526			DLH

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		3. Tersedianya informasi terkait jumlah TPST dibagi jumlah sampah pada masing-masing lingkungan		1,47059		DLH
	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kot	Izin lingkungan yang diterbitkan oleh pemkot	37		DLH
Izin PPLH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kota			48	DLH		
Izin PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah Daerah Kota				DLH		
Jumlah usulan permohonan yang teregistrasi			54	DLH		
Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota		Jumlah PPLHD yang ada	3	DLH		
		Jumlah izin kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan diterbitkan oleh PEMDA kota	37	DLH		
		Izin PPLH yang izin lingkungan diterbitkan oleh PEMDA kota	48	DLH		
		Jumlah PUU LH yang diterbitkan oleh PEMDA kota		DLH		

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah kabupaten/ kota Masyarakat	Jumlah MHA yang diakui				DLH
			jumlah usulan MHA				DLH
		Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah MHA Yang mendapatkan pelatihan				DLH
			jumlah MHA yang ada				DLH
		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat/rencana diklat	13	100%		DLH
			target lembaga kemasyarakatan yang akan diberikan diklat	13			DLH
		Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	pengaduan msyarakat yangditangani	40	100%		DLH
			total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	40			DLH

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		yang ditangani					
URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Kependudukan dan catatn sipil	penerbitan akta perkawinan	Jumlah Akta perkawinan yang di terbitkan	503	100%		DISDUKCAPIL
			Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	503			DISDUKCAPIL
		Penerbitan akta Perceraian	Jumlah Akta Perceraian yang di terbitkan	75	100%		DISDUKCAPIL
			Peristiwa perceraian yang dilaporkan	75			DISDUKCAPIL
		Penerbitan akta Kematian	Jumlah Akta Kematian yang di terbitkan	6886	100%		DISDUKCAPIL
			Peristiwa Kematian yang dilaporkan	6886			DISDUKCAPIL
		Penyajian data kependudukan	Jumlah Penyajian data kependudukan Sekala Kota dalam 1 tahun	3	100%		DISDUKCAPIL
			2 tahun	3			
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	PEMERINTAHAN	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
DESA		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	PEMERINTAHAN
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	PEMERINTAHAN
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	PEMERINTAHAN
	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	PEMERINTAHAN
		Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	PEMERINTAHAN
		Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	PEMERINTAHAN
		Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	tidak ada desa mandiri dikota balikpapan	PEMERINTAHAN

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	TFR (Angka Kelahiran Total)	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	n/a	n/a	ada (Belum diperdakan)	DP3AKB	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Jumlah perempuan Usia 25-49 Tahun yang sudah menikah	82606	75,80 %	DP3AKB	DP3AKB
			jumlah perempuan usia 25-49 tahun	108977			DP3AKB
		Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 1519)	angka kelahiran kelompok usia 15-19 tahun	366	1,59%		DP3AKB
			jumlah penduduk perempuan usia 15-19 tahun	23.059			DP3AKB
		Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK(avokasi dan KIE)	4712	86,21 %		DP3AKB
			jumlah sasaran masyarakat program (KKBPK dan KIE)	5466			DP3AKB
		Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK	9			DP3AKB	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	140	100%		DP3AKB	
			jumlah faskes	140			DP3AKB	
		Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	jumlah peserta KB aktif	73018	70%		DP3AKB	
			jumlah PUS	10386 2			DP3AKB	
		Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	Jumlah kelompok kerja KKBPK yang efektif	34 pokja			DP3AKB	
		Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi caramodern	4061	100%		DP3AKB	
			jumlah sasaran peserta KB pasca peralihan	4061			DP3AKB	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kesertaan KB di Kabupaten dan Kota dengan kesertaan rendah		721 kelurahan damai baru			DP3AKB
			Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	7962	100%		DP3AKB
				Jumlah keluarga PBI	7962			DP3AKB

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
URUSAN PERHUBUNGAN	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan tipe C	jumlah fasilitas penyeleggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C yang tersedia	fasilitas utama 35% fasilitas penunjang 42%		fasilitas utama 35% fasilitas penunjang 42%	DISHUB	
		jumlah fasilitas penyelenggara terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		fasilitas utama 35% fasilitas penunjang 42%				DISHUB
		Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji pertahun	14064	64%			DISHUB
			jumlah kendaraan wajib uji	22031				DISHUB
		Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perkotaan dan pedesaan kelas ekonomi	jumlah penerapan tarif lintas penyeberangan	15 Tarif				DISHUB
			jumlah lintas penyeberangan dalam kota	15				DISHUB
		Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	jumlah pemasangan perlengkapan jalan kota	6	7,14%			DISHUB
			target kebutuhan perlengkapan jalan kota	84				DISHUB

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
URUSAN KOMUNI KASI DAN INFORMATIKA	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	jumlah perangkat daerah yang salin terkoneksi di jaringan intra pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh dinas kominfo				DISKOMINFO	
			jumlah perangkat daerah	34			ORTAL	
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan oleh dinas kominfo	62	182,3			DISKOMINFO
			jumlah perangkat daerah	34				ORTAL
		Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah						DISKOMINFO
	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi	jumlah kegiatan event perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan					DISKOMINFO

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015	domain dan sub domain instansi [enyelenggara negara ssuai engan PM kominfo No.5/2015				
			Jumlah kegiatan perangkat daerah dan pelayanan publik pada pemerintah daerah				DISKOMINFO
		Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	jumlah perngkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai dengan standar	62	182%		DISKOMINFO
			jumlah perngkat daerah	34			ORTAL
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundangundangan	jumlah perngkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	34	100%		DISKOMINFO
			jumlah perangkat daerah	34			ORTAL

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	layanan SPBE (layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	102	100%		DISKOMINFO
			jumlah layanan	102			DISKOMINFO
		Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	layanan SPBE (layanan Publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	2	100%		DISKOMINFO
			jumlah layanan	2			DISKOMINFO
		Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	122	100%		DISKOMINFO
			jumlah sistem elektronik	122			DISKOMINFO
		Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	4	100%		DISKOMINFO
			jumlah layana publik dan layanan administrasi	4			DISKOMINFO

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat dan pemerintah			DISKOMINFO
			jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO
		Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	jumlah perangkat daerah yang menyimpan data dipusat			DISKOMINFO
			jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO
		Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya			DISKOMINFO
			Jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO
		Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai			DISKOMINFO
			Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah			DISKOMINFO
		Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	9	26,47 %	DISKOMINFO
			Jumlah perangkat daerah	34		DISKOMINFO

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengeola TIK yang tersrtifikasi kompetensi dibawah pengolaan dinas kominfo				DISKOMINFO
			Jumlah ASN pengeola TIK				DISKOMINFO
		Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi egovernment	1. Dokumen master	2	0,00%		DISKOMINFO
			2. Perda/Perkada tentang pengelolaan TIK	0			DISKOMINFO
	Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah provinsi yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	Jumlah komunitas masyarakat atau mitras strategis pemerintah daerah provinsi yang telah menyebarkan informasi dab kebijakan pemerintah	6	100%		DISKOMINFO
			Komunitas masyarakat atau itra komunikasi pemerintah provinsi	6			DISKOMINFO
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi	Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	0	0%	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		(STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi	0			DISKOMINFO
		Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP	13	0%		DISKOMINFO
			Jumlah diseminasi dan layanan informasi publik	0 belum dilaksanakan penyusunan strategi komunikasi		Belum dilaksanakan penyusunan strategi komunikasi	DISKOMINFO
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kota	Jumlah Penerbitan Izin usaha Simpan Pinjam Koperasi pada tahun yang di laporkan	1		4%	
			Jumlah Usaha Simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam	26			DKUMKMP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Persentase fasilitasi penerbitan ijin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah Penerbitan Izin Pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor Kas Usaha Simpan Pinjam pada tahun yang dilaporkan	0	0%		DKUMKMP
			Jumlah Permohonan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Usaha Simpan Pinjam pada Tahun yang dilaporkan.	0			DKUMKMP
		Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kota	Jumlah Koperasi yang di periksa dan diawasi	97	20%		DKUMKMP
			Jumlah Koperasi yang ada	494			DKUMKMP
		Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang di Nilai Kesehatannya	12	46%		DKUMKMP
			Jumlah Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi Yang Ada	26			DKUMKMP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150	30%		DKUMKMP
			Jumlah Koperasi yang ada	492			DKUMKMP
		Persentase jumlah anggota operasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Anggota Koperasi yang mengikuti pelatihan Perkoperasian	150	1%		DKUMKMP
			Jumlah Anggota Koperasi yang ada	20794			DKUMKMP
		Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	1	0%		DKUMKMP
			Jumlah Koperasi yang Ada	494			DKUMKMP
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	tidak perlu disi	0	0%		DKUMKMP
		Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk	Jumlah Koperasi yang telah di terbitkan sertifikat NIK	18	4%		DKUMKMP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang ada	494			DKUMKMP
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pembiayaan	0	0%		DKUMKMP
			Jumlah Koperasi yang ada	494			DKUMKMP
		Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang di berikan dukungan Fasilitas Pemasaran	0	0%		DKUMKMP
			Jumlah Koperasi yang ada	494			DKUMKMP
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingankielem bagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah Koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pendampingan Kelembagaan dan Usaha	150	30%		DKUMKMP
			Jumlah Koperasi yang ada	492			DKUMKMP
		Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	0	0%		DKUMKMP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	jumlah koperasi yang ada	494			DKUMKMP
	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah Pertumbuhan Wirausaha Baru	19512	41%		DKUMKMP
			Jumlah Wirausaha yang ada	47054			DKUMKMP
		Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah Usaha Mikro yang diinput ke dalam sistem data Online (ODS)	54391	116%		DKUMKMP
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	47054			DKUMKMP
		Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah Usaha Mikro yang bermitra	180	0%		DKUMKMP
			Jumlah Usaha Mikro Yang ada	47054			DKUMKMP
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha Mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	368	1%		DKUMKMP
			Jumlah Usaha mikro yang belim memiliki standar	46686			DKUMKMP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah Usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran				DKUMKMP
			Jumlah Usaha Mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran				DKUMKMP
		Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah Uaha Mickro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	0	0%		DKUMKMP
			Jumlah Usaha Mikro yang ada	47054			DKUMKMP
		Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah Usaha Mikro yang di berikan pendampingan kelembagaan dan usaha	0	0%		DKUMKMP
			jumlah usaha mikro yang ada	47054			DKUMKMP
INDIKATOR KINERJA KUNCI URUSAN PENANAMAN MODAL	PERDA mengenai pemberian fasilitas/ intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota			nihil			DPMPT
	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal			nihil			DPMPT

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		nihil (pada tahun 2022 baru akan dilaksanakan penyusunan naska akademis mengenai perda pemberian fasilitas atau insentif penanaman modal)		DPMPT
	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Jumlah kegiatan seminar bisnis/business forum, one on one meeting	1		DPMPT
	Kegiatan pameran penanaman modal	Jumlah kegiatan pameran penanaman modal	1		DPMPT
	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal	Jumlah kegiatan penerimaan misi penanaman modal	1		DPMPT
	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah konsultasi perizinan dan nonperizinan penanaman modal	1642		DPMPT
	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Jumlah penerbitan perizinan dan nonperizinan	21434		DPMPT
	Laporan realisasi penanaman modal	Jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau di tingkat Kabupaten/Kota	19593504460000		DPMPT
	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota	Jumlah aparatur dan penanam modal yang memahami ketentuan pelaksanaan kegiatan penanaman modal	1		DPMPT
	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Jumlah perusahaan yang mendapatkan pengawasan dan pelaksanaan penanaman modal	473		DPMPT

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non peizinan provinsi kabupaten/kota		17			DPMPT
INDIKATOR KUNCI URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAG	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan	0			DPOP
		Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan	0			DPOP
	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	124	413%		DPOP
		Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan	30			DPOP
	Peningkatan Prestasi Olahraga	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan	26	217%		DPOP
		Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah	12			DPOP
INDIKATOR KUNCI URUSAN STATISTIK	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan	Tersedianya buku profil daerah	Buku profil pembangunan kota Balikpapan tahun 2021, dan buku Balikpapan dalam angka tahun 2021			DISKOMINFO
		Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan	0			DISKOMINFO

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	daera	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		0		DISKOMINFO
		Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		0		DISKOMINFO
		Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		0		DISKOMINFO
		Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral	Jumlah metode kegiatan statistik sektoral	0		DISKOMINFO
			jumlah kegiatan statistik sektoral	0		DISKOMINFO
		Persentase kelengkapan metadata variabel sektoral	Jumlah metadata indikator statistik sektoral	0		DISKOMINFO
			Jumlah indikator statistik sektral	0		DISKOMINFO
PERSANDIAN	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan	0		DISKOMINFO
			Jumlah kegiatan strategis yang ada	0		DISKOMINFO
		Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapka prinsipprinsip	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat eletronik atau	0		DISKOMINFO

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA	
		manajemen keamanan informasi (SMKI) dan atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	aplikasi penyandian				
			jumlah SE yang ada			DISKOMINFO	
		Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jmlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dngan resiko kategori rendah			DISKOMINFO	
			Jumlah SE yang ada			DISKOMINFO	
		Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan			DISKOMINFO	
			Jumlah titik pada HKS			DISKOMINFO	
INDIKATOR KUNCI URUSAN KEBUDAYAAN	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan,	Jumlah obyek PK yang diinventaris	15		DISDIKBUD	
			Jumlah obyek PK yang diamankan	12		DISDIKBUD	
			Jumlah obyek PK yang dipelihara	12		DISDIKBUD	
			Jumlah obyek PK yang diselamatkan	12		DISDIKBUD	
			Jumlah obyek PK yang dipublikasikan	12		DISDIKBUD	
			Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan	Jumlah obyek PK disebarluaskan	12		DISDIKBUD
			(penyebarluasan,	Jumlah obyek PK dikaji	0		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		pengkajian, penayaan keberagaman	Jumlah objek PK dikayakan keberagamannya	0		DISDIKBUD
		Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	12		DISDIKBUD
		Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi	0		DISDIKBUD
			Jumlah sdm disertifikasi	0		DISDIKBUD
			Jumlah lembaga distandarisasi	0		DISDIKBUD
			Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola	0		DISDIKBUD
			Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	0		DISDIKBUD
			Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan	147	
			Jumlah CB dihapuskan	18		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB diselamatkan	1		DISDIKBUD
			Jumlah CB diamankan	101		DISDIKBUD
			Jumlah CB dizonasi	0		DISDIKBUD
			Jumlah CB dipelihara	27		DISDIKBUD
			Jumlah CB dipugar	0		DISDIKBUD
		Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	0		DISDIKBUD
		Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB diteliti	0		DISDIKBUD
			Jumlah CB direvitalisasi	0		DISDIKBUD
			Jumlah CB diadaptasi	0		DISDIKBUD
		Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	0		DISDIKBUD
		Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum dikelola	0		DISDIKBUD
			Jumlah koleksi museum diamankan	0		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
			Jumlah koleksi museum dikembangkan	0		DISDIKBUD
			Jumlah koleksi museum dimanfaatkan	0		DISDIKBUD
		Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum	Jumlah pengunjung museum	0		DISDIKBUD
		Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	0		DISDIKBUD
		Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya	Jumlah tim pendaftaran CB yang dibentuk	1		DISDIKBUD
		Pembentukan tim ahli cagar budaya provinsi	Jumlah pembentukan tim ahli CB	7		DISDIKBUD
		Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	7		DISDIKBUD
		Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB	27		DISDIKBUD
			jumlah sdm Museum	0		DISDIKBUD
		Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya CB	4		DISDIKBUD

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
			Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya Museum	0			DISDIKBUD
			Jumlah sarana dan prasarana CB	0			DISDIKBUD
		Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana Museum	0			DISDIKBUD
		Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	0			DISDIKBUD
INDIKATOR KUNCI URUSAN PERPUSTAKAAN	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia diberbagai perpustakaan diwilayahnya (dalam eksamplar)	1014923	143%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
			jumlah penduduk diwilayahnya (dalam jiwa)	710.293			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat	jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	526,98	0%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
			jumlah penduduk diwilayahnya	710.293			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	ketersediaan tenaga perpustakaan diberbagai perpustakaan diwilayahnya	327	0%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
			jumlah penduduk diwilayahnya (dalam jiwa)	710293			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	jumlah perpustakaan esuai standar nasional perpustakaan	10	3%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
			jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat diwilayahnya	336		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
		Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat	13			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/ dialih media (digitalisasi)/ terdaftar yang ada di wilayahnya	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		1108			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
INDIKATOR KUNCI URUSAN KEARSIPAN	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip aktif yang dibuatkan daftar arsip	709	100%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
			jumlah seluruh arsip aktif	709			DINAS PERPUSTAKAAN

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
	pertanggungjawab an nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan -						DAN ARSIP
		Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	61	49%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
			jumlah seluruh arsip inaktif	124			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
			jumlah seluruh arsipstatis	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	10	18,52%		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
			jumlah seluruh arsip dinamis	54			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
			jumlah arsip statis pemerintah kota	0			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK				

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
	sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK	Belum dilaksanakan NSPK Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK merujuk pada peraturan kepala ANRI 23/2015 Tentang Perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
Penyelamatan arsip perangkat daerah Kabupaten/Kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecamatan/kelurahan yang sesuai NSPK di provinsi		Belum dilaksanakan NSPK Penyelamatan arsip penggabungan atau pembubaran perangkat daerah merujuk pada peraturan kepala ANRI 46/2015 tentang penyelamatan arsip Penyelamatan arsip penggabungan atau pembubaran lembaga negara atau perangkat daerah		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan kabupaten/kota yang sesuai NSPK		belum dilaksanakan NSPK Autentifikasi arsip statis Merujuk pada peraturan ANRI 20/2021 Tentang pedoman Autentifikasi arsip elektronik		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	
Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang dinyatakan		belum dilaksanakan NSPK Pencarian arsip statis merujuk pada peraturan kepala ANRI 18/2012 Tentang pedoman pembuatan dan pengumuman daftar pencarian arsip (DPA)		DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/Kota yang sesuai NSPK		belum dilaksanakan NSPK Perizinan penggunaan arsip tertutup merujuk pada peraturan kepala ANRI 28/2011 Tengan pedoman akses dan layanan arsip statis			DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)	27			DP3
		Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	jumlah TPI yang oerasional	2	100%		DP3
			jumlah seluruh TPI yang ada diwilayah kota	2			DP3
		Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	0	0%		

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
		Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/kemitraan usaha/kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan per tahun	10		DP3
		Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang diproduksi per tahu	337.833.000		DP3
INDIKATOR KUNCI URUSAN PARIWISATA	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	Jumlah entitas pengelolaan destinasi	28		DPOP
		Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	28		DPOP
		Jumlah tanda daftar usaha pariwisata persub jenis usaha di kabupaten/kota	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub	121 daftar usaha (14 sub jenis usaha)		DPOP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)	ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	17458			DPOP
		Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri yang terlaksana di dalam negeri	7			DPOP
		Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota	0			DPOP
		Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada even promosi pariwisata di dalam negeri	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri	8		DPOP
		Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi	100	1,40%	DPOP
			jumlah tenaga kerja pariwisata	7157		DPOP
		Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	148	246,67 %	DPOP
			jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan	60		DPOP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
		Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat	20			DPOP	
INDIKATOR KINERJA URUSAN PERTANIAN	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan		17			DP3	
		Prasaran pertanian yang digunakan Jumlah prasarana pertanian yang digunakan		8			DP3	
		Penerbitan izin usaha pertanian Jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian		0			DP3	
		Persentase prasarana yang digunakan	jumlah prasarana yang aktif digunakan	0	0%		DP3	
			jumlah prasarana yang dibangun	0			DP3	
		Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	jumlah usaha yang difasilitasi	0	100%		DP3	
			jumlah usulan usaha pertanian	0			DP3	
		Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana	jumlah area yang dapat ditanggulangi	0	0%		DP3
				luas area terkena bencana	0			DP3

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA	KET	SUMBER DATA
URUSAN KEHUTANAN	KEHUTANAN	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura	Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura yang disahkan	TIDAK ADA TAHURA DIKOTA BALIKPAPAN	TIDAK ADA TAHURA DIKOTA BALIKPAPAN	DLH
		Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	TIDAK ADA TAHURA DIKOTA BALIKPAPAN	TIDAK ADA TAHURA DIKOTA BALIKPAPAN	DLH
		Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	TIDAK ADA TAHURA DIKOTA BALIKPAPAN	TIDAK ADA TAHURA DIKOTA BALIKPAPAN	DLH
		Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	TIDAK ADA TAHURA DIKOTA BALIKPAPAN	TIDAK ADA TAHURA DIKOTA BALIKPAPAN	DLH
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota 1) Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	Jumlah penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota	NIHIL BUP	Tidak ada transmigrasi dikota balikpapan	BUP
PERDAGANGAN	Persentase pelaku usaha yang	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin :				DISDAG

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA	
	memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	a. Pusat perbelanjaan	jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan kurang dari 5 hari kerja	0			DISDAG	
			Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	0			DISDAG	
		b. Toko swalayan	jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan kurang dari 5 hari kerja	0			DISDAG	
			jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	0			DISDAG	
		Persentase penerbitan TDG	jumlah penerbitan TDG kurang dri 5hari kerja	0			DISDAG	
			jumlah permohonan penerbitan TDG	0			DISDAG	
		Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	jumlah penerbitan TDG	0	0%		DISDAG	
			jumlah gudang yang ada dikota	60			DISDAG	
		Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk : Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri :						DISDAG
		a. Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	jumlah SPTW untuk penerima Waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara legkap dan benar	0				DISDAG

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
			jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	0			DISDAG
		b. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	jumlah SPTW untuk penerima lanjutan Waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar	0			DISDAG
			jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	0			
		c. Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	jumlah SPTW untuk penerima lanjutan Waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit kurang dari 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar	0			DISDAG
			jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	0			
		Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya ditingkat kota	0			DISDAG

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah Kab/Kota	jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	0			DISDAG
		Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	jumlah SKA yang terbit kecil dari 1 hari kerja (1x24 jam)	3138	100%		DISDAG
			jumlah permohonan penertiban SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	3138			DISDAG
		Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$				DISDAG
			$K = \text{Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya}$	45,8			DISDAG
			$a = \text{Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5)}$	0			DISDAG
			$b = \text{sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)}$	0,46			DISDAG

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		Persentase koefisien variasi harga antar waktu	Persentase koefisien variasi harga antar waktu per komoditas bahan poko	8.11			DISDAG
	Persentase kinerja realisasi pupuk	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	22,67			DISDAG
	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang tahun berjalan	3927	123,65 %		DISDAG
jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kota			3176	DISDAG			
Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan		jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	0	0,00%		DISDAG	

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		yang berlaku	total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan	0			DISDAG
PERINDUSTRIAN	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0,00%		DKUMKMP
			jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0			DKUMKMP
	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK -	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	Capaian target tahapan penyelesaian RPIK Tahapan :	50%			DKUMKMP
			a) Tersusunnya naskah akademik (30%)	30%			DKUMKMP
			b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)	20%			DKUMKMP
			c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%	0			DKUMKMP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
			d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	0			DKUMKMP
			e) Penetapan Perda RPIK (10%)	0			DKUMKMP
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	10	67%		DKUMKMP
			jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	15			DKUMKMP
	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	jumlah realisasi izin yang diterbitkan	0	0%		DKUMKMP
			jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	0			DKUMKMP
	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan	Jumlah data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaankawasan industri di Kab Kota SIINas	96	10,53 %		DKUMKMP

URUSAN	IKK OUTCOME	INDIKATOR KINERJA KUNCI (LUARAN)		ISIAN DATA		KET	SUMBER DATA
		kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota	total poulasi perusahaan industri kecil,menengah dan perusahaaan kawaan industri di kota	912			DKUMKMP
INDIKATOR KINERJA KUNCI TRANSMIG RASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya			Nihil		BUP	BUP
	Jumlah satuan pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya			Nihil		BUP	BUP
	Jumlah satuan pemukiman yang dibina			Nihil		BUP	BUP

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Table 2.3
Indikator Kinerja Kunci Hasil

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
- Pendidikan					
1.a.1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	30.575	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 5-6 tahun pada menggunakan data kota balikpapan
		= 7.969			
		Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kab/kota yang bersangkutan			
		= 26.064			
1.a.2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	167.184	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kota yang bersangkutan
		= 136.681			
		Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kab/kota yang bersangkutan			
		= 81.755			
1.a.3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	134.915	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kota yang bersangkutan
		= 35.009			
		Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kab/kota yang bersangkutan			
		= 25.949			
1.a.4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	1.7	Dinas Pendidikan Kota Balikpapan	
		= 3.341			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kab/kota yang bersangkutan = 196.557			
Kesehatan					
1.b.1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan = 1.418 Jumlah Penduduk di kabupaten/kota = 710.293	0.2	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi = 13 Jumlah RS di kabupaten/kota = 15	86.667	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan = 10.633 Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota = 10.999	96.672	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
1.b.4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan = 10.148 Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota = 10.494	96.703	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
1.b.5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	100.63	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 10.062			
		Jumlah bayi baru lahir di kabupaten/kota			
		= 9.999			
1.b.6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	83.421	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 4.1451			
		Jumlah balita di kabupaten/kota			
		= 4.9689			
1.b.7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	29.685	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 3.1972			
		Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten/kota			
		= 107.704			
1.b.8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	39.946	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 175.414			
		Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota			
		= 439.124			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	41.514	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 24.104			
		Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten/kota			
		= 58.063			
1.b.10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	20.959	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 38.722			
		Jumlah penderita hipertensi di kabupaten/kota			
		= 184.755			
1.b.11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	56.323	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 9.633			
		Jumlah penderita DM di kabupaten/kota			
		= 17.103			
1.b.12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	73.833	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 522			
		Jumlah penderita ODGJ di kabupaten/kota			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		= 707			
1.b.13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	30.041	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 4.085			
		Jumlah penderita TBC di kabupaten/kota			
		= 13.598			
1.b.14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	79.769	Dinas Kesehatan Kota Balikpapan	
		= 13.887			
		Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten/kota			
		= 17.409			
- Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1.c.1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)	7.484	Sumber data Dinas PU	Sumber data Dinas PU
		= 508			
		Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)			
		= 6.788			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
1.c.2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (m)	3.946	Sumber data Dinas PU	
		= 458.42			
		Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (m)			
		= 11618.31			
1.c.3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha) di tahun eksisting	100	Sumber data Dinas PU	
		= 195			
		luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota			
		= 195			
1.c.4	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota.	97.98	Sumber data Dinas PU	
		= 130.742			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	kabupaten/kota	Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut. = 133.437			
1.c.5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD = 38.400 Jumlah rumah di Kabupaten A = 240.078	15.995	Sumber data Dinas PU	
1.c.6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya = 745 Jumlah IMB yang berlaku = 745	100	Sumber data Dinas PU	
1.c.7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap = 447.30 Jumlah total panjang jalan kabupaten/kota = 501.18	89.249	Sumber data Dinas PU	
1.c.8.1	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	3.356	Sumber data Dinas PU	TIDAK BISA MEMBERIKAN DATA PENDUKUNG KARENA BIDANG JASA KONTRUKSI

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		= 630			BARU TERBENTUK DITAHUN 2022. DPU HANYA MELAKSANAKAN PELATIHAN SKT DAN SMKK3 KONTRUKSI
		Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota			
		= 18.775			
1.c.8.2	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi	0	Sumber data Dinas PU	
		= 0			
		Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya			
		= 0			
- Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					
1.d.1	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	0	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	
		= 12			
		Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n			
		= 0			
1.d.2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	0	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	Tidak ada rumah tangga yang terkena relokasi (Surat Keterangan)
		= 0			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan = 0			
1.d.3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) = 0 Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha = 5.4	0	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10.ha kelurahan damai kecamatan Balikpapan Kota
1.d.4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni = 630 Jumlah total unit rumah kabupaten/kota = 240.078	0.262	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	
1.d.5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU = 33.958 Jumlah unit rumah kab/kota = 168.722	20.127	Dinas perumahan dan permukiman Kota Balikpapan	
- Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1.e.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat	Jumlah pengaduan yang ditangani = 9.203	96.296	satuan Polisi Pamong Praja Kota	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	diselesaikan	Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk = 9.557		Balikpapan	
1.e.2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkadayang memuat sanksiyang ditegakkan = 31 Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuatsanksi = 31	100	satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	
1.e.3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	25.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
1.e.4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	25.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
1.e.5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana = 921 Jumlah satu dokumen RPB lengkap dan sudah disahkan = 0	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	
		= 55			
		Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota			
		= 55			
1.e.7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	15	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan	10- 15 MENIT
- Sosial					
1.f.1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	9,46%	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		=160			
		Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis =1.691			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
1.f.2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	79,99%	Dinas Sosial Kota Balikpapan	
		=1.219			
		Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota			
		=1.524			
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar					
- Tenaga Kerja					
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	100	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
		= 28			
		Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota			
		= 28			
2.a.2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	0.153	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
		= 119			
		Jumlah tenaga kerja keseluruhan			
		= 77.953			
2.a.3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	0.111	Bapeddalitbang Kota Balikpapan	PDRB DALAM

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		= 86.797			HARGA MILIAR
		Jumlah tenaga kerja		Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
		= 77.953			
2.a.4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak = 3.669	100	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
		Jumlah Perusahaan = 3.669			
2.a.5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan = 962	25.15	Dinas Ketenagakerjaan Kota Balikpapan	
		Jumlah pencaker yang terdaftar = 3.825			
- Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
2.g.1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD = 153967056590	5.423	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
		Jumlah seluruh belanja langsung APBD = 2838907307519		BPKD Kota Balikpapan	
2.g.2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat kabupaten/kota yang didampingi = 61	0.027	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	0

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)			
		= 226.509			
2.g.3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	18.591	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
		= 64			
		Jumlah penduduk perempuan			
		= 344.250			
- Pangan					
2.h.1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan	7.898	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
		= 20.7			
		Jumlah kebutuhan pangan			
		= 262.1			
- Pertanian					
2.i.1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	100	Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
		= 2.875.102 m²			
		seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi			
		= 2.875.102 m²			
2.i.2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	14	Dinas Pertanian dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
		= 21			
		Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum			
		= 150			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
2.i.3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	67.358	DPMPTSP Kota Balikpapan	
		= 1.936.608			
		Luas izin lokasi yang diterbitkan			
		= 2.875.102			
2.i.4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha;	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	Tidak dapat di peroleh isian datanya pada tahun 2021 karena kegiatan landreform atau reformaagraria tdak dilaksanakn dikota balikpapan , perencanaan kegiatan tersebut akan mulai dilakukan pada trahun 2022
		= 0			
		Jumlah penerima tanah obyek landreform			
		= 0			
2.i.5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	131.608	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
		= 3.715.281			
		Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		= 2.822.999			
2.i.6	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	100	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan	
		= 15			
		Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan			
		= 15			
- Lingkungan Hidup					
2.j.1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota		69.66	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
2.j.2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	Jumlah Total Vol sampah yang dapat ditangani	74.846	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
		= 135.831,10			
		Jumlah seluruh Total vol timbunan sampah tahun berjalankabupaten/kota			
		= 181.479.86			
2.j.3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah Kab/Kota	100	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan	
		= 103			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan			
		= 103			
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
2.k.1.1	Perekaman KTP elektronik	Jumlah Penduduk wajib KTP-el yang telah melakukan perekaman	100	Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= 494.717			
		Jumlah penduduk wajib KTP-el			
		= 494.717			
2.k.1.2	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	56.66	Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= 122.150			
		Jumlah anak usia 0-17 tahun			
		= 215.585			
2.k.1.3	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir	101.713	Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= 230.390			
		Jumlah anak usia 0-18 tahun			
		= 226.509			
2.k.1.4	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	26.471	Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= 9			
		Jumlah PD			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		= 34			
- Pemberdayaan masyarakat dan desa					
2.1.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	0	Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan	KOTA BALIKPAPAN TIDAK MEMILIKI DESA TERTINGGAL
		= 0			
		Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)			
		= 0			
2.1.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	0	Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan	KOTA BALIKPAPAN TIDAK MEMILIKI DESA MANDIRI
		= 0			
		Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)			
		= 0			
- Pengendalian penduduk dan keluarga berencana					
2.m.1	TFR (Angka Kelahiran Total)		2.07	DATA 2020 (data yang tersedia adalah data estimasi , karena BPS melakukan survey dari tahun 2015 s.d 2045)	DATA 2020 (data yang tersedia adalah data estimasi , karena BPS melakukan survey dari tahun 2015

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
					s.d 2045)
2.m.2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	70.303	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
		= 73.018			
		Jumlah Pasangan Usia Subur			
		= 103.862			
2.m.3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	14.295	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak keluarga Bencana Kota Balikpapan	
		= 14.847			
		Jumlah Pasangan Usia Subur			
		= 103.862			
- Perhubungan					
2.n.1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio konektivitas Kabupaten atau Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	110.9	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	
		o IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kota tersebut)			
		o IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Keterangan:			
		IK1 (Angkutan Jalan)			
		- Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP			
		- Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu			
		IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan)			
		- Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintasa perintis ditambah lintasan komersil			
		- Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu			
		Bobot Angkutan Jalan atau Sungai, Danau dan Penyeberangan:			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		1. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih tinggi dibandingkan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 70, bobot angkutan jalan = 30)			
		2. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan sama dengan dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP 50, bobot angkutan jalan = 50)			
		3. Wilayah yang tingkat pelayanan angkutan laut dan penyeberangan lebih rendah dibandingkan dengan angkutan jalan (bobot angkutan SDP = 30 (bobot angkutan jalan = 70)			
		4. Wilayah yang tidak memiliki angkutan penyeberangan dan laut (bobot angkutan SDP = 0, bobot angkutan jalan = 100)			
		Bobot Trayek atau Lintas:			
		a. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi tinggi (>5x dalam seminggu), bobot = 1			
		b. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi sedang (3-4 dalam seminggu), bobot = 0.8			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		c. Bobot Trayek atau Lintas dengan frekuensi rendah (<3 dalam seminggu), Bobot = 0.5			
2.n.2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	V/C Ratio di Jalan kabupaten/kota	0.49	Dinas Perhubungan Kota Balikpapan	
- Komunikasi dan Informatika					
2.o.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo =34	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		Jumlah PD =34			
2.o.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi = 47	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		Jumlah Layanan Publik = 47		Bagian Organisasi Kota Balikpapan	
2.o.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota = 710.293	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah penduduk		Disdukcapil Kota Balikpapan	
		= 710.293			
- Koperasi, usaha kecil dan menengah					
2.p.1	Meningkatnya Koperasi yangberkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset	20.243	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		= 100			
		Jumlah seluruh koperasi			
		= 494			
2.p.2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	41.467	DKUMKMP Kota Balikpapan	
		= 19.512			
		Jumlah usaha mikro keseluruhan			
		= 47.054			
- Penanaman Modal					
2.q	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di kabupaten/kota	36.358	DPMPT Kota Balikpapan	
		= 5224343940000			
		Jumlah investasi tahun n-1 di kabupaten/kota			
		= 14369160520000			
- Kepemudaan dan Olahraga					
2.r.1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kab/kota	0.17	DPOP Kota Balikpapan	
		= 291			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 170861			
2.r.2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan di kabupaten/kota = 169498 jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten/kota = 170861	99.202	DPOP Kota Balikpapan	
2.r.3	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	35	DPOP Kota Balikpapan	
- Statistik					
2.s.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah = 34 jumlah OPD = 34	100	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
2.s.2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100		
		= 34			
		jumlah PD			
		= 34			
- Persandian					
2.t	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi	0	Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Balikpapan	
		Jumlah area penilaian			
- Kebudayaan					
2.u	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	87.755	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan	
		= 129			
		Jumlah cagar budaya yang terdata			
- Perpustakaan					
2.v.1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	71.88	Arperpus Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
2.v.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	28.79	Arperpus Kota Balikpapan	-0,08% (Rasio Ketercukupan koleksi, -0.04% (Tingkat pemanfaatan perpustakaan), -6.43% (persentase perpustakaan ber SNP) -1.53 (Persentase keterlibatan masyarakat) -6.63% (tingkat engagement anggota perpustakaan) -14.08% (rasio ketercukupan tenaga perpustakaan)
- Kearsipan					
2.w.1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	$T = (a + i + s + j)/4$	42	Arperpus Kota Balikpapan	
		T= tingkat ketersediaan arsip			
		a = persentase arsip aktif yg telah dibuatkan daftar arsip			
		i = persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip			
		s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik			
j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui					

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
		JIKN			
2.w.2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T= tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah kab/kota yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran Daerah kabupaten/kota dengan NSPK</p> <p>a = tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>I = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>	0	Arperpus Kota Balikpapan	Kegiatan belum pernah dilaksanakan
3. Urusan Pilihan					
- Kelautan dan Perikanan					
3.a	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	5039.03	Dinas Pangan, Pertanian dan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Kabupaten/Kota (sumber data: one data KKP)		Perikanan Kota Balikpapan	
- Pariwisata					
3.b.1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	5.742	DPOP Kota Balikpapan	
		= 948			
		Jumlah wisatawan tahun n-1			
		= 16510			
3.b.2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	(Jumlah wisatawan tahun n – Jumlah wisatawan tahun n-1)	34.351	DPOP Kota Balikpapan	
		= 366099			
		Jumlah wisatawan tahun n-1			
		= 1065763			
3.b.3	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	30.677	DPOP Kota Balikpapan	
		= 684828			
		Jumlah kamar yang tersedia			
		= 2232360			
3.b.4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	12.152	berdasarkan PDRB ADHB (dalam miliar rupiah) sektor Transportasi dan Pegudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	berdasarkan PDRB ADHB (dalam miliar rupiah) sektor Transportasi dan Pegudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
3.b.5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	7.054.121.820		
- Pertanian					
3.c.1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun Produktivitas pertanian per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun	17.104	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
		= 90.2			
		luas panen			
		= 529.35			
3.c.2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular Persentase kasus zoonosis kab/ kota	Jumlah kejadian penyakit/kasus tahun berjalan (t) – jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)	-16.667	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Balikpapan	
		= -8			
		Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1)			
		= 48			
- Energi dan Sumber Daya Mineral					
3.e	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/kota	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	0	Kota Balikpapan belum memiliki potensi panas bumi baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan data umum potensi	Kota Balikpapan belum memiliki potensi panas bumi baik langsung maupun tidak
		= 0			
		Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi			
		= 0			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
				panas bumi dari badan geologi pusat sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral	langsung berdasarkan data umum potensi panas bumi dari badan geologi pusat sumber daya mineral, batu bara, dan panas bumi kementerian energi dan sumber daya mineral
- Perdagangan					
3.f.1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	82.71	Dinas Perdagangan	
		= 177			
		Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota			
	= 214				
3.f.2	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi	20.403	Dinas Perdagangan	
		= 1359.43			
		RDKK			
	= 6662.9				
3.f.3	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP)	jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	80.876	Dinas Perdagangan	
		= 3176			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	bertanda tera sah yang berlaku	jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kabupaten/kota = 3927			
- Perindustrian					
3.g.1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	(Jumlah Industri kecil dan menengah tahun n- Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1) = 10 Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 = 902	1.109	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	9.3	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 44 Jumlah izin yang dikeluarkan = 912	4.825	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0	0	DKUMKMP Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN (%)	SUMBER DATA	KET
	dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dikeluarkan = 0			
3.g.5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan = 0 Jumlah izin yang dikeluarkan = 0	0	DKUMKMP Kota Balikpapan	
3.g.6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan baku dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energy - Informasi tenaga kerja	100	DKUMKMP Kota Balikpapan	

2.2.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel 2.4

Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
- Perencanaan dan Keuangan					
4.a.1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan	51.982	BPKD Kota Balikpapan	
		= 407562873585			
		Jumlah APBD			
		= 784047272365			
4.a.2	Rasio PAD	Jumlah PAD	0	BPKD Kota Balikpapan	PDRB NON MIGAS TDAK DIPUBLIKASIKAN LAGI KARENA BPS KOTA BALIKPAPAN TIDAK DAPAT MEMPUBLIKASIKAN DATA TUNGGAL (PERTAMINA)
		= 755160456.15			
		Jumlah APBD non migas			
		= 0			
4.a.3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Inspektorat Kota Balikpapan	LEVEL 3
4.a.4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	Inspektorat Kota Balikpapan	LEVEL 3
4.a.5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures	0.066	BPKD Kota Balikpapan	

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
	(dikurangi transfer expenditures)	= 1578211770.515			
		jumlah belanja APBD			
		= 2375021367975.3			
4.a.6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	10	Inspektorat Kota Balikpapan	WTP 10 TAHUN TERAKHIR
- Pengadaan					
4.b.1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n = 0 jumlah kontrak keseluruhan tahun n = 0	0	Adbang Kota Balikpapan	Tidak ada kontrak infrakstruktur dengan nilai yang perlu pemabngunaan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun 2021
4.b.2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif = 200 Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif = 3212	6.227	Adbang Kota Balikpapan	
4.b.3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan = 2051276915493 total belanja langsung = 2283785370623	89.819	Adbang Kota Balikpapan	
- Kepegawaian					

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
4.c.1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Pegawai menurut Pendidikan PT ke atas	126.557	BKPSDM Kota Balikpapan	
		= 1382			
		Jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah			
		= 1092			
4.c.2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan)	32.299	BKPSDM Kota Balikpapan	
		= 604			
		seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
		= 1870			
4.c.3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	34.437	BKPSDM Kota Balikpapan	
		= 208			
		seluruh jumlah pegawai non Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)			
		= 604			
- Manajemen Keuangan					
4.d.1	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	117.576	BPKD Kota Balikpapan	
		= 755160456297.15			
		total belanja APBD dikurangi satu			
		= 675712743600			
4.d.2	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi	163.403	BPKD Kota Balikpapan	
		= 2375021367975.3			

NO.IKK	IKK OUTCOME	RUMUS	CAPAIAN	SUMBER DATA	KET
		dibagi total PAD dalam APBD dikurangi satu = 2838907307519			
4.d.3	Manajemen Aset	1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	YA	BPKD Kota Balikpapan	
		2. Apakah ada manual untuk menyusun daftar asset tetap? (Ya/Tidak)	TIDAK		
		3. Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan? (Ya/Tidak)	YA		
		Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)	YA		
4.d.4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai realisasi SiLPA	171.994	BPKD Kota Balikpapan	
		= 556971329487.72			
		total belanja anggaran tahun sebelumnya			
		= 323831718088.05			
- Transparansi dan Partisipasi Publik					
4.e.1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	100	Diskominfo Kota Balikpapan	
		= 34			
		Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda			
4.e.2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	100	Diskominfo Kota Balikpapan	
		= 86			
		total jumlah dokumen yang telah dirinci			
		= 86			

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun dari suatu instansi pemerintah. Akuntabilitas Kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Dalam sub bab ini disajikan data capaian kinerja setiap sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021.

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan dengan menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Formulir Tabel T-E.1 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	90,01% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	75,01% ≤ 90%	Tinggi
3	65,01% ≤ 75 %	Sedang
4	50,01% ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

*Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017*

Adapun tingkat capaian kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2021 dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 serta target akhir tahun RPJMD 2021 tercantum dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6

Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN 2021 S/D TAHUN AKHIR RPJMD 2021
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,53	10,91	103,61%	10,53	103,61%
		2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,73	14,22	90,40%	15,73	90,40%
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,04	74,76	100,97%	74,04	100,97%
3	Menurunnya Jumlah Pengangguran	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,55%	8,94%	50,89%	4,55%	50,89%
		5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,92%	64,29%	99,03%	64,92%	99,03%
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,53	80,71	101,48%	79,53	101,48%
		7	Tingkat Kemiskinan (TKm)	2,30%	2,89%	79,58%	2,30%	79,58%
		8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92	89,65*	97,45%	92	97,45%
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,46	69,66	115,22%	60,46	115,22%
6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan	10	Indeks Kota Layak Huni/ <i>Livable City Index</i>	74,5	78,48	105,34%	74,5	105,34%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	2021			TARGET AKHIR RPJMD 2021	CAPAIAN 2021 S/D TAHUN AKHIR RPJMD 2021
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN		
	Ketertiban Lingkungan							
7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	79	78,73	99,66%	79	99,66%
8	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	12	Indeks Gini Ratio (GR)	0,3	0,311*	96,46%	0,3	96,46%
		13	PDRB perkapita (Rp. Juta)	Rp 126.64 (Juta)	Rp 160,10 (Juta)	126,42%	Rp 126.64 (Juta)	126,42%
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	14	PDRB Non Migas (Rp. Triliun)	Rp 38.62 (Triliun)	Rp 40,61 (Triliun)	105,15%	Rp 38.62 (Triliun)	105,15%
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	15	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00%	WTP	100,00%
		16	Indeks Persepsi Korupsi	6,9	7,18	104,06%	6,9	104,06%
		17	Survey Kepuasan Masyarakat	80,36	82,50	102,66%	80,36	102,66%
		18	Nilai Evaluasi LAKIP	BB(75)	68,99*	91,99%	BB(75)	91,99%
		19	Penilaian Kepatuhan	79	99,24	125,62%	79	125,62%
		20	Indeks Profesionalitas ASN	87	92,05	105,80%	87	105,80%

Catatan : *angka sementara/ angka belum dirilis

Sumber data : Olahan Bagian Organisasi Kota Balikpapan 2021

Dari hasil analisis terhadap 10 sasaran yang mencakup 20 indikator sasaran, dapat diketahui bahwa 18 indikator kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2021 memperoleh capaian di atas 90,01% dengan kategori Sangat Tinggi. Sedangkan 2 indikator yang terdiri dari Tingkat Kemiskinan (TKm) memperoleh capaian sebesar 79,58% dengan kategori Tinggi dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) hanya memperoleh capaian sebesar 50,89% dengan kategori Sedang.

Hasil analisis tersebut juga sama jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD karena tahun 2021 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021. Hal tersebut tentunya menjadi bahan evaluasi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk mencapai tujuan, sasaran dan target pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun kedepan.

2.3.1 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja Utama Tahun 2021

Adapun analisis capaian kinerja dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Pemerintah Kota Balikpapan pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan

Pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan keterampilan, kebiasaan dan sikap-sikap yang diharapkan dapat membuat seseorang menjadi lebih baik.

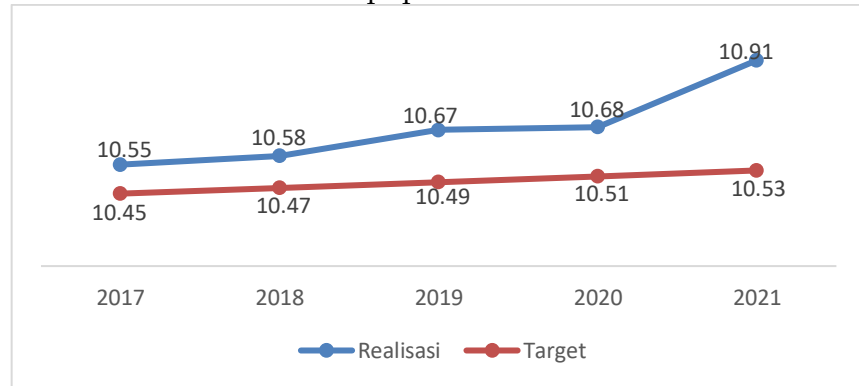
Pendidikan bisa dijadikan sebagai suatu langkah untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Untuk mengukur meningkatnya kualitas pendidikan diukur dengan menggunakan 2 indikator yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS).

RLS menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Perhitungan RLS berdasarkan penduduk yang berumur 25 tahun ke atas mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP. Sedangkan HLS mempresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk usia tertentu dimasa mendatang. HLS dihitung berdasarkan penduduk usia 7 tahun ke atas agar konsisten dengan referensi umur pada program wajib belajar yang dicanangkan oleh pemerintah.

a. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Dapat diketahui bahwa target indikator kinerja utama Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 10,53 tahun sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai realisasi sebesar 10,91 tahun dengan capaian kinerja 103,61% atau dengan kata lain melampaui target dengan predikat sangat tinggi.

Gambar 2.1
Target dan Realisasi Rata-Rata Lama Sekolah
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Capaian rata-rata lama sekolah terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2020 sebesar 10,67 tahun naik 0,23 poin pada tahun 2021 menjadi 10,91 tahun. Hal tersebut menunjukkan pertumbuhan yang positif dan mengindikasikan bahwa rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Kota Balikpapan berusia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal pada tahun 2021 berkisar antara 10 sampai dengan 11 tahun atau setara dengan kelas IX sampai kelas 2 SMA/ sederajat.

Tahun 2021 juga merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dengan target 10,53 tahun. Dengan realisasi kinerja pada tahun 2021 sebesar 10,91 tahun maka realisasi kinerja pada Tahun 2021 terhadap

target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU RLS melampaui sebesar 0,38 tahun. Berdasarkan capaian tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi target akhir RPJMD untuk IKU RLS sebesar 10,91 tahun. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU RLS sebesar 10,43 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,48 tahun sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan waktu tempuh pendidikan masyarakat Kota Balikpapan dari kelas X menjadi kelas XI.

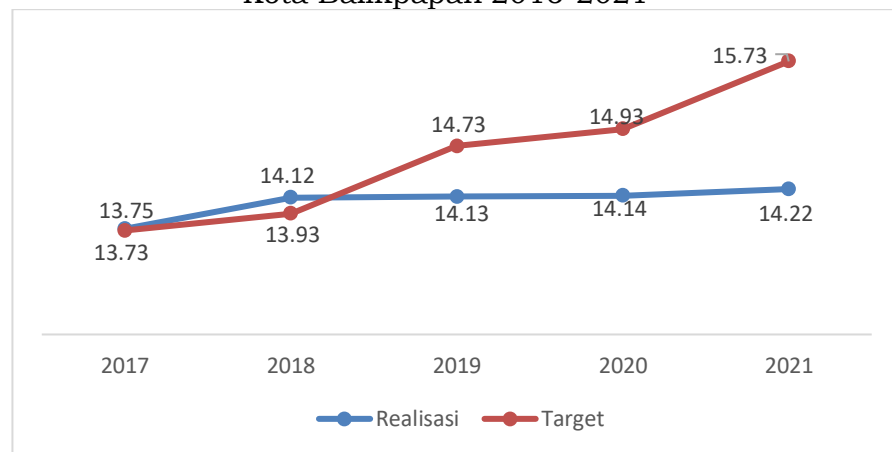
b. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)

Berdasarkan gambar di bawah ini dapat diketahui bahwa target indikator kinerja utama Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 15,73 tahun sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga tahun terakhir pelaksanaan RPJMD tahun 2016-2021 Kota Balikpapan tercapai realisasi sebesar 14,22 tahun dengan capaian kinerja 90,40 %.

Terkait realisasi kinerja pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD hampir tercapai atau pencapaian IKU HLS kurang sebesar 1,51 tahun. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU HLS sebesar

13,73 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,49 tahun sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan peluang sekolah bagi masyarakat Kota Balikpapan dari tingkat Diploma II menjadi Diploma III.

Gambar 2.2
Target dan Realisasi Angka Harapan Lama Sekolah
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Walaupun capaian kinerja tidak melampaui target yang telah ditetapkan, capaian angka harapan lama sekolah terjadi peningkatan setiap tahunnya seperti naik 0,08 poin dari tahun 2020 menjadi 14,22 pada tahun 2021. Angka ini merepresentasikan bahwa lama sekolah yang diharapkan dapat dicapai oleh penduduk Kota Balikpapan usia 7 tahun

keatas pada tahun 2021 berkisar antara 14 sampai dengan 15 tahun atau setara dengan Diploma III.

Dengan demikian, sasaran meningkatnya kualitas pendidikan Kota Balikpapan tahun 2021 yang ditunjukkan dari RLS dan HLS apabila kedua capaian tersebut digabungkan, maka tingkat capaian rata-rata menjadi 97,00% dengan predikat sangat tinggi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7

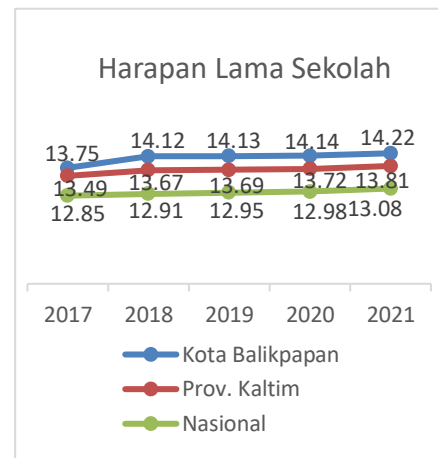
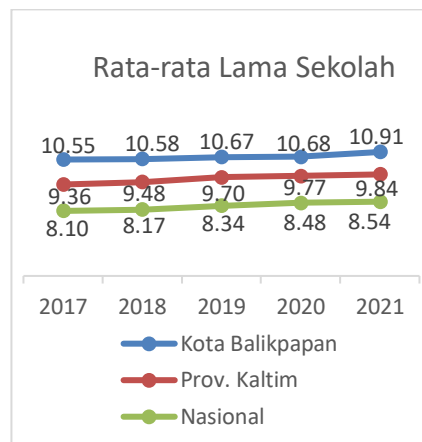
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	RLS	$RLS = \frac{1}{P_{2021}} \sum_{i=1}^{P_{2021}} (\text{Lama Sekolah Penduduk ke-}i)$	10,53	10,91	103,61 %	Sangat Tinggi
2	HLS	$HLS = \sum_{i=7}^k \frac{E_i}{P_i}$	15,73	14,22	90,40%	
Rata - Rata Capaian Kinerja					97,00%	Sangat Tinggi

Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Gambar 2.3

Perbandingan Realisasi Angka Rata-Rata Lama Sekolah dan Angka Harapan Lama Sekolah 2017-2021



Sumber data : BPS Prov. Kalimantan Timur, Sakernas

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, Rata-rata lama sekolah Kota Balikpapan dari tahun 2017-2021 senantiasa di atas angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional. Demikian pula harapan lama sekolah, realisasi harapan lama sekolah Kota Balikpapan tahun 2017-2021 senantiasa di atas Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan kualitas Pendidikan di Kota Balikpapan sudah cukup bagus dibandingkan daerah lainnya.

Berdasarkan capaian sasaran strategis tersebut, masih terdapat permasalahan dalam pencapaian target HLS pada tahun 2021. Tidak tercapainya target HLS dipengaruhi oleh faktor ketersediaan jumlah tenaga pengajar tidak berbanding terhadap jumlah siswa di Kota Balikpapan, sehingga hal

tersebut menurunkan pemerataan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan pada jenjang tertentu yaitu pendidikan tingkat dasar, dan lanjutan menengah pertama dan juga belum optimalnya sarana dan prasarana pendidikan.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta perangkat daerah terkait yaitu dengan memperluas cakupan program akses layanan pendidikan antara lain Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan sejak tahun 2017 terus melaksanakan pengembangan SDM dengan berupaya merekrut guru PNS/ Non PNS pada Jenjang SD/SMP dengan kualifikasi pendidikannya yang sesuai. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun, terjadi penambahan jumlah guru baik Jenjang SD/MI/Sederajat ataupun Jenjang SMP/MTs/Sederajat dikarenakan adanya penambahan rombel, meningkatkan sarana dan prasarana antara lain pengadaan alat/media pendidikan, meja kursi, perpustakaan, laboratorium dengan kelengkapan dan keragaman jenis peralatan, laboratorium komputer dan multimedia lab bahasa dll maupun berupa pembangunan ruang kelas baru serta melaksanakan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) dalam rangka mendukung Kebijakan Pembelajaran di masa Pandemi Covid-19.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan

Kesehatan merupakan faktor yang penting di dalam kehidupan manusia dan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam rangka menciptakan manusia yang sehat, mandiri, cerdas dan produktif serta mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Berbagai upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk telah dilakukan pemerintah, diantaranya melalui pemerataan sarana dan prasarana serta peningkatan pelayanan kesehatan secara merata, mudah dan murah serta dapat menjangkau masyarakat luas.

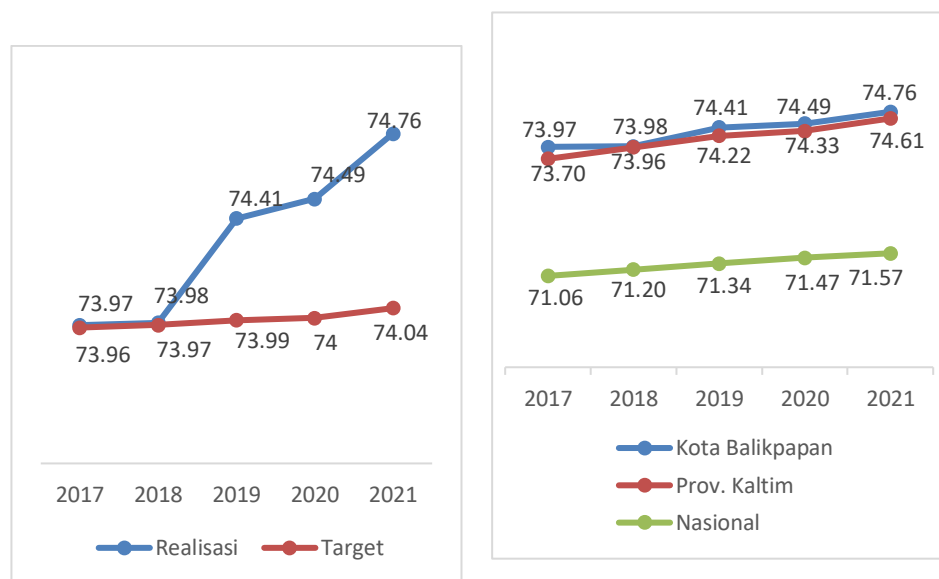
Untuk mengetahui derajat kesehatan masyarakat adalah dengan mengukur Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan salah satu indikator dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup yang dihitung sejak lahir.

Target capaian indikator kinerja utama Angka usia Harapan Hidup (AHH) sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga merupakan tahun akhir RPJMD sebesar 74,04 tahun dan tercapai realisasi sebesar 74,76 tahun dengan capaian angka

harapan hidup adalah 100,97% jauh di atas target akhir RPJMD. Terkait realisasi IKU pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU AHH lebih melampaui sebesar 0,72 tahun. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU AHH sebesar 73,95 tahun mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,81 tahun sampai dengan tahun 2021.

Gambar 2.4

Target dan Realisasi Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Angka harapan hidup (AHH) yang merepresentasikan aspek kesehatan di Kota Balikpapan juga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja AHH pada

tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,27 tahun dari capaian realisasi tahun 2020 sehingga AHH di Kota Balikpapan tahun 2021 mencapai 74,76 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bayi yang dilahirkan di Kota Balikpapan pada tahun 2021 diperkirakan akan menjalani hidupnya selama 74 sampai dengan 75 tahun.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Angka Harapan Hidup Kota Balikpapan dari tahun 2017-2021 senantiasa di atas angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional. Realisasi yang di atas target tersebut menunjukkan bahwa sasaran pembangunan untuk meningkatkan harapan hidup ini sudah tercapai dengan kategori predikat sangat tinggi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 2

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	$I_{\text{keselamatan}} = \frac{AHH - AHH_{\text{min}}}{AHH_{\text{maks}} - AHH_{\text{min}}}$	74,04	74,76	100,97%	Sangat Tinggi

Capaian IKU Angka Harapan Hidup menunjukkan keberhasilan Pemerintah Kota Balikpapan dalam meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat kota Balikpapan secara berkelanjutan pada tahun 2021, keberhasilan tersebut ditinjau dari lamanya usia penduduk kota Balikpapan terhitung sejak lahir. Terkait dengan tingkat capaian indikator sasaran tersebut maka asumsi perilaku hidup sehat masyarakat telah dilaksanakan secara baik.

Berbagai upaya telah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan perangkat daerah terkait guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan antara lain giat mensosialisasikan protocol Kesehatan dalam rangka mencegah pandemic covid-19, melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat melalui optimalisasi KIE Kesehatan, pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan melalui pembangunan puskesmas, pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan, berupaya dalam penciptaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat secara bertahap, melaksanakan koordinasi dengan BKPSDM Kota Balikpapan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan (pendukung) dengan mengusulkan kebutuhan melalui pengisian aplikasi Renbut (Rencana Kebutuhan SDMK), meningkatkan upaya

promosi kesehatan umum dan gerakan hidup bersih dan sehat melalui institusi kesehatan, sekolah, tempat ibadah, sarana prasarana serta Kegiatan KBM (Kerja Bakti Massal) secara berkala memperhatikan protocol Kesehatan dengan melibatkan masyarakat dan seluruh lintas sektor diwilayah tersebut.

Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan juga meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit baik menular maupun tidak menular seperti penggunaan kelambu air yang merupakan implementasi dari inovasi penurunan kasus DBD, pemberantasan sarang nyamuk (PSN), seluruh puskesmas (27 Puskesmas) dan 9 Rumah Sakit telah menerapkan program DOTS, melakukan penyisiran kasus TB di rumah sakit maupun klinik swasta secara berkala setiap triwulan, melibatkan peran aktif kader TB LKNU dalam pemantauan pasien TB yang sedang menjalani pengobatan, melakukan validasi data berkala dengan melibatkan LSM Pendamping Sebaya dan Layanan Pengobatan ARV (PDP), melaksanakan pembinaan regulasi sarana prasarana dan sertifikasi bidang kesehatan seperti sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga, fasilitas kesehatan, Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan, dan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT).

Beberapa elemen pendukung pelayanan telah berbasis sistem online sehingga sangat signifikan dalam menunjang pelayanan kepada masyarakat, saling bersinergi secara terpadu antara lintas sektor dan lintas program mengendalikan penyebaran pandemi virus covid-19 melalui berbagai program kegiatan yang berdasarkan pedoman/aturan/kebijakan. Selain itu, Rumah Sakit Umum Daerah Beriman Balikpapan menjadi salah satu rujukan layanan Covid-19 dengan layanan regular lainnya masih tetap dibuka dengan pengelolaan masih cukup terkendali.

3. Sasaran Strategis 3 : Menurunnya Jumlah Pengangguran

Ketenagakerjaan merupakan penggerak roda produksi perekonomian dalam proses produksi barang dan jasa. Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Peningkatan dalam jumlah angkatan kerja, bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan berbagai permasalahan dalam pembangunan.

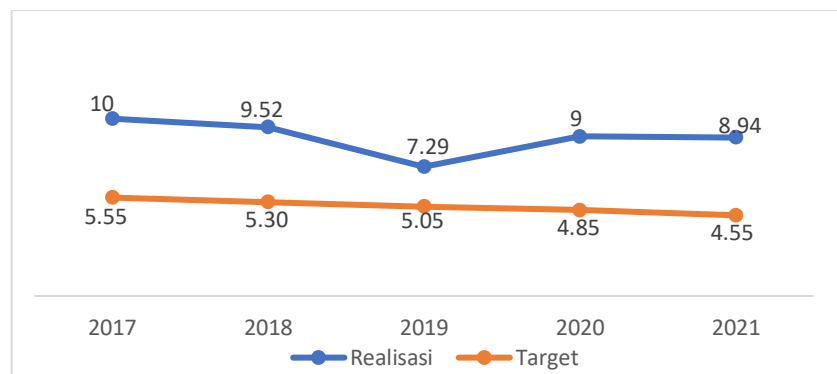
Pembangunan dibidang ketenagakerjaan merupakan upaya menyeluruh dan ditujukan pada perluasan kesempatan kerja dan menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas produktif, efisien, efektif dan berjiwa wiraswasta sehingga mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sehingga angka pengangguran dapat ditekan.

Guna mengukur jumlah pengangguran yang ada suatu wilayah dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dapat dihitung dengan membuat perbandingan antara jumlah pencari kerja yang sedang mempersiapkan usaha dengan jumlah angkatan kerja. TPT merupakan salah satu indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan pemerintah dari tahun ke tahun. Selain itu, dapat dijadikan acuan untuk program pembukaan lapangan usaha baru. Tingginya angka TPT dapat berdampak negatif pada meningkatnya potensi kerawanan sosial yang ditimbulkan seperti kriminalitas. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) untuk mengukur keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi dengan melihat

banyaknya penduduk yang masuk dalam pasar kerja (bekerja dan mencari pekerjaan). Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk usia kerja).

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Gambar 2.5
Target dan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Berdasarkan gambar di atas, Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tahun 2021 adalah 8,94% dengan capaian kinerja sebesar 50,89%. Maksudnya adalah dari 100 penduduk yang termasuk angkatan kerja sekitar 8 sampai 9 orang adalah pencari kerja (pengangguran baik belum pernah bekerja sama sekali

maupun yang sudah pernah bekerja) atau tidak bekerja atau sedang mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

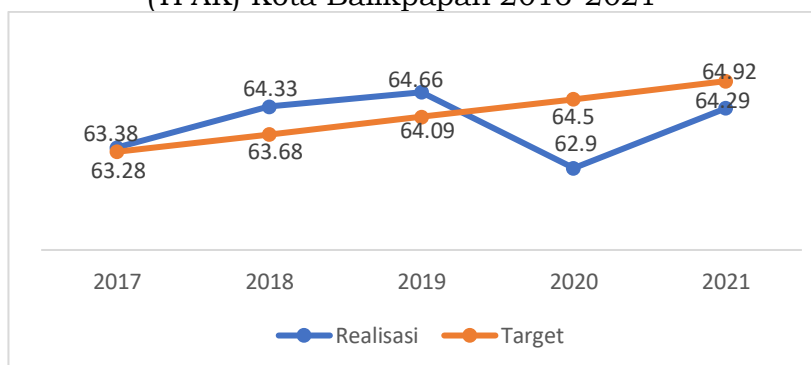
Angka Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan tahun 2021 belum mencapai target tahun 2021 maupun target akhir RPJMD sebesar 4,55%. Hal ini menunjukkan bahwa TPT di kota Balikpapan masih tinggi dilihat dari tahun 2017 hingga tahun 2021 belum ada yang melampaui target yang ditetapkan. Walaupun pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami penurunan TPT sebesar 2,71% dan tahun 2021 mengalami penurunan TPT sebesar 0,06%, terjadi lonjakan TPT pada tahun 2020 menjadi 9% dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 terhadap tenaga kerja dan lapangan pekerjaan di Kota Balikpapan. Sedangkan apabila ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TPT sebesar 5,95% mengalami penurunan kinerja sebesar 2,99% sampai dengan tahun 2021.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Target indikator kinerja utama Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 64,92% sampai dengan akhir tahun 2021 dan/atau akhir tahun RPJMD tercapai realisasi sebesar 64,29% dengan capaian kinerja 99,03% dengan predikat sangat tinggi walaupun belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TPAK sebesar 62,50% mengalami peningkatan kinerja sebesar 1,79% sampai dengan tahun 2020.

Gambar 2.6

Target dan Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Dari gambar tersebut diperoleh informasi bahwa 64,26% penduduk usia 15 tahun ke atas masuk dalam Angkatan Kerja. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan TPAK menjadi 64,29% dibanding tahun 2020 yang sebesar 62,90%, tetapi belum dapat melampaui target yaitu

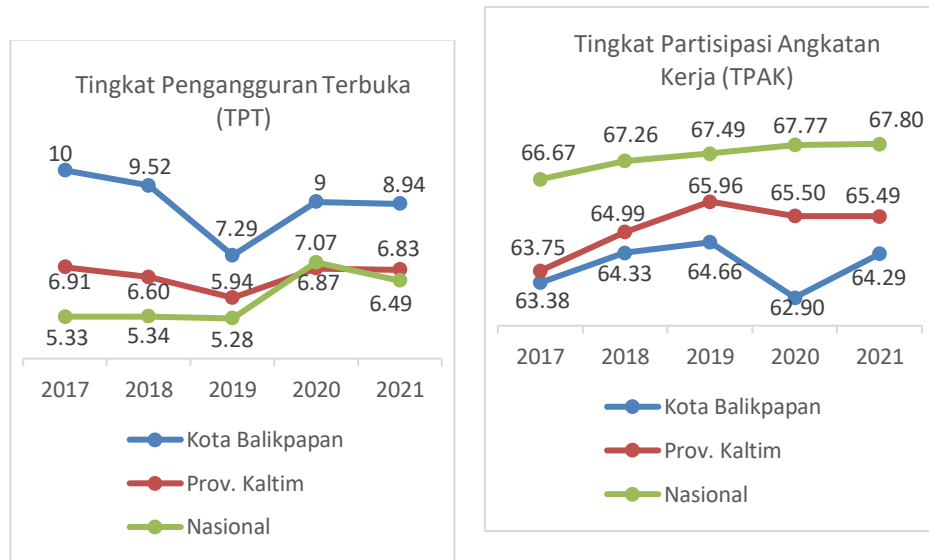
64,92%. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi lonjakan penurunan TPAK dari tahun 2019 akibat pandemi covid-19 sehingga pada tahun 2021 walaupun TPAK mengalami peningkatan kinerja belum dapat mencapai target yang diinginkan. Dalam perkembangannya, TPAK dipengaruhi oleh berbagai faktor demografi, sosial dan ekonomi. Selain itu, faktor-faktor lainnya antara lain umur, status perkawinan, tingkat pendidikan, tuntutan ekonomi dan status tempat tinggal (perkotaan dan perdesaan).

Dengan demikian, target jumlah pengangguran di Kota Balikpapan tahun 2021 yang ditunjukkan dari TPT dan TPAK apabila kedua capaian tersebut digabungkan, maka tingkat capaian rata-rata menjadi 74,96% dengan predikat sedang sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 3

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	TPT	$\text{Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)} = \frac{\text{Jumlah Pengangguran}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100\%$	4,55%	8,94%	50,89%	Rendah
2	TPAK	$\text{TPAK} = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$	64,92%	64,29%	99,03%	Sangat Tinggi
Rata - Rata Capaian Kinerja					74,96%	Sedang

Gambar 2.7
Perbandingan Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 2017-2021



Sumber data : BPS Prov. Kalimantan Timur, Sakernas

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Balikpapan dari tahun 2017-2021 masih berada di bawah realisasi angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional walaupun sudah ada peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Ketenagakerjaan serta perangkat daerah terkait dalam rangka menurunkan jumlah pengangguran antara lain menjalin kerjasama program pelatihan kerja antar pemerintah provinsi, pemerintah kota dan

dunia usaha, melakukan perluasan cakupan pelatihan kerja, melaksanakan kegiatan bursa pencari kerja (*Job Market Fair*), penempatan tenaga kerja, melakukan program pemagangan kerja serta pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja, melaksanakan kerjasama tripartite daerah untuk perlindungan tenaga kerja melalui serta melaksanakan pembinaan hubungan industrial perusahaan.

4. Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh Dan Berkelanjutan

a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Dari IPM dapat dijelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena

terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

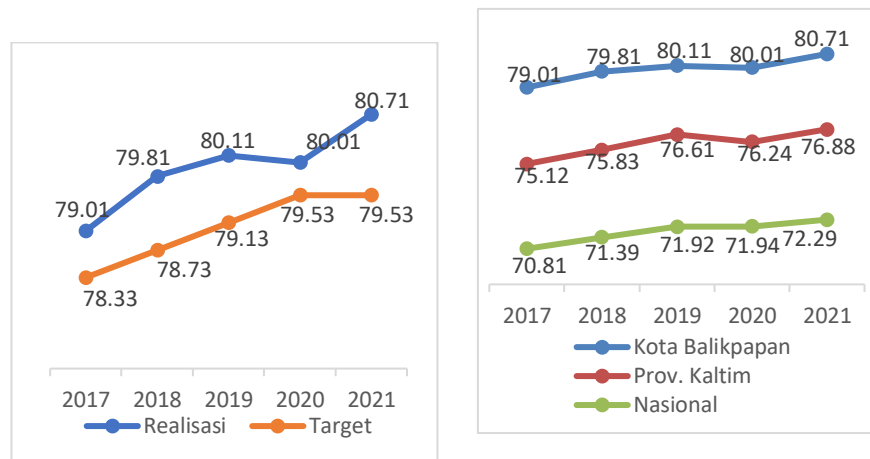
Target capaian IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga merupakan tahun akhir RPJMD sebesar 79,53 dan tercapai realisasi sebesar 80,71 dengan capaian adalah 101,48% artinya IKU Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercapai dengan predikat sangat tinggi.

IPM Kota Balikpapan mengalami peningkatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai IPM pada tahun 2021 berada di posisi 80,71, mengalami peningkatan sebesar 0.7 dari tahun 2020. Capaian IPM Kota Balikpapan ini termasuk kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Secara umum, dalam tiga tahun terakhir yaitu 2017-

2019, pembangunan manusia di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan walaupun di tahun 2020 mengalami penurunan dikarenakan pandemi covid-19.

Gambar 2.8

Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Pada gambar di atas, terlihat bahwa pada tahun 2017, capaian IPM Kota Balikpapan adalah sebesar 79,01 dan terus mengalami peningkatan menjadi sebesar 80,11 pada tahun 2019 (sangat tinggi >80). Peningkatan pencapaian IPM dari tahun 2017 sampai dengan 2019 tidak lepas dari peningkatan dari setiap komponen penyusunnya. Penurunan IPM terjadi pada tahun 2020 akibat adanya pandemi covid-19. Adapun komponen penyusun IPM yaitu dimensi kesehatan digambarkan oleh umur harapan hidup

(UHH). Dimensi pengetahuan digambarkan oleh indikator rata-rata lama sekolah (RLS) dan harapan lama sekolah (HLS). Dimensi standar hidup layak digambarkan dengan indikator pengeluaran per kapita per tahun yang disesuaikan. Pada tahun 2020 terjadi penurunan pada pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan).

Terkait realisasi IKU pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU utama Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lebih melampaui sebesar 1,18 atau 1,48%. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IPM sebesar 78,18 mengalami peningkatan kinerja sebesar 2,53 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan kinerja komponen penyusun indikator IPM.

Jika dibandingkan dengan capaian IPM Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, maka IPM Kota Balikpapan selama 5 (lima) tahun terakhir selalu berada diatas capaian IPM Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai aspek di kehidupan masyarakat. Mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, pendidikan sampai

sektor finansial terdampak. Pola kehidupan masyarakat juga berubah, sekolah dan bekerja harus dirumah, menghindari kerumunan, transaksi finansial *cashless* sampai silaturahmi pun secara daring. Menyikapi hal tersebut, berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan seperti selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat dimasa pandemi serta menerapkan protokol covid-19 dalam kehidupan masyarakat terutama untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran covid-19, menekan jumlah kematian pasien yang terpapar covid 19 serta percepatan pemberian vaksin bagi seluruh masyarakat di Kota Balikpapan. Hal ini merupakan salah satu penentu perbaikan derajat kesehatan masyarakat.

Selain itu, melakukan perbaikan perekonomian masyarakat yang menurun pendapatannya di masa pandemi covid-19 melalui upaya pengembangan skala mikro dan usaha kecil menengah merupakan alternatif untuk menaikkan pendapatan masyarakat yang masih rendah dan bermuara pada peningkatan daya beli. Dalam dimensi pengetahuan guna meningkatkan prosentase

angka melek huruf bagi penyandang buta aksara usia 15 th ke atas dan penurunan angka putus sekolah, Dinas Pendidikan telah melakukan upaya perbaikan seperti penambahan ruang kelas atau sarana prasana utilitas sekolah dan melaksanakan pemberian beasiswa bagi peserta didik keluarga miskin melalui program penanggulangan kemiskinan terpadu guna melayani siswa miskin untuk mendapatkan kesempatan akses pendidikan agar semua masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam mendapatkan layanan Pendidikan.

b. Tingkat Kemiskinan (TKm)

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Tingkat kemiskinan adalah persentase jumlah penduduk yang memiliki tingkat pengeluaran dibawah garis kemiskinan terhadap keseluruhan penduduk Kota Balikpapan. Garis kemiskinan sendiri merupakan batas

nilai rupiah pengeluaran konsumsi (makanan dan non makanan) perkapita perbulan. Untuk Tahun 2021, BPS menetapkan garis kemiskinan kota Balikpapan Rp 657.521,- perkapita perbulan. Nilai tersebut kemudian dijadikan baseline untuk menentukan persentase penduduk miskin, dimana semua individu yang memiliki tingkat konsumsi dibawah nilai tersebut digolongkan sebagai penduduk miskin.

Tabel 2.10
Angka Kemiskinan di Kota Balikpapan Tahun 2015 2021

Indikator	Satuan	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jumlah Penduduk	Orang	615.574	625.968	636.012	645.727	655.178	662.257	641.453
Garis Kemiskinan (Rp)	Rupiah/ Org/Bln	485.665	498.721	530.710	545.971	572.108	613.622	657.521
Jumlah Penduduk miskin	Jiwa	17.890	17.550	17.860	17.008	15.780	17.020	18.530
Persentase Penduduk Miskin (%)	%	2,91	2,81	2,82	2,64	2,42	2,57	2,89
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	-	0,22	0,30	0,23	0,67	0,26	0,38	0,50
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	-	0,03	0,05	0,03	0,26	0,06	0,12	0,15

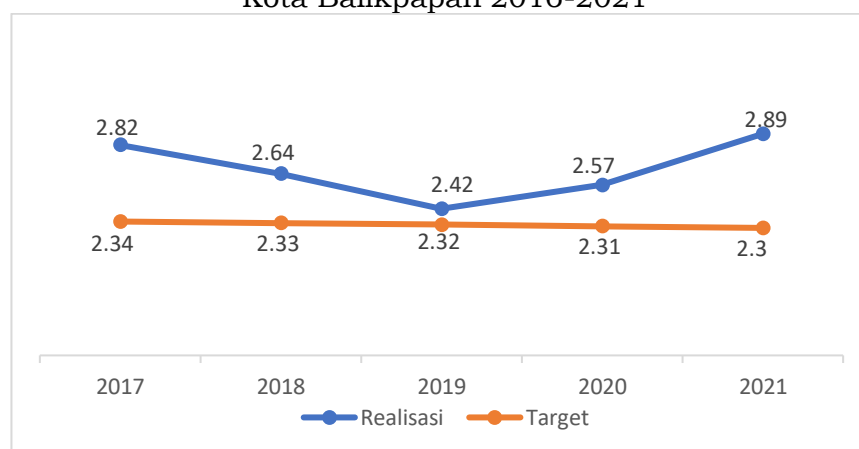
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (Diolah)

Dengan nilai garis kemiskinan Balikpapan pada tahun 2021 sebesar Rp. 657.521,-/orang/bulan dapat diartikan jika satu keluarga memiliki empat orang Anggota Rumah Tangga, keluarga tersebut harus memiliki pendapatan minimal Rp. 2.630.084 (4 orang x Rp. 657.521,-) agar dikatakan tidak miskin. Saat pendapatannya dibawah

angka tersebut artinya keempat anggota rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai penduduk miskin. Jika dilihat dari tabel di atas, garis kemiskinan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang juga dipengaruhi oleh inflasi.

Berdasarkan tolak ukur di atas dapat diketahui bahwa target capaian IKU Tingkat Kemiskinan sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga merupakan tahun akhir RPJMD sebesar 2,3% baru dapat terealisasi sebesar 2,89% dengan capaian adalah 79,58% dengan predikat tinggi.

Gambar 2.9
Target dan Realisasi Tingkat Kemiskinan (TKm)
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Pada tahun 2021, jumlah penduduk miskin di Balikpapan naik menjadi 18.530 jiwa, meningkat 1.510

orang terhadap 2020 sehingga persentase penduduk miskin Kota Balikpapan pada 2021 sebesar 2,89%, meningkat 0,32% terhadap 2020. Selain itu, Indeks Kedalaman kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Balikpapan juga mengalami peningkatan. P1 Balikpapan naik dari 0,38 di tahun 2020 menjadi 0,50 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Artinya, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, maka semakin banyak usaha yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk mengeluarkan penduduk tersebut dari jurang kemiskinan. Lalu, P2 Balikpapan naik dari 0,12 di tahun 2020 menjadi 0,15 di tahun 2021. Hal ini menunjukkan semakin tidak meratanya pengeluaran di antara penduduk miskin di Balikpapan, atau dapat dikatakan bahwa semakin tinggi ketimpangan pengeluaran yang terjadi di antara penduduk miskin di Balikpapan.

Terkait realisasi IKU Tingkat Kemiskinan (TKm) pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD belum dapat tercapai atau kurang sebesar 0,59%. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU TKm sebesar

2,35% mengalami penurunan kinerja sebesar 0,54% sampai dengan tahun 2021.

Secara umum, Tingkat Kemiskinan di Balikpapan pada tahun 2015-2021 mengalami fluktuasi baik dari sisi jumlah maupun persentase. Secara persentase, penduduk miskin Kota Balikpapan mengalami penurunan sejak tahun 2015. Namun, terjadi kenaikan persentase penduduk miskin pada dua tahun terakhir ini. Hal ini ditengarai sebagai konsekuensi dampak pandemi Covid-19. Kenaikan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2021, sedangkan penurunan persentase penduduk miskin tertinggi terjadi pada tahun 2019.

Tabel 2.11
Tingkat Kemiskinan Provinsi Kalimantan Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (000 Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%) (Po)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	Garis Kemiskinan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Paser	27,56	9,73	1,37	0,32	527.659
Kutai Barat	15,38	10,24	1,07	0,21	598.037
Kutai Kartanegara	62,36	7,99	1,22	0,37	569.640
Kutai Timur	37,78	9,81	1,64	0,44	626.492
Berau	13,62	5,88	0,95	0,20	595.550
Penajam Paser Utara	12,13	7,61	1,18	0,30	513.666
Mahakam Hulu	3,18	11,90	1,77	0,37	644.910
Kota Balikpapan	18,53	2,89	0,50	0,15	657.521
Kota Samarinda	42,84	4,99	1,07	0,32	750.055
Kota Bontang	8,41	4,62	0,47	0,08	665.572
Prov. Kalimantan Timur	241,77	6,54	1,22	0,34	689.035

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) (Diolah)

Jika ditinjau berdasarkan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, seluruh kabupaten/kota mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, kecuali Kabupaten Mahakam Hulu. Dari sepuluh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan terendah, disusul Kota Bontang (4,62 persen) dan Kota Samarinda (4,99 persen).

Selain Kota Balikpapan menduduki angka kemiskinan terkecil di Kalimantan Timur dan secara Nasional menduduki posisi ke-7 setelah Kota Sawah Lunto (2,38%), Kota Tangerang Selatan (2,57%), Kota Depok (2,58%), Kab. Badung (2,62%), Kab. Bangka Barat (2,75%), dan Kota Pekanbaru (2,83%).

Untuk kedepan, usaha menurunkan angka kemiskinan daerah ini relative lebih berat sebab kondisi perekonomian mengalami penurunan sebagai dampak pandemi Covid -19. Program pengentasan kemiskinan ke depan lebih mengarah kepada bantuan modal dan pembinaan yang mengarah meningkatkan pendapatan rumah tangga miskin, sesuai kondisi kegiatan ekonominya sehingga mampu bertahan ditengah pandemi Covid-19.

Pelaksanaan PKH di Kota Balikpapan, dilaksanakan di 6 kecamatan dengan melibatkan 24 orang pendamping. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama bagi ibu hamil dan anak, anak sekolah usia 6 s/d 21 tahun, lanjut usia diatas 60 tahun, penyandang disabilitas berat dan penderita sakit TBC. Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan, gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi tulang punggung penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial. Dengan adanya program ini, diharapkan bahwa KPM PKH mampu keluar dari kungkungan kemiskinan dan lebih sejahtera. Dinas Sosial kota Balikpapan terus berkomitmen untuk terus mendampingi para KPM PKH dalam rangka meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya. Selama masa pandemi covid - 19 pendampingan terhadap KPM PKH sebagian besar dilakukan secara on call untuk mengetahui progress

penyaluran bantuan dan kondisi KPM di lapangan. Kunjungan oleh pendamping ke KPM tetap dilakukan dengan memperhatikan kondisi penyebaran covid – 19 di daerah tersebut.

Pembinaan 40 Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga dilaksanakan oleh Dinas Sosial berupa pembinaan karakter dan pemberian motivasi untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Dinas Sosial kota Balikpapan juga melakukan pelatihan keterampilan berusaha bagi anggota KUBE untuk meningkatkan kemampuan praktis berusaha yang disesuaikan dengan minat dan keterampilan yang dimiliki, kondisi wilayah, termasuk kemungkinan pemasaran dan pengembangan bisnis usahanya. Nilai tambah dari pelatihan tersebut adalah tumbuhnya rasa percaya diri dan harga diri anggota untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan memperbaiki kondisi kehidupannya. Selama pelatihan keterampilan tersebut, mereka didampingi oleh infrastruktur kesejahteraan sosial kota seperti Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial dan Wanita Pemimpin Usaha Kesejahteraan Sosial.

Selain itu beberapa program kerja penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan perangkat daerah terkait antara lain program bantuan modal usaha ekonomi kecil dan rumah tangga, program Indonesia pintar dan program perlindungan sosial dan lainnya. Program program tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat miskin lebih tinggi dibanding dengan kenaikan garis kemiskinan di kota Balikpapan, disamping itu didukung dengan stabilitas keamanan dan meningkatnya perekonomian kota.

c. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar berperan dan berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan. Gender merupakan konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjaid akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat. Indeks Pembangunan Gender (IPG) muncul sebagai indikator dalam mengkaji perbandingan pencapaian kesetaraan pembangunan manusia yang berwawasan gender dan

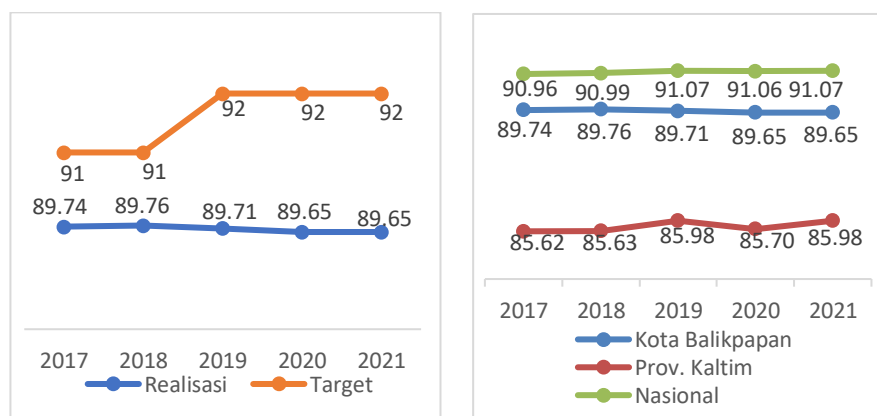
merepresentasikan pembangunan gender secara berkelanjutan.

Indikator ini digunakan untuk memonitor peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan secara lintas bidang dan lintas daerah. Indikator ini pertama kali diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1995. Data yang digunakan untuk penghitungan IPG berasal dari sumber yang sama dengan data yang digunakan untuk penghitungan IPM, namun Indeks Pembangunan Gender (IPG) lebih mengacu pada data terpisah antara laki-laki dan perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Angka 100 adalah standar untuk menginterpretasikan angka IPG, karena 100 menggambarkan rasio perbandingan yang paling sempurna. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin besar perbedaan capaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Target capaian IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG) sampai dengan akhir tahun 2021 dan merupakan tahun

terakhir RPJMD adalah 92 dan dapat terealisasi 89,65 yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 97,45% dengan predikat sangat tinggi. Realisasi IKU Indeks Pembangunan Gender (IPG) tersebut belum dapat tercapai atau kurang sebesar 2,35. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IPG sebesar 89,97 mengalami penurunan kinerja sebesar 0,02 sampai dengan tahun 2021. Sedangkan apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan dari tahun 2017-2021 senantiasa di atas angka Provinsi Kalimantan Timur, namun masih berada dibawah capaian tingkat nasional.

Gambar 2.10
Target dan Realisasi Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Kota Balikpapan pada tahun 2021 sebesar 89,65 berarti mendekati angka 100, hal ini mengindikasikan semakin kecil kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Capaian kinerja IPG pada tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami penurunan indeks sebesar 0,06 dari capaian realisasi tahun 2019 sebesar 89,71. Penurunan IPG dalam 4 tahun terakhir dapat diartikan bahwa pembangunan yang berwawasan gender mulai menunjukkan gejala tidak merata. Penurunan ini disebabkan karena IPM perempuan tumbuh lebih lambat dibandingkan IPM laki-laki.

Dari ketiga komponen pembentuk IPG, dimensi standar hidup layak mengalami perlambatan secara signifikan dibandingkan dimensi yang lain. Meskipun masih terjadi ketimpangan yang signifikan yang ditunjukkan dengan tingginya perbedaan pendapatan antara laki-laki dan perempuan, namun peluang kesetaraan pendapatan dimasa datang cukup besar. Ini ditunjukkan dengan lebih besarnya pertumbuhan pengeluaran Per Kapita perempuan dibandingkan pertumbuhan pengeluaran per Kapita laki-laki. Hal ini didukung adanya peningkatan jumlah angkatan

kerja dan pekerja perempuan yang meningkat kapabilitasnya serta berkurangnya fungsi domestik perempuan sebagai imbas perkembangan teknologi yang membuka peluang besar bagi perempuan untuk berkontribusi lebih besar dalam perekonomian.

Peningkatan jumlah angkatan kerja dan pekerja perempuan tidak serta merta dapat meningkatkan pembangunan manusia dalam perpektif gender khususnya pada dimensi standar hidup layak, terutama jika dikaitkan dengan kebutuhan kebutuhan dasar perempuan yang secara kodrati mempunyai kekhususan seperti menyusui, melahirkan, haid, hamil serta mengasuh anak yang cenderung menjadi hambatan bagi perempuan untuk berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah, utamanya dalam redistribusi peran dengan memperhatikan pembangunan yang berbasis gender.

Menyikapi kenyataan di atas, peningkatan keinginan perempuan dalam mengaktualisasikan diri perlu dimbangi dengan :

1. Serangkaian kebijakan yang lebih mendukung peningkatan keterlibatan serta kemnandirian perempuan

dalam perekonomian di satu sisi, serta di sisi lain menuntut peran serta laki-laki dalam ikut serta meningkatkan kualitas kesehatan bagi perempuan. Untuk itu itu, sangat diperlukan adanya Pokja pengarusutamaan gender pada dinas/instansi/lembaga yang terkait dengan ketenaga kerjaan, serta redistribusi peran wanita dalam berbagai dinas/instansi/lembaga yang berbasis gender;

2. Sosialisasi tentang kemandirian perempuan guna membangun kesadaran perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi tetap diperlukan dan perlu diperluas cakupannya, sehingga tidak terkonsentrasi pada kaum perempuan saja, namun menyasar hingga pada semua kalangan serta melibatkan institusi pendidikan sehingga mengarah pada pembentukan paradigma adanya kesetaraan dalam tanggung jawab dan pemanfaatan waktu antara laki-laki dan perempuan;
3. Era digitalisasi dan maraknya E-dagang (*e-Commerce*) telah memberi peluang sebesar-besarnya bagi perempuan dimana bekerja dan tetap melaksanakan tanggung jawab seperti mengasuh anak dan lain lain tetap kompatibel. Untuk itu, diperlukan adanya

sosialisasi serta peningkatan kapabilitas pemanfaatan teknologi di kalangan perempuan sehingga perempuan bisa lebih berpartisipasi di dunia kerja sambil tetap melakukan tanggung jawabnya seperti mengasuh anak, menjadikan anaknya tetap sehat, cerdas dan berkualitas, berkarakter serta berintegritas tinggi. Sehingga pada gilirannya, perempuan tetap dapat membantu meningkatkan produktivitas dan menaikkan pendapatan nasional, dan ibu melalui keluarga tetap berkontribusi dalam menciptakan generasi yang berkualitas dengan produktivitas tinggi.

Oleh karena itu pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk meningkatkan pemberian pelatihan bagi perempuan, kesempatan berusaha dan bekerja yang seluas-luasnya bagi perempuan, menurunkan tingkat diskriminasi gender, menurunkan tingkat kekerasan dalam rumah tangga, sosialisasi dan kampanye pengarusutamaan gender, meningkatkan peran koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan melalui organisasi-organisasi wanita serta tersedianya porsi perempuan sebagai kepala perangkat daerah dan sebagai

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk perempuan.

Dengan demikian, sasaran meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan pada tahun 2021 yang ditunjukkan dengan 3 (tiga) indikator meliputi Indeks Pembangunan Manusia, Tingkat Kemiskinan (TKm), Indeks Pembangunan Gender (IPG) maka tingkat capaian rata-rata menjadi 92.84% dengan predikat sangat tinggi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.12
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 4

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	IPM	$IPM = \sqrt[3]{I_{pendidikan} \times I_{kemiskinan} \times I_{keselamatan}}$ Dimensi pembentuk IPM : $I_{pendidikan} = \frac{\text{Nilai Rata-rata atas}}{\text{Rata-rata}}$ $I_{kemiskinan} = \frac{1}{1 + \text{Angka Harapan Hidup (AHH)}}$ $I_{keselamatan} = \frac{1}{1 + \text{PDRB Perkapita}}$	79.53	80.71	101.48%	Sangat Tinggi
2	TKm	$TKm = \frac{\sum \text{Penduduk Miskin}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	2.30%	2.89%	79.58%	Tinggi
3	IPG	$IPG = \frac{1}{3} (I_{kesetaraan} + I_{keselamatan} + I_{kemiskinan})$	92	89.65	97.45%	Sangat Tinggi
Rata - Rata Capaian Kinerja					92.84%	Sangat Tinggi

5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Hidup

Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep Indeks Kualitas Lingkungan dan konsep *Environmental Performance Index* (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metodologi evaluasi indikator kualitas lingkungan hidup terbagi empat yaitu hasil dari pemantau kualitas air sungai dan danau (Indeks Kualitas Air –IKA), hasil pemantauan kualitas udara (Indeks Kualitas Udara –IKU), hasil pemantauan tutupan lahan (Indeks Kualitas Lahan –IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Dapat diketahui bahwa target IKU Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga merupakan tahun akhir RPJMD sebesar 60,42 dan

tercapai realisasi sebesar 69,66 dengan capaian kinerja 115,22% jauh di atas target akhir RPJMD. Terkait realisasi IKU IKLH pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU IKLH melampaui 9,24.

Perhitungan IKLH berasal dari perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL). Secara detail Persentase Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13

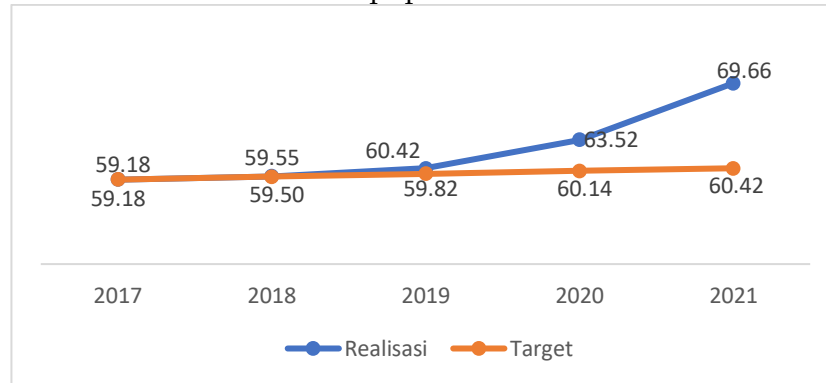
Capaian Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara dan Indeks Kualitas Lahan Kota Balikpapan

Indikator	Formula	2021		Capaian
		Target	Realisasi	
Indeks Kualitas Air (IKA)	IKLH	47.22	49.44	104.70%
Indeks Kualitas Udara (IKU)	IKLH	88.92	88.52	99.55%
Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IKLH	65.33	69.49	106.37%

Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Tahun 2021

Gambar 2.11
Target dan Realisasi Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Balikpapan 2016-2021



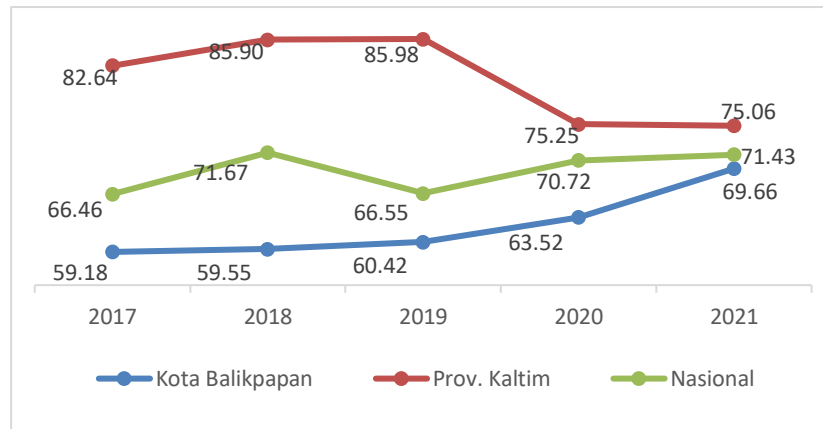
*Sumber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun
2021*

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang merepresentasikan kualitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian hasil akuntabilitas kinerja IKLH pada tahun 2021 sebesar 69,66 atau mengalami peningkatan indeks sebesar 6,14 dari capaian realisasi tahun 2020 sebesar 63,52. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IKLH sebesar 58,58 mengalami peningkatan kinerja sebesar 11,08 tahun sampai dengan tahun 2021.

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan dari tahun 2017-2021 masih berada di bawah realisasi angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat

nasional walaupun sudah ada peningkatan kinerja dari tahun sebelumnya.

Gambar 2.12
Perbandingan IKLH Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional



umber data : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun
2021

Capaian kinerja yang mencapai 115,22% menunjukkan bahwa sasaran pembangunan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup sudah tercapai dengan kategori predikat sangat tinggi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.14
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 5

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,35 \times IKLH_{Prov}) + (0,405 \times IKLH_{Nas}) + (0,245 \times IKLH_{Kota})$	60.46	69.66	115.22%	Sangat Tinggi

Faktor yang dianggap mempengaruhi hasil tersebut adalah Pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret 2020. Pandemi ini menyebabkan berkurangnya aktivitas masyarakat sehingga volume lalu lintas juga mengalami penurunan cukup besar sehingga kualitas udara meningkat. Beberapa usaha dan pariwisata juga mengalami penurunan operasional industri atau malah menutup usahanya karena terdampak pandemi. Hal ini tentu saja sangat mengurangi terhadap beban pencemaran air dan udara. Selain itu meningkatnya luasan tutupan hutan dan penambahan data RTH dan RHL juga menjadi penyebab tercapainya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Balikpapan. Beberapa upaya yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup antara lain;

1. Pemeliharaan dan pengawasan konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota Pengelolaan Kebun Raya Balikpapan termasuk Peranjian Kerja Sama dengan Universitas Airlangga Surabaya dalam Penelitian Jahe Balikpapan, Balitek KSDA Samboja dalam identifikasi tanaman serta PT. PLN UIP Kalbagtim dalam pembangunan vak buah khas Balikpapan;
2. Pengelolaan konservasi Ruang Terbuka Hijau/Hutan Kota;

3. Meningkatkan rehabilitasi hutan dan lahan;
4. Rehabilitasi ekosistem kawasan pesisir;
5. Meningkatkan ruang terbuka hijau (RTH) melalui penghijauan dan reboisasi seperti melaksanakan aksi penanaman pohon di kawasan ruang terbuka hijau serta penanaman yang telah dilakukan masyarakat dan swasta baik di sekolah maupun di masing-masing kelurahan hingga CSR Perusahaan;
6. Pemantauan kualitas udara ambien dengan metode *Passive Sampler* dengan jangka waktu pemaparan 2 (dua) minggu yang dilaksanakan minimal 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun dengan 4 titik pemantauan untuk perwakilan lokasi permukiman, perkantoran, industri dan transportasi yang mewakili masing-masing triwulan;
7. Berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas Perhubungan Kota Balikpapan untuk bersinergi mengembangkan kebijakan serta sarana dan prasarana yang mendukung program pengendalian pencemaran udara, antar lain menambah rute sepeda;
8. Pemantauan kualitas air sungai melalui kegiatan Prokasih yang dilakukan di 38 DAS/Salter dan 106 titik;

9. Studi inventarisasi sumber pencemar ke sungai – sungai Kota Balikpapan;
10. Melaksanakan kegiatan CGH (Clean Green and Healthy);
11. Pemantauan kualitas air sungai minimal 2 kali dalam setahun untuk sungai wajib pantau;
12. Pengendalian pencemaran air limbah;
13. Berkoordinasi dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Permukiman dan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang Kota Balikpapan untuk bersinergi mengembangkan kebijakan serta sarana dan prasarana yang mendukung program pengendalian pencemaran air.

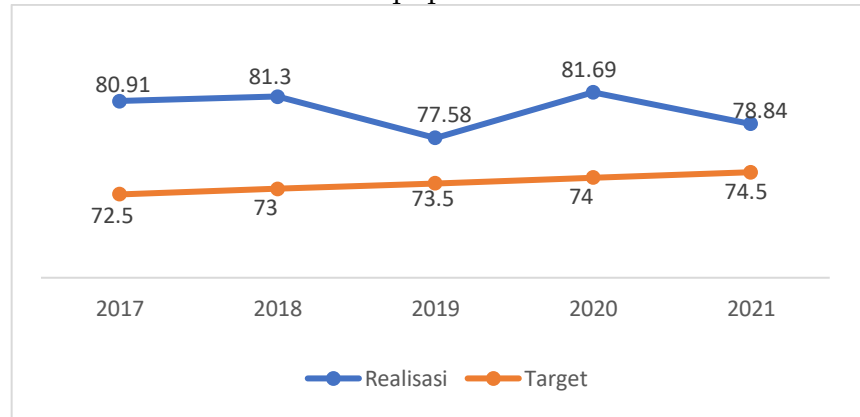
6. Sasaran Strategis 6 : Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan

Kota layak huni atau *Livable City* adalah dimana masyarakatnya dapat hidup dengan nyaman dan tenang dalam suatu kota. Menurut Hahlweg (1997), kota yang layak huni adalah kota yang dapat menampung seluruh kegiatan masyarakat kota dan aman bagi seluruh masyarakat. Konsep *livable city* digunakan untuk mewujudkan bahwa gagasan pembangunan sebagai peningkatan dalam kualitas hidup membutuhkan fisik maupun habitat sosial untuk realisasinya.

Indeks ini didasarkan atas persepsi warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayak hunian kota tempat tinggalnya. Indeks ini nantinya dapat bermanfaat bagi stakeholders dalam proses perencanaan dan pembangunan kota. Metode pengukuran kualitatif atas penilaian *Livable City Index* (LCI) oleh Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP) yang menilai tingkat kenyamanan hidup kota-kota di Indonesia.

Berdasarkan gambar di bawah diketahui bahwa target *Livable City Index* pada tahun 2021 sebesar 74,5 dan terealisasi sebesar 78,84 dengan capaian kinerja 105,34% atau dengan kata lain melampaui target sebesar 5,34% dari target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU LCI sebesar 71,12 mengalami peningkatan kinerja sebesar 7,72 sampai dengan tahun 2021. Capaian kinerja tersebut menunjukkan adanya kepuasan dari responden yang disurvei berkaitan atas layanan atas air bersih, pendidikan, tempat ibadah, fasilitas kesehatan, penataan PKL, transportasi, dan ketersediaan pangan.

Gambar 2.13
Target dan Realisasi *Livable City Index*
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Namun jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,85 dari capaian realisasi tahun 2020 sebesar 81,69. Hal ini disebabkan karena masih adanya pandemi covid-19 yang memberikan dampak diberbagai sektor. Selain itu, metodologi survey dan konteks situasi dimana survey dilaksanakan juga mempegaruhi penurunan *Livable City Index*. Metodologi survey yang dilakukan pada tahun 2021 memiliki perbedaan dibandingkan pada tahun 2020. Pemilihan responden untuk survey pada tahun 2021 didasarkan pada sampling tempat tinggal responden yang dilakukan secara random menggunakan perangkat sistem informasi geografis (QGIS) yang profil demografis respondennya baik dari segi usia, jenis kelamin hingga pekerjaan diarahkan

agar menyerupai dengan komposisi demografis populasi Kota Balikpapan. Lebih jauh, perhitungan skor indeks pada tahun 2021 juga menggunakan pembobotan yang didasarkan pada survey AHP yang dilakukan kepada sejumlah perwakilan instansi pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan swasta yang tinggal di Balikpapan.

Capaian kinerja yang mencapai 105.34% menunjukkan bahwa sasaran pembangunan untuk meningkatkan kenyamanan, keamanan dan ketertiban lingkungan sudah tercapai dengan kategori predikat sangat tinggi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.15
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 6

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kota Layak Huni/ <i>Livable City Index</i>	Metode pengukuran kualitatif atas penilaian <i>Liveable City Index (LCI)</i> oleh Badan Ahli Perencanaan Indonesia (BAP), yang menilai tingkat kenyamanan hidup kota-kota di Indonesia.	74.5	78.48	105.34%	Sangat Tinggi

Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kondisi lingkungan dan suasana kota

yang nyaman sebagai tempat tinggal dan sebagai tempat untuk beraktivitas yang dilihat dari berbagai aspek baik aspek fisik dan aspek non-fisik baik untuk masyarakat Kota Balikpapan. Upaya dan tindaklanjut pemerintah Kota Balikpapan terhadap penurunan capaian realisasi IKU *Livable City Index* pada tahun 2021 adalah melakukan peningkatan layanan peningkatan ekonomi masyarakat, layanan fasilitas kesehatan, layanan kebersihan kota, layanan ketersediaan akses jalan dan alat transportasi kota, dan layanan tata kelola kota.

7. Sasaran Strategis 7 : Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal

Untuk mengetahui tingkat kepuasan warga terhadap pelayanan infrastruktur dasar di kota Balikpapan dilaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar. Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Pengukuran Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar memberikan informasi perspektif masyarakat secara obyektif, komprehensif dan kredibel, baik dalam aspek pembangunan fisik maupun aspek manfaat. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat atas

pembangunan infrastruktur oleh pemerintah hasil pengukuran diasumsikan bahwa tingginya indeks kepuasan layanan infrastruktur dasar mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur di Kota Balikpapan. Terdapat 6 unsur utama untuk mengukur Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar, yaitu :

1. Ketersediaan Fisik (availability);
2. Kualitas Fisik (quality);
3. Kesesuaian (Appropriateness);
4. Efektifitas Pemanfaatan (Utility);
5. Penyerapan Tenaga Kerja (Job Creation);
6. Kontribusi pada Perekonomian.

Dari gambar di bawah dapat di ketahui bahwa realisasi IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga merupakan tahun akhir RPJMD sebesar 78,73 dengan capaian 99,66% dengan predikat sangat tinggi namun belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2021 yaitu sebesar 79. Hasil survey IKLI pada tahun 2021 diukur dari pendapat warga kota tentang Kepuasan Layanan Infrastruktur dari berbagai aspek seperti infrastruktur jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan. Adapun capaian Indeks

Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar sebagaimana tabel berikut ini:

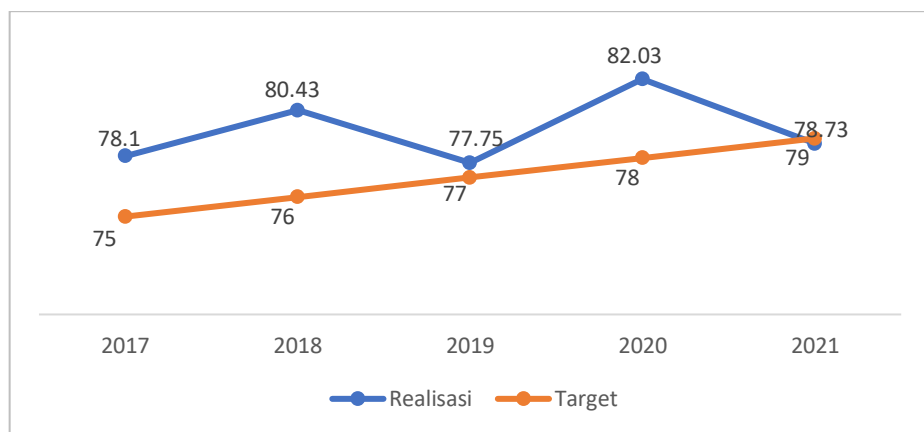
Tabel 2.16
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 7

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Hasil pengukuran diasumsikan bahwa tingginya indeks kepuasan layanan infrastruktur mencerminkan tingginya kualitas output dan outcome dari pembangunan infrastruktur di Kalimantan Timur (skala 1-10)	79	78.73	99.66 %	Sangat Tinggi

Realisasi IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar selama 5 (lima) tahun terakhir mengalami penurunan dan kenaikan indeks. Apabila dibandingkan dengan realisasi target 2020 sebesar 82,03, realisasi pada tahun 2021 mengalami penurunan indeks sebesar 3,57. Namun capaian tahun 2021 masih lebih tinggi dari capaian tahun 2019 begitu pula tahun 2017 dan 2018. Sedangkan jika ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar sebesar 73,40 telah mengalami

peningkatan kinerja sebesar 5,33 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur dasar di Kota Balikpapan.

Gambar 2.14
Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Penurunan Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar disebabkan oleh metodologi survey dan konteks situasi dimana survey dilaksanakan. Metodologi survey yang dilakukan pada tahun 2021 memiliki perbedaan dibandingkan pada tahun 2020 dimana pemilihan responden untuk survey pada tahun 2021 didasarkan pada sampling tempat tinggal responden yang

dilakukan secara random menggunakan perangkat sistem informasi geografis (QGIS). Selain itu, profil demografis (usia, jenis kelamin, pekerjaan) dari responden juga diarahkan agar menyerupai (meskipun tidak persis sama) dengan komposisi demografis populasi Kota Balikpapan. Lebih jauh, perhitungan skor indeks pada tahun 2021 juga menggunakan pembobotan yang didasarkan pada survey AHP yang dilakukan kepada sejumlah perwakilan instansi pemerintah daerah, pemerintah pusat, perguruan tinggi, dan swasta yang tinggal di Balikpapan. Konteks situasi pandemi di tahun 2021 juga berpotensi memengaruhi kepuasan dari penduduk sehingga lebih rendah dibandingkan tahun 2020.

Upaya dan tindaklanjut Pemerintah Kota Balikpapan terhadap capaian realisasi IKU Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar pada tahun 2021 adalah meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan sektor infrastruktur melalui pembangunan jalan serta memperluas pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Pembangunan jalan yang dimaksud yaitu pembangunan jalan dengan total panjang 1808,9 meter pada 4 lokasi yaitu Jalan RT.62 Kel. Karang Rejo, Jalan Kawasan Poros Industri Kariangau (Lanjutan), Jalan

Mukmin Faisal (Sepinggan Baru Soekarno Hatta Km 8) dan Jalan LKI RT. 50 Sepinggan. Selain itu terdapat 179 lokasi peningkatan jalan, 223 lokasi jalan yang direkonstruksi/direhabilitasi dan 35 lokasi jalan yang dipelihara. Untuk kegiatan memperluas pemenuhan kebutuhan air bersih yang telah dilaksanakan antara lain pengembangan jaringan pipa jaringan distribusi air bersih dan sambungan rumah di Kecamatan Balikpapan Timur sepanjang 11.017 m dan pembangunan pipa jaringan distribusi air bersih SPAM Teritip sepanjang 5.309,90 m.

Pemerintah Kota Balikpapan juga telah mempunyai 9 (Sembilan) Rusunawa yang tersebar di Kota Balikpapan dengan daya tampung rata-rata 96 kamar per rusunawa. Melalui Dinas Perumahan dan Permukiman, Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan Program Sejuta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah baru/khusus dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD serta program rumah umum oleh pengembang yang difasilitasi atau disubsidi lewat APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka.

Pengelolaan dan penyediaan transportasi serta layanan keamanan dan kenyamanan pengguna transportasi juga menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur dasar yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan seperti penerapan secara kontinu Perwali 60 Tahun 2016 tentang jam operasional angkutan alat berat yang ditetapkan akhir tahun 2016, melaksanakan sosialisasi keselamatan angkutan orang dan angkutan barang, pelaksanaan penertiban/operasi pemeriksaan (razia), pengujian laik jalan kendaraan angkutan umum dan barang, penanganan pelanggaran overloading, pemenuhan perlengkapan jalan dan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas di persimpangan dan black spot, menyusun Raperda Transportasi serta penyusunan Masterplan Transportasi serta pelaksanaan kolaborasi dengan stakeholder perhubungan. Di samping itu, mengembangkan inovasi teknologi informasi untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna jasa, melaksanakan penganggaran kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan melalui APBD Provinsi, APBN dan CSR pihak ketiga juga merupakan upaya untuk meningkatkan kepuasan masyarakat atas layanan infrastruktur yang diberikan Pemerintah Kota Balikpapan.

8. Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

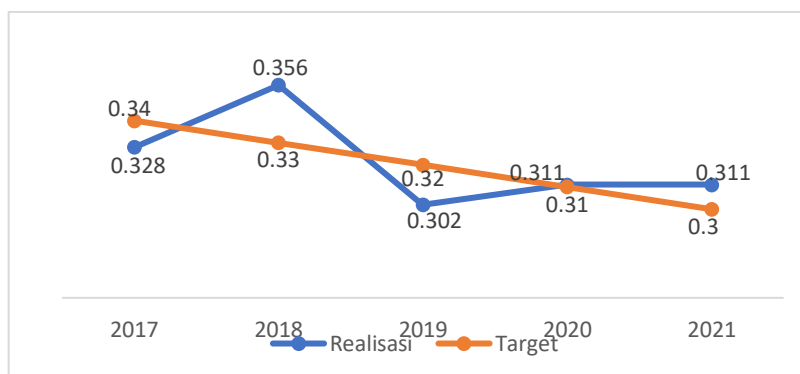
a. Indeks Gini Ratio (GR)

Untuk mengetahui pemerataan pendapatan berdasarkan kelas pendapatan di Kota Balikpapan secara menyeluruh dapat menggunakan indikator Indeks Ketimpangan Pendapatan atau yang dikenal dengan Indeks Gini Ratio. Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Koefisien Gini dapat diperoleh dengan menghitung rasio bidang yang terletak antara garis diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas separuh bidang di mana kurva Lorenz itu berada.

Target capaian IKU Indeks Gini Ratio (GR) sampai dengan akhir tahun 2021 adalah 0,3 dan dapat terealisasi 0,311 yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 96.46% predikat sangat tinggi. Terkait realisasi IKU Indeks Gini Ratio pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD belum dapat tercapai atau kurang sebesar 3,54%. Hal ini disebabkan

karena penambahan penduduk miskin yang terdampak oleh pandemi Covid -19. Sedangkan ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Indeks Gini Ratio (GR) sebesar 0,34 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,029 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk menurunkan ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Balikpapan.

Gambar 2.15
Target dan Realisasi Indeks Gini Ratio (GR)
Kota Balikpapan 2016-2021

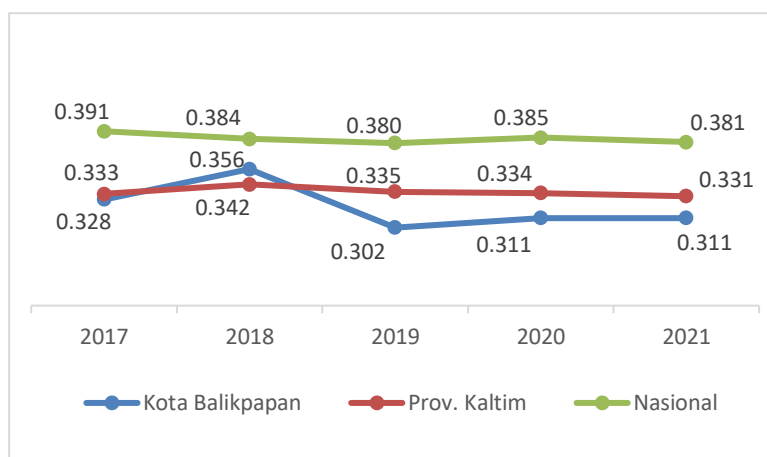


Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Capaian IKU Indeks Gini Ratio (GR) di Kota Balikpapan pada tahun 2021 sama dengan capaian realisasi tahun 2020 sebesar 0,311. Hal menunjukkan bahwa Indeks Gini pada Kota Balikpapan bertaraf rendah, artinya pertumbuhan ekonomi telah diikuti dengan pemerataan

pendapatan. Hal ini didasarkan atas capaian hasil akuntabilitas indikator terhadap kinerja dimana Nilai Gini Ratio berkisar antara $0 < 0,32 \leq 1$, Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Terkait dengan nilai capaian 0,311 tersebut menunjukkan ketimpangan pada taraf rendah.

Gambar 2.16
Perbandingan Indeks Gini Ratio (GR) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Apabila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional, Indeks Gini Ratio (GR) Kota Balikpapan dari tahun 2017-2021 masih berada di bawah realisasi angka Provinsi Kalimantan Timur, bahkan tingkat nasional yang artinya Indeks Gini Ratio (GR) Kota Balikpapan menunjukkan pemerataan pendapatan

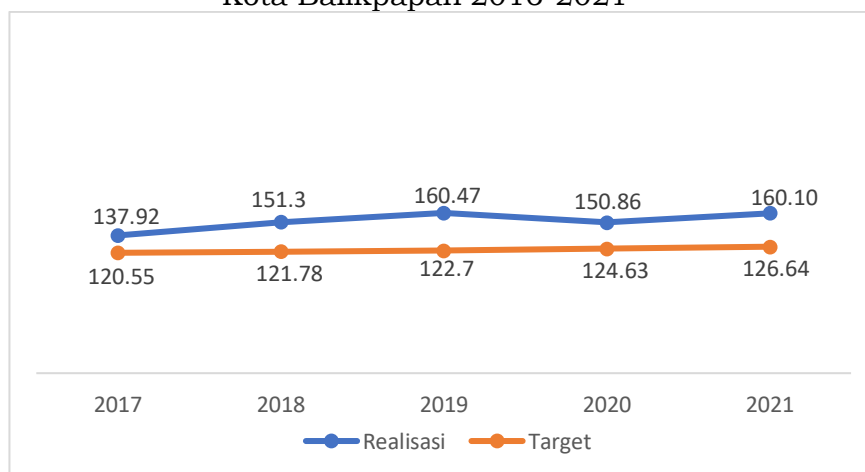
masyarakat di Kota Balikpapan lebih merata dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional.

b. PDRB perkapita (Rp. Juta)

Dalam rangka meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat juga dapat diketahui dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita yang menunjukkan nilai tambah produksi per kapita penduduk Kota Balikpapan. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan alat (*tool*) ukur kinerja pertumbuhan ekonomi lebih kepada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitative change*) yang dihasilkan dari suatu perekonomian selama kurun waktu tertentu dan biasanya satu tahun bila pendapatan regional yang dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu maka akan dihasilkan suatu pendapatan perkapita. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Data yang tersaji dalam bentuk ini merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur.

Berdasarkan gambar di bawah diketahui bahwa target PDRB perkapita (Rp. Juta) pada tahun 2021 sebesar Rp 126,64 Juta dan terealisasi sejumlah Rp 160,10 Juta dengan capaian kinerja 111,44% atau dengan kata lain melampaui target sejumlah Rp 33,46 Juta dari target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU PDRB perkapita sejumlah Rp. 120,32 Juta mengalami peningkatan kinerja sejumlah Rp 39,78 Juta sampai dengan tahun 2021.

Gambar 2.17
Target dan Realisasi PDRB perkapita (Rp. Juta)
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2020 sejumlah Rp. 150,86 Juta, maka tahun 2021 mengalami peningkatan sejumlah Rp. 9,24Juta. Meningkatnya Produk Domestik Regional Bruto Perkapita pada tahun 2021,

dipengaruhi adanya sejumlah kegiatan yang berskala nasional seperti pembangunan perluasan kilang minyak dan akses IKN, dan kegiatan-kegiatan, dan event berskala nasional dalam rangka pemindahan Ibu Kota Negara di Kalimantan Timur.

Dengan demikian, sasaran meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat tahun 2021 yang ditunjukkan dari Indeks Gini Ratio (GR) dan PDRB Perkapita apabila kedua capaian tersebut digabungkan, maka tingkat capaian rata-rata menjadi 111,44% dengan predikat sangat tinggi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.17

Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 8

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Indeks Gini Ratio (GR)	$GR = 1 - \frac{\sum(Y_i \cdot Y_i)}{\sum(Y_i) \cdot \sum(Y_i)}$	0.3	0.311	96.46%	Sangat Tinggi
2	PDRB perkapita (Rp. Juta)	$PDRB \text{ Perkapita} = \frac{PDRB}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	126.64	160.10	126.42%	Sangat Tinggi
Rata - Rata Capaian Kinerja					111.44%	Sangat Tinggi

Kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah antara lain melakukan perluasan cakupan pelatihan kerja, melaksanakan kegiatan bursa pencari kerja (*Job Market Fair*), penempatan tenaga kerja, melakukan program pemagangan kerja serta pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja. Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja telah menetapkan Upah Minimum Kota (UMK) berdasarkan perhitungan angka pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan meliputi variabel paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja dan median upah, melaksanakan kerjasama tripartite daerah untuk perlindungan tenaga kerja melalui serta melaksanakan pembinaan hubungan industrial perusahaan.

Dalam rangka menumbuhkan usaha sentra industri mikro, kecil dan menengah dilaksanakan sosialisasi Gerakan “Beli Produk UMKM” untuk mempertahankan eksistensi UMKM Kota Balikpapan di tengah pandemic termasuk di media sosial official DKUMKMP, mempromosikan daftar berbagai varian produk dan jasa UMKM Kota Balikpapan beserta akun medsos (instagram) dengan harapan masyarakat dapat mengakses

untuk melakukan pemesanan/pembelian, melaksanakan sosialisasikan informasi kursus-kursus online, tips-tips, dan webinar yang difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun provinsi, Bank Indonesia, UMKM Care Center, OJK maupun lembaga lainnya yang dapat di akses oleh IKM secara gratis dalam rangka meningkatkan produktivitas IKM di era pandemic serta sosialisasi program pelatihan e-learning bagi koperasi dan UMKM Kota Balikpapan melalui “edukukm.id” (pelatihan berbasis online) yang diinisiasi oleh Kemenkop dan UKM RI.

Selain itu dalam rangka memberikan akses permodalan bagi pelaku UMKM, DKUMKMP juga berperan aktif melalui UMKM Care Center sebagai wadah fasilitasi UMKM dengan lembaga keuangan terutama yang terdampak Covid-19 dalam hal kendala permodalan sekaligus partner dan advisor UMKM dalam menjaga daya saing usaha, DKUMKMP juga menyelenggarakan Temu Kemitraan bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, yang mempertemukan Pelaku Usaha Mikro dan rumah tangga dengan Pelaku Usaha Menengah dan Perusahaan Besar serta lembaga lain yang berhubungan dengan Dunia Usaha. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan omzet UMKM yang ada di Kota Balikpapan.

Meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa melalui pembinaan pelaku usaha, perbaikan sarana dan prasarana perdagangan serta pengendalian pertumbuhan penduduk melalui peningkatan kesertaan PUS ber-KB dan meningkatkan pendidikan sumber daya manusia baik formal maupun informal merupakan upaya lain yang dilaksanakan guna meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat.


9. Sasaran Strategis 9 : Mendorong Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan

Dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat ditunjukkan dengan indikator PDRB Non Migas (Rp. Triliun). PDRB Non Migas menunjukkan nilai tambah produksi baik barang maupun jasa di Kota Balikpapan yang dihasilkan dari seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah tanpa memperhitungkan sektor migas. PDRB Non Migas dapat dihitung dengan membandingkan PDRB tanpa migas dengan jumlah penduduk yang tinggal di suatu wilayah.

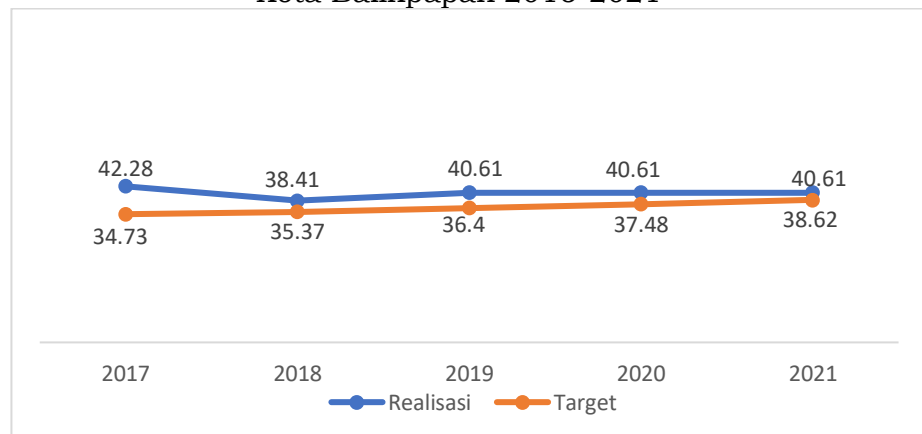
Dari gambar di bawah dapat diketahui bahwa realisasi IKU PDRB Non Migas sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga merupakan tahun akhir RPJMD sejumlah 40,61 Triliun dengan capaian 105,15%. Terkait realisasi IKU Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU

PDRB Non Migas melampaui sejumlah Rp. 1,99 Triliun Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian PDRB Non Migas sejumlah Rp. 33,39 Triliun mengalami peningkatan kinerja sejumlah Rp. 7,22 Triliun sampai dengan tahun 2021. Adapun capaian PDRB Non Migas Tahun 2021 dengan capaian 105,15% dengan mendapat predikat sangat tinggi sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.18
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 9

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	PDRB Non Migas (Rp. Triliun)		38.62	40.61	105.15%	Sangat Tinggi

Gambar 2.18
Target dan Realisasi PDRB Non Migas (Rp. Triliun)
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPS Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

PDRB Non Migas ang merepresentasikan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di Kota Balikpapan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja PDRB Non Migas pada tahun 2021 merupakan data 2019 sebagai pembandingan dikarenakan BPS secara nasional tidak menghitung lagi untuk PDRB Non Migas. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan yang bersumber dari non migas.

Upaya dan tindak lanjut Pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto Non Migas antara lain mempercepat pengembangan kawasan industri kariangau, melakukan promosi untuk menarik investor menanamkan modalnya di Kota Balikpapan, meningkatkan pengelolaan sektor perdagangan dan jasa melalui pembinaan pelaku usaha, perbaikan sarana dan prasarana perdagangan serta sektor ekonomi lainnya guna memberikan sumber pendapatan serta meningkatkan kinerja pada sektor pertanian dan kelautan untuk memberikan hasil produksi yang dapat dipasarkan baik pada pasar lokal maupun pasar diluar daerah Kota Balikpapan.

Selain itu, melaksanakan pemberdayaan bagi UMKM untuk memberikan dukungannya dalam pembangunan industri kecil dan menengah melalui Gerakan “Beli Produk UMKM” untuk mempertahankan eksistensi UMKM Kota Balikpapan di tengah pandemi, mendorong pelaku usaha/UMKM untuk melakukan diversifikasi usaha dengan memproduksi starter kit yang dibutuhkan masyarakat dalam rangka memasuki tatanan kenormalan baru (*new normal*) seperti masker dan sanitizer, mempromosikan daftar berbagai varian produk dan jasa UMKM Kota Balikpapan beserta akun medsos (instagram) dengan harapan masyarakat dapat mengakses untuk melakukan pemesanan/pembelian, melaksanakan sosialisasikan informasi kursus-kursus online, tips-tips, dan webinar yang difasilitasi oleh pemerintah pusat maupun provinsi, dalam rangka meningkatkan produktivitas IKM di era pandemi serta mengikuti berbagai pameran seperti Pameran HARKOPNAS EXPO 2021 dengan dapat menampilkan produk-produk unggulan yang dihasilkan oleh UMKM Kota Balikpapan, sehingga dapat lebih dikenal luas oleh masyarakat luar Balikpapan dan terjadinya kontak bisnis antara UMKM Kota Balikpapan dengan pihak lain yang potensial dari luar daerah dengan tujuan untuk mempertemukan secara langsung buyer

dan konsumen potensial dalam sarana promosi yang efektif dan diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran dan mendorong peningkatan mutu produk UMKM Kota Balikpapan.

Pada sektor pariwisata dilaksanakan berbagai inovasi kegiatan melalui virtual event untuk mengembalikan minat wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata, sosialisasi media sosial tentang penanganan protocol kesehatan yang dilakukan oleh pengelola objek wisata dan pelaku usaha jasa pariwisata dalam mengantisipasi penyebaran virus covid-19 seperti melakukan sertifikasi CHSE dan menerapkan protokol kesehatan dengan tujuan mengembalikan kepercayaan wisatawan untuk melakukan kegiatan wisata serta bekerjasama dengan stakeholder pariwisata dalam melakukan paket promo untuk mendorong minat wisatawan khususnya untuk wisata *staycation*.

10. Sasaran Strategis 10 : Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

a. Opini Laporan Keuangan

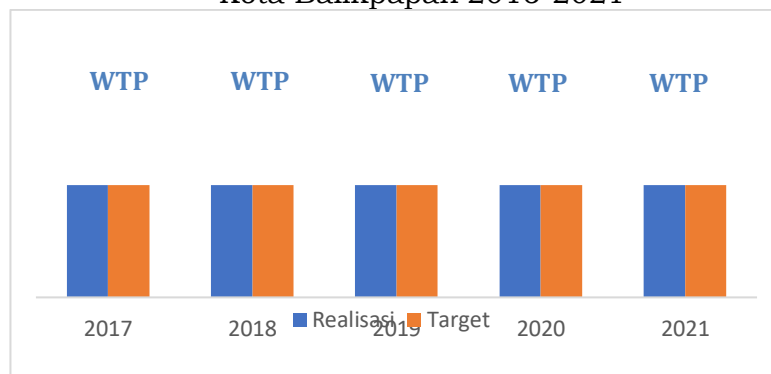
Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan,

kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan efektivitas system pengendalian intern. Penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Opini BPK tersebut terdiri atas Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TD) dan Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Berdasarkan hasil audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2020, oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur, hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2020 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat ini merupakan kedelapan

kalinya Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan predikat WTP atas laporan keuangan yang disusun. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Balikpapan dinilai oleh BPK telah akuntabel, wajar, dan transparan. Namun demikian perlu ditingkatkan lagi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat atas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan. Pencapaian Target pada tahun 2021 ini merupakan tahun kelima dari RPJMD Tahun 2016-2021:

Gambar 2.19
Target dan Realisasi Opini Laporan Keuangan Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPKAD Kota Balikpapan Tahun 2021

Pencapaian opini WTP tersebut tidak lepas dari hasil kerjasama semua stakeholder dalam penyusunan laporan keuangan di tingkat unit kerja, Perangkat Daerah hingga proses konsolidasi di tingkat Kota Balikpapan oleh BPKAD Kota Balikpapan, komitmen bersama di semua jajaran

Pemerintah Kota Balikpapan untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara, penyusunan anggaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat khususnya penyusunan dan pentakelolaan, implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) sebagai instrumen aplikasi dalam pengelolaan keuangan daerah serta dukungan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset daerah 34 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyediakan data laporan daerah.

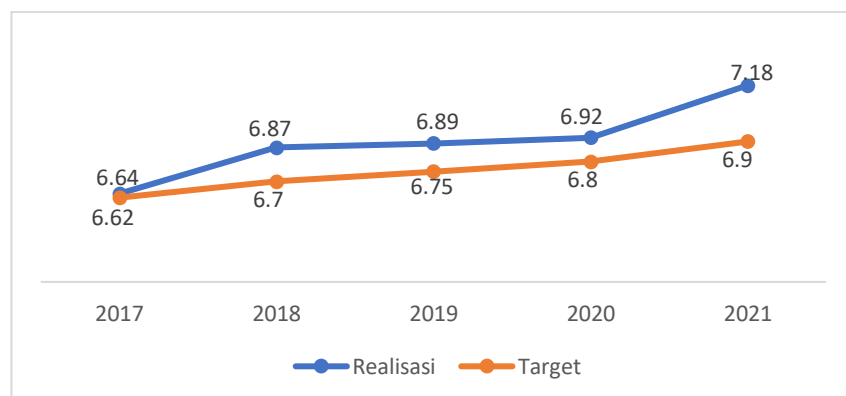
b. Indeks Persepsi Korupsi

Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi merupakan indeks komposit yang mengukur persepsi pelaku usaha dan pakar terhadap korupsi di sector publik yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara dan politisi. Indikator Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala numerik untuk mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di sejumlah kota di Indonesia. Disusun berdasarkan jawaban

dari pelaku bisnis. Rentang indeksnya adalah dari 0 sampai 10, dengan 0 berarti sangat korup dan 10 sangat bersih.

Target capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga merupakan tahun akhir RPJMD sebesar 6,9 dan tercapai realisasi sebesar 7,18 dengan capaian adalah 104,06% artinya IKU Indeks Persepsi Korupsi tercapai dengan predikat sangat baik.

Gambar 2.20
Target dan Realisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Terkait realisasi IKU Indeks Persepsi Korupsi pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai dan melampaui target sebesar 0,28. Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui

target akhir RPJMD sebesar 4,06%. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 6,62 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,56 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata Kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan.

Berdasarkan pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi Kota Balikpapan dari 8 April 2021 sampai 8 Mei 2021 dengan menggunakan metode pengambilan responden melalui *purposive sampling* dari 816 responden yang telah menerima layanan publik pada periode survei tersebut, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Data indeks persepsi korupsi berdasarkan indikator *Transparency International Indonesia (TII)*, pencapaian pemahaman masyarakat tentang indeks persepsi korupsi pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Adapun IPK di tahun 2020 mencapai 6,92, namun di tahun 2021 mencapai 7,18. Terjadinya kenaikan sebesar 0,255 ini menunjukkan perubahan dari sistem layanan publik di tingkat

Perangkat Daerah kearah positif, serta dukungan dari masyarakat secara umum berimplikasi mengalami peningkatan dalam komitmen mewujudkan bersih dari korupsi.

2. Perbandingan antara nilai Indeks Persepsi Korupsi kota Balikpapan antara 10 (sepuluh) Perangkat Daerah yang termasuk Zona Integritas (ZI) dan 6 (enam) Perangkat Daerah yang belum termasuk dalam Zona Integritas (ZI) Kota Balikpapan Tahun 2021 dapat diketahui bahwa pencapaian realisasi Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Kota Balikpapan lebih tinggi dengan indeks 7,18 untuk Perangkat Daerah Zona Integritas (ZI), sedangkan Perangkat Daerah non Zona Integritas (ZI) mencapai indeks 7,09. Dengan demikian perbedaan selisih indeks mencapai 0,09, lebih tinggi Perangkat Daerah Zona Integritas (ZI). Namun pada Perangkat Daerah non Zona Integritas (ZI), menjadi referensi bagi Kota Balikpapan jika meningkatkan jumlah lokasi survei untuk menjadi Zona Integritas.
3. Gambaran/alat ukur yang dapat digunakan untuk menera baseline resiko korupsi yang merupakan

implementasi dari kebijakan pemerintah Kota di tingkat daerah sesuai indikator sebagai berikut:

a. Literasi Korupsi

Sebagai salah satu indikator yang mengalami keberhasilan hingga mencapai 100% , jika responden mendengar adanya Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta diperkuat dengan hasil indikator Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Stranas PPK) dengan terbukti 62,6% responden telah mengetahuinya. Artinya pengetahuan yang dimiliki oleh responden cukup memadai, untuk perbaikan dan peningkatan dalam mewujudkan kota yang bersih dari korupsi dapat terwujud.

b. Daya Saing

Sebagai indikator yang menentukan keunggulan kompetitif Suatu daerah dibandingkan daerah lain, telah mengalami peningkatan 0,25. Peningkatan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 7,00, namun di tahun 2021 mencapai 7,25. Adapun perbaikan dari indikator ini telah di buktikan dengan penilaian kualitas kesehatan dan

kualitas pengendalian inflasi cukup memadai. Harapannya, pemerintah kota dapat mempertahankan atau ditingkatkan.

c. Penghambat Kemudahan Berusaha

Sebagai indikator penilaian yang ditujukan untuk mengetahui problematik saat menjalankan usaha di suatu daerah, telah mengalami penurunan mencapai sebesar 1,44. Penurunan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 8,00, sedangkan di tahun 2021 mencapai 6,56. Hal ini di karenakan presentase yang cukup tinggi untuk korupsi (pemberian biaya tambahan).

d. Potensi Korupsi

Sebagai indikator dalam menilai efektivitas program anti korupsi di daerah, telah mengalami kenaikan sebanyak 0,01. Peningkatan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 6,93, namun di tahun 2021 mencapai 6,94. Adapun kenaikan dari indikator ini telah dibuktikan dengan presentase responden yang tinggi terkait tanggapan prevalensi dan akuntabilitas. Serta motivasi korupsi dan frekuensi korupsi yang terus di kendalikan,

maka dapat meningkatkan indeksi melalui penurunan potensi korupsi.

e. Penilaian Integritas Bisnis

Sebagai indikator dalam penilaian terhadap infrastruktur pencegahan korupsi yang telah dikembangkan atau telah diterapkan di daerah, telah mengalami penurunan sebanyak 0,32. Penurunan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 7,80, namun di tahun 2021 mencapai 6,88. Hal ini menunjukkan peran serta keterlibatan pribadi dalam melawan korupsi perlu ditingkatkan.

f. Risiko Suap

Sebagai indikator penilaian terhadap risiko suap berdasarkan lapangan usaha, telah mengalami kenaikan 2,50. Peningkatan terjadi adanya pencapaian indeks di tahun 2020 sebanyak 7,00, namun di tahun 2021 mencapai 9,50. Hal ini menunjukkan risiko suap semakin menurun, dibuktikan dengan hasil dari responden yang memiliki relasi yang cukup tinggi pada lapangan usaha di bidang pertambangan.

Beberapa upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka peningkatan Indeks Persepsi Korupsi melalui memaksimalkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai konseling dan penjamin mutu (*quality assurance*) untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Dalam mewujudkan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif (memiliki kapabilitas level 3) dilakukan upaya-upaya seperti melakukan *self assessment* secara berkala, meningkatkan kematangan manajemen risiko, melakukan penilaian efektifitas manajemen resiko pemerintah daerah, mengimplementasikan *Key Process Area* (KPA) secara baik dan terus menerus (*institutionalized*) serta mempersiapkan untuk menuju level kapabilitas yang lebih tinggi.

Selain itu, mewajibkan pejabat di lingkungan pemerintah kota Balikpapan untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki melalui website <http://elhkpn.kpk.go.id/> setiap tahunnya juga merupakan salah satu cara untuk mencegah korupsi. Diketahui bahwa capaian penyampaian LHKPN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan adalah 100%.

Dengan demikian masyarakat dapat memantau tingkat kewajaran peningkatan jumlah kekayaan yang dimiliki khususnya apabila ada peningkatan jumlah kekayaan setelah selesai menjabat. Masyarakat juga diberi otoritas atau akses untuk dapat memantau dan memonitor kontrak pekerjaan atau pengadaan barang yang dilaksanakan Pemerintah Kota Balikpapan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Baik masyarakat dan ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan juga disediakan sarana untuk melaporkan kasus korupsi misalnya melalui inovasi yang dikembangkan oleh Inspektorat yaitu PEGAL atau pelaporan Gratifikasi Online yang dapat diakses pada link bit.ly/Pegal-Inspektorat.

Berbagai kampanye, sosialisasi serta diseminasi di ruang publik tentang bahaya korupsi, apa itu korupsi, dampak korupsi dan bagaimana memerangi korupsi juga senantiasa disampaikan kepada ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan. Kampanye tersebut dilakukan dengan menggunakan media massa (baik cetak maupun tertulis), melakukan seminar dan diskusi, pemasangan panduk dan poster yang berisi ajakan untuk menolak segala bentuk korupsi juga telah di pasang pada

masing-masing perangkat daerah sebagai media kampanye tentang bahaya korupsi.

c. Survey Kepuasan Masyarakat

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah dan menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survey kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

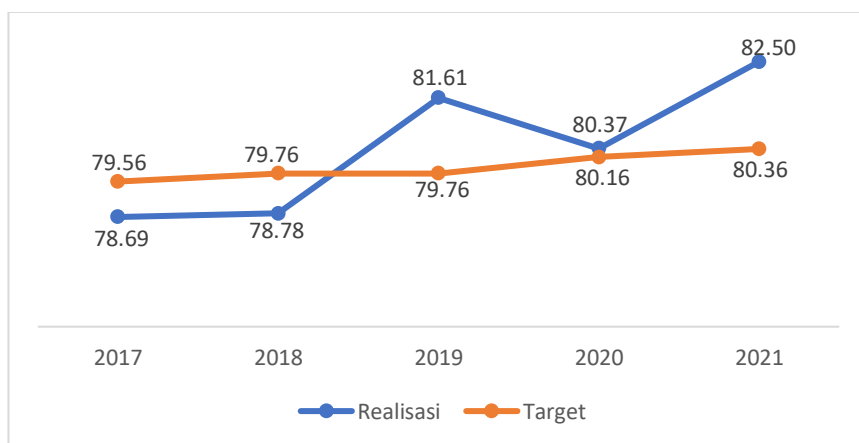
Survey Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik meliputi 9 (Sembilan) unsur pelayanan.

Dapat diketahui bahwa target IKU Survey Kepuasan Masyarakat sebesar 80,36 dan sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai realisasi sebesar 82,50 dengan capaian

kinerja 102,66% atau dengan kata lain melampaui target dengan predikat sangat tinggi. Angka tersebut didapatkan dari 23 perangkat daerah dan 99 produk layanan yang dinilai.

Gambar 2.21

Target dan Realisasi Survey Kepuasan Masyarakat Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : Bagian Organisasi Setda Kota Balikpapan Tahun 2021, diolah

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun 2020, realisasi capaian penilaian kepatuhan meningkat sebesar 2,13 dari 80,37 menjadi 82,50 pada tahun 2021. Capaian ini merupakan gambaran dari hasil konkrit Pemerintah Kota Balikpapan bersama jajaran perangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik

bagi masyarakat sebagai implementasi PERMENPANRB No. 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Walaupun pada tahun 2020 realisasinya mengalami penurunan yang disebabkan adanya pandemi covid 19 yang melanda Kota Balikpapan sehingga secara langsung memberikan pengaruh terhadap layanan publik.

Terkait realisasi IKU Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai dan melampaui sebesar 2,14. Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU SKM sebesar 79,36 mengalami peningkatan kinerja sejumlah 3,14 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari Pemerintah Kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh Pemerintah Kota Balikpapan.

Dalam meningkatkan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat, Pemerintah Kota Balikpapan melalui unit penyelenggara pelayanan publik senantiasa melakukan perbaikan dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Adapun perbaikan tersebut meliputi penyusunan dan memperbaharui standar operasional prosedur, perbaikan sarana dan prasana penunjang pelayanan publik, optimalisasi penggunaan dan pemanfaatan IT dan melakukan inovasi pelayanan publik secara terus menerus untuk efisiensi dan efektifitas pelayanan, inventarisasi keluhan serta harapan masyarakat dan segera lakukan perbaikan.

Sekretariat Daerah Kota Balikpapan melalui Bagian Organisasi senantiasa melaksanakan pendampingan dan pembinaan pelayanan publik bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Kota Balikpapan mulai dari penyusunan Standar Operasional Prosedur hingga membangun budaya pelayanan prima.

Sejak adanya wabah Covid-19, Disdukcapil juga melakukan perubahan drastis pada prosedur pelayanan administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil dari yang sebelumnya dilakukan melalui tatap muka menjadi pelayanan secara daring yang tentu saja dengan tujuan untuk memutus mata rantai *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Balikpapan. Pelayanan tersebut diatas pada tahun 2021 bisa diakses sekaligus melalui link

<https://capil.balikipapan.go.id/layanan/> sehingga

masyarakat dipermudah untuk mendapatkan dokumen dan bisa cetak sendiri di rumah dengan menggunakan kertas A4 ukuran 80 gram selain KTP-el dan bisa juga loket pengaduan tatap muka dengan melakukan protokoler kesehatan dengan 4 M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan). Berbagai inovasi juga telah dilaksanakan Disdukcapil dalam rangka meningkatkan pelayanan publik seperti pelayanan Pencetakan KTP-el DRIVE TRUE, Adanya ADM (Anjungan Mesin Mandiri) yg bisa mencetak dokumen yang telah dikirim ke masyarakat, Digitalisasi Berkas Arsip Kependudukan(DUKCAPIL GO DIGITAL), pengambilan KTP-el bisa melalui aplikasi Gojek sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor, dst.

Berbagai upaya perbaikan dalam pelayanan publik juga telah dilakukan oleh 6 Kecamatan yang ada di Kota Balikpapan seperti perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan kualitas petugas pelayanan dengan adanya front office pelayanan dan sikap petugas pelayanan yang ramah dan responsif dalam melayani, perbaikan sarana dan prasarana kantor kecamatan dan kelurahan agar

dapat memberikan kenyamanan kepada para pengunjung, menyiapkan berbagai sarana pengaduan antara lain adanya ruang pengaduan dengan petugas pelayanan khusus yang melayani pengaduan masyarakat sehingga aduan/keluhan dapat segera ditindaklanjuti maupun tersedianya kotak saran/kotak pengaduan, pemanfaatan media sosial kecamatan dan kelurahan, nomor pengaduan dan pengaduan langsung ke pejabat yang berwenang menerima pengaduan dan keluhan masyarakat serta mendorong munculnya inovasi layanan oleh para aparatur kecamatan dan kelurahan.

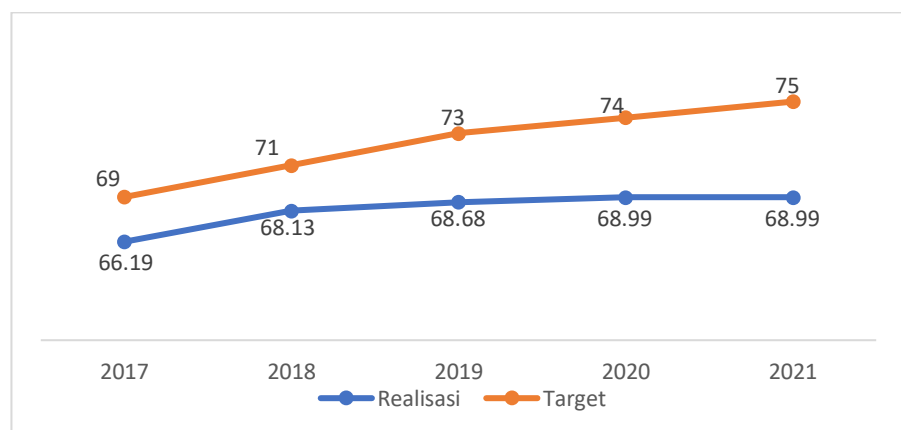
d. Nilai Evaluasi LAKIP

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban

atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Target capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP sampai dengan akhir tahun 2021 adalah 75 dengan predikat BB dan dapat terealisasi 68,99 atau memperoleh predikat B yang mana nilai ini masih menggunakan nilai tahun 2020 dengan capaian kinerja sebesar 91,99% predikat sangat tinggi. Walaupun capaian realisasi belum tercapai, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya seperti terlihat pada gambar berikut:

Gambar 2.22
Target dan Realisasi Nilai Evaluasi LAKIP
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : Bappeda Litbang Kota Balikpapan Tahun 2021

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Pemerintah Kota Balikpapan menunjukkan hasil yang baik, namun memerlukan perbaikan lebih lanjut. Upaya Pemerintah Kota Balikpapan belum berhasil untuk mengimplementasikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini disebabkan karena evaluasi yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab keberhasilan program yaitu berupa manfaat yang langsung dirasakan masyarakat (*result oriented*), kualitas indikator kinerja yang belum optimal, keterpaduan perencanaan serta mekanisme *cascade* kinerja belum berpedoman pada peta proses bisnis organisasi.

Terkait realisasi IKU Nilai Evaluasi LAKIP pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD belum dapat tercapai atau kurang sebesar 6,01. Ditinjau dari baseline

pada tahun 2015 capaian IKU Nilai Evaluasi LAKIP sebesar 68,62 mengalami peningkatan kinerja sebesar 0,37 sampai dengan tahun 2021.

Beberapa langkah yang telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi antara lain :

1. Perbaikan Tujuan, sasaran dan indikator Kinerja telah dilakukan sekaligus sebagai penyesuaian Nomenklatur dalam RKPD Tahun 2021 sesuai amanat Permendagri 90 Tahun 2019, Surat Edaran Mendagri Nomor 130/736/SJ, Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021;
2. Penjabaran kinerja dari level Pemerintah Kota sampai ke tingkat individu telah dilakukan melalui pendampingan kepada Perangkat Daerah terkait penyempurnaan Indikator Kinerja Individu melalui kegiatan rapat-rapat koordinasi seperti Bappeda Litbang, DPOP, DISDIKBUD, DISHUB, DKUMKMP, BKPSDM, DPMPT, DPPR, DISKOMINFO, DLH, KEC. BALTENG, KEC. BALTIM, DP3AKB;

3. Penyusunan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 dan KLHS telah mengacu pada Permendagri 86 tahun 2017 untuk menjamin keselarasan perencanaan kinerja antara Kota dan Perangkat Daerah sehingga dapat berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan masyarakat;
4. Menyempurnakan kualitas program prioritas daerah yang relevan dengan isu strategis daerah dalam RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, terutama dalam rangka percepatan pemulihan kesehatan dan perbaikan ekonomi saat pandemi,
5. Perangkat Daerah telah melaksanakan penyelarasan ukuran kinerja organisasi hingga level individu. Ukuran kinerja individu dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sesuai dengan PERMENPAN 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Pemerintah Kota Balikpapan telah menggunakan aplikasi SIPD Kemendagri yang terintegrasi baik dari sisi dokumen perencanaan hingga penganggaran dengan memperhatikan indikator dan target kinerja di masing-masing Perangkat Daerah. Selain itu

Pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan pengukuran kinerja berdasarkan pada aktivitas kerja sebagai dasar pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan (TTP);

7. Telah dilakukan pemantauan hasil tindak lanjut saran atau rekomendasi melalui evaluasi dan rapat internal dan lintas OPD serta menjadikan nilai evaluasi LAKIP sebagai indikator kinerja utama Kota Balikpapan pada 2 periode RPJMD (RPJMD 2016-2021 dan RPJMD 2021-2026), sehingga seluruh program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung peningkatan akuntabilitas kinerja kota.

e. Penilaian Kepatuhan

Penilaian Kepatuhan Penyelenggara Layanan Publik diselenggarakan oleh Ombudsman RI sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan

pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah. Penilaian kepatuhan dimaksudkan untuk mendorong pemenuhan terhadap standar pelayanan publik dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik guna mencegah terjadinya tindakan mal administrasi pada Unit Layanan Publik Pemerintah Pusat dan Daerah dengan upaya pemenuhan komponen standar pelayanan sebagaimana diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik dan untuk mengetahui efektivitas dan uji kualitas penyelenggara pelayanan publik.

Untuk Pemerintah Daerah baik di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kegiatan penilaian kepatuhan dilakukan di beberapa organisasi perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan pelayanan administrasi publik di masing-masing pemerintahan daerah, yang mencakup:

1. Sektor administrasi kependudukan (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil);
2. Sektor Kesehatan (Dinas Kesehatan);
3. Sektor Pendidikan (Dinas Pendidikan) dan

4. Sektor perizinan ekonomi dan non ekonomi (Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Penilaian kepatuhan terhadap organisasi perangkat daerah teknis yang menyelenggarakan pelayanan administrasi publik akan diakumulasikan dan dibagi dengan jumlah total produk layanan yang dinilai untuk kemudian diambil nilai rata-ratanya secara keseluruhan. Hasil rata-rata tersebut dikonversikan menjadi predikat/ zona kepatuhan yang terdiri dari:

Gambar 2.23

Predikat Zona Kepatuhan

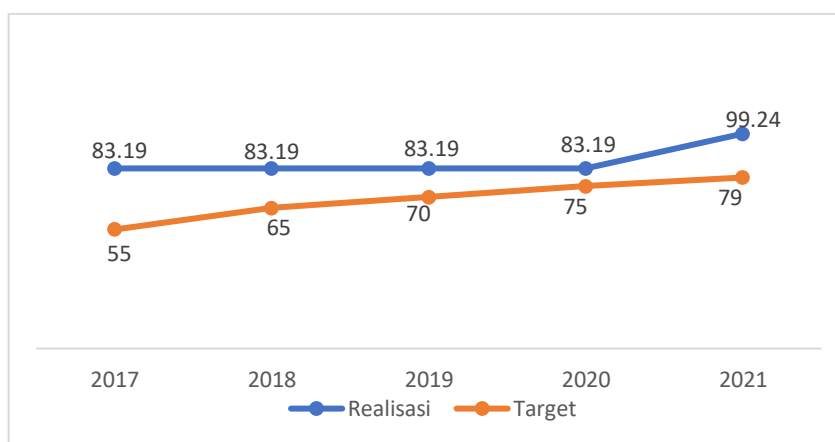


Dapat diketahui bahwa target IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 79 dan sampai dengan akhir tahun 2021 tercapai

realisasi sebesar 99,24 dengan capaian kinerja 125,62% atau dengan kata lain melampaui target dengan predikat sangat tinggi.

Gambar 2.24

Target dan Realisasi Penilaian Kepatuhan
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : Ombudman RI Tahun 2021

Objek penilaian kepatuhan di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari:

1. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebanyak 35 produk pelayanan;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 10 produk pelayanan;
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebanyak 5 produk pelayanan).

Adapun nilai rata-rata yang dihasilkan dari akumulasi 50 produk pelayanan dari ketiga perangkat daerah tersebut di atas sebesar 99,24 yang dikonversikan menjadi Zona Hijau (Kepatuhan Tinggi) dan Pemerintah Kota Balikpapan mendapatkan peringkat pertama (nilai tertinggi) nasional untuk kategori kota.

Apabila dibandingkan dengan realisasi capaian pada tahun sebelumnya, realisasi capaian penilaian kepatuhan meningkat dengan cukup signifikan yaitu 16,05 dari 83,19 menjadi 99,24. Perlu diketahui bahwa pada tahun 2018 dan 2019, Ombusman RI tidak melaksanakan penilaian di lingkup Pemerintah Kota Balikpapan karena sudah mendapat predikat zona hijau dan di tahun 2020 tidak dilaksanakan penilaian kepatuhan oleh Ombusman RI dikarenakan pandemi covid-19.

Terkait realisasi IKU Penilaian Kepatuhan pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai dan melampaui target sebesar 20,24. Pemerintah Kota Balikpapan telah berhasil memenuhi dan melampaui sebesar 25,62% terhadap target akhir RPJMD. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU Penilaian Kepatuhan sebesar 50 mengalami peningkatan kinerja

sebesar 49,24 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan dan berbagai inovasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkup kota Balikpapan dalam rangka percepatan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kota Balikpapan guna meningkatkan kepatuhan penyelenggara layanan publik antara lain :

1. Meningkatkan layanan publik yang prima sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan pada perangkat daerah;
2. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap sejumlah layanan publik di tiap-tiap perangkat daerah yang dinilai oleh masyarakat masih kurang dalam pelayanan serta adanya unsur gratifikasi dari layanan yang diberikan;
3. Melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan memberikan pendampingan yang intens

kepada seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan pelayanan publik;

4. Mendorong seluruh perangkat daerah di Kota Balikpapan untuk memaksimalkan upaya pemenuhan standar pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Mengembangkan rencana aksi dan inovasi yang memberikan dukungan dan nilai tambah terhadap layanan publik.

f. Indeks Profesionalitas ASN

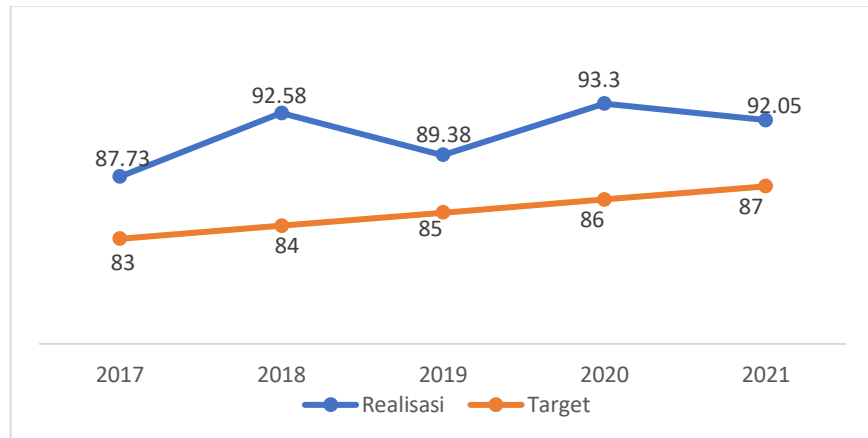
Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari Indeks Profesional ASN atau IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai penyelenggara dan pembina manajemen ASN menentukan pedoman dan tata cara pengukuran IP-ASN. Pedoman IP-ASN ini ditujukan kepada Instansi Pemerintah guna mengukur, menilai, dan mengevaluasi tingkat profesionalitas ASN untuk PNS baik di pusat maupun di

daerah. Dalam Pasal 5 Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 terdapat 5 (lima) prinsip untuk mengukur IPASN antara lain **koheren, kelayakan, akuntabel, dapat ditiru dan multi dimensional.**

IP-ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran ini bermanfaat dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya. Bagi ASN sendiri, dapat digunakan sebagai pengembangan diri dalam rangka peningkatan derajat profesionalitas sebagai pegawai ASN sedangkan bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut.

Target capaian IKU Indeks Profesionalitas ASN sampai dengan akhir tahun 2021 yang juga merupakan tahun akhir RPJMD sebesar 87 dan tercapai realisasi sebesar 92,05 dengan capaian adalah 105,80% artinya IKU Indeks Profesionalitas ASN tercapai dengan predikat sangat baik.

Gambar 2.25
Target dan Realisasi Indeks Profesionalitas ASN
Kota Balikpapan 2016-2021



Sumber data : BPKSDM Kota Balikpapan Tahun 2021

Walaupun pada tahun 2021 Indeks Profesionalitas ASN Kota Balikpapan menurun sebesar 1,25 dari capaian kinerja tahun 2020 sebesar 93,3 menjadi 92,05 , Indeks Profesionalitas ASN di tahun 2021 sudah melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa ASN telah terdistribusi berdasarkan jumlah/proporsi ASN dengan tingkat pendidikan tertentu pada organisasi perangkat daerah serta terjaminnya keselarasan *Job Description* dengan latar belakang pendidikan ASN per Perangkat Daerah.

Terkait realisasi IKU pada Tahun 2021 terhadap target akhir IKU RPJMD telah tercapai atau pencapaian IKU

utama Indeks Profesionalitas ASN lebih melampaui sebesar 5,05 atau 5,80%. Ditinjau dari baseline pada tahun 2015 capaian IKU IP-ASN sebesar 82 mengalami peningkatan kinerja sebesar 10,05 sampai dengan tahun 2021. Hal ini menunjukkan kinerja positif dari pemerintah kota bersama perangkat daerah untuk meningkatkan transparansi tata kelola pemerintahan didasarkan atas survei persepsi masyarakat di Kota Balikpapan.

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan merupakan upaya pemerintah Kota Balikpapan yang secara terus menerus dilaksanakan dalam rangka mendukung pencapaian indikator Indeks Profesionalitas ASN. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui Program pendidikan dan pelatihan merupakan dukungan untuk Diklat bahwa pegawai minimal mendapatkan pendidikan dan pelatihan minimal 20 JP per tahun yang dicanangkan oleh Kementerian PANRB dan sesuai dengan amanat pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2015 tentang ASN bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Oleh karena itu berdasarkan analisis kesenjangan, BKPSDM Kota Balikpapan membuat

peta tentang kemampuan atau kompetensi bagi semua pegawai yang selanjutnya digunakan untuk menentukan pendidikan formal sesuai formasi serta pendidikan dan pelatihan yang tepat harus diberikan oleh aparatur untuk meningkatkan kompetensi guna menunjang tugas dan fungsinya melalui analisis kebutuhan diklat.

Adapun beberapa upaya yang dilaksanakan oleh BKPSDM Kota Balikpapan untuk mengurangi kesenjangan kompetensi adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan Kompetensi Manajerial dilaksanakan melalui pengiriman PNS untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan secara bertahap karena belum seluruh pejabat struktural di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan mengikuti dikarenakan keterbatasan kuota penyelenggara diklat. Upaya koordinasi terus dilakukan oleh BKPSDM kota Balikpapan untuk mengelola keterbatasan anggaran serta lebih intensif bekerjasama ke lembaga-lembaga terakreditasi untuk pelaksanaan diklat tingkat kepemimpinan, agar seluruh peserta diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya dapat terakomodir seluruhnya;

2. Pengembangan kompetensi teknis diikuti oleh PNS yang belum memenuhi persyaratan kompetensi jabatan perlu mengikuti diklat teknis yang berkaitan dengan persyaratan kompetensi jabatan masing-masing. Selain itu, BKPSDM Kota Balikpapan kedepannya akan melakukan analisis kebutuhan diklat berdasarkan hasil analisis kesenjangan dalam penentuan rencana penyelenggaraan diklat yang prioritas selanjutnya akan diukur persentase realisasi penyelenggaraan/ pengiriman diklat yang terlaksana sesuai AKD (analisis kebutuhan diklat). Pada tahun 2021 pelaksanaan beberapa pelatihan kepada pegawai mengalami penundaan namun BKPSDM Kota Balikpapan berupaya melakukan inovasi dengan membangun aplikasi *e-learning* atau pelatihan berbasis learning sistem dan daring yang dikenal dengan Portal Belajar (PORTABEL) ASN Kota Balikpapan sehingga BKPSDM dapat merealisasikan 404 PNS untuk mengikuti penyelenggaraan diklat melebihi dari yang ditargetkan yaitu hanya 384 PNS;
3. BKPSDM juga melaksanakan pengembangan aparatur melalui tugas belajar dengan memberikan kesempatan

kepada aparatur untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi sesuai tugas dan fungsinya melalui Pendidikan Formal. Adapun upaya pelayanan kegiatan tugas belajar adalah :

- a. Memfasilitasi program tugas belajar dari Kementerian dan Lembaga lain yang membiayai pendidikan secara penuh;
 - b. Memfasilitasi dan memberi bantuan dana berupa cost sharing dari sumber APBD;
 - c. Memberi bantuan tugas belajar secara penuh dengan pendanaan murni yang bersumber dari APBD.
4. Melaksanakan pengembangan karir PNS berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah melalui mutasi antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota Balikpapan dan antar instansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pindah Wilayah Kerja PNS serta melalui Promosi baik vertikal ataupun diagonal berdasarkan hasil assement dari aplikasi E-Kompetensi. BKPSDM melaksanakan pengukuran kompetensi bagi pejabat II, III, IV.a, IV.b dan jabatan fungsional umum di lingkungan

Pemerintah Kota Balikpapan. Hal ini dimaksudkan untuk memetakan kebutuhan pada jabatan sesuai kompetensi sekaligus untuk pengembangan karir pegawai. Adapun yang diukur adalah kompetensi umum, kompetensi khusus dan manajerial. Pelaksanaan uji pengukuran kompetensi ini bertujuan sebagai bahan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan perencanaan pengelolaan dan pengembangan karier PNS serta dijadikan sebagai kelengkapan data base pejabat struktural sebagai bahan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menempatkan PNS sesuai dengan karakteristik dan kompetensi yang dimiliki, juga sebagai penentu kebijakan Diklat sehingga proses mutasi dan promosi serta penentuan peserta diklat dapat dilaksanakan berdasarkan kompetensi pegawai.

Selain melalui peningkatan kompetensi SDM aparatur, BKPSDM Kota Balikpapan juga melaksanakan beberapa upaya untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur antara lain melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala melalui aplikasi e-kinerja dan bekerjasama dengan BKN Pusat untuk menggunakan aplikasi E-SKP sehingga

akan memudahkan evaluasi kinerja setiap perangkat daerah, melaksanakan pembinaan terhadap PNS yang mempunyai kinerja cukup atau kurang melalui coaching clinic penyusunan SKP, melaksanakan penyusunan Rencana Pemenuhan Aparatur Sipil Negara 5 (lima) Tahun Kedepan melalui PANCA ASIK dan membangun Aplikasi DINDA atau Direktori Inovasi Daerah yang merupakan Perpustakaan Digital BKPSDM Kota Balikpapan dengan memanfaatkan aplikasi SLiMS *Library Online Public Access Catalog* (OPAC).

Dalam meningkatkan pengawasan dan pembinaan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BKPSDM Kota Balikpapan melaksanakan upaya-upaya yang lebih nyata terutama melalui sosialisasi dan penegakan aturan disiplin PNS, monitoring dan evaluasi terhadap tingkat kehadiran pegawai. Pada Tahun 2021 dalam rangka upaya pencegahan dan penularan covid-19 di lingkungan kerja Pemerintah Kota Balikpapan diterapkan pengaturan jam kerja ASN dengan mekanisme *Work From Home* (WFH) dan *Work From Office* (WFO) sehingga BKPSDM Kota Balikpapan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan melakukan inovasi dalam

pembinaan dan penanganan disiplin PNS dengan mengembangkan aplikasi absensi berbasis android sehingga ASN yang melaksanakan *Work From Home* (WFH) dapat mengisi daftar kehadiran melalui gadget android. Aplikasi ini baru diterapkan pada beberapa perangkat daerah sebagai *pilot project* dan diharapkan di tahun 2022 dapat diterapkan keseluruhan perangkat daerah.

Dengan demikian, sasaran Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada tahun 2021 yang ditunjukkan dengan 6 (enam) indikator meliputi Opini Laporan Keuangan, Indeks Persepsi Korupsi, Survey Kepuasan Masyarakat, Nilai Evaluasi LAKIP, Penilaian Kepatuhan dan Indeks Profesionalitas ASN maka tingkat capaian rata-rata menjadi 104.96% dengan predikat sangat tinggi sebagaimana perhitungan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Pengukuran Capaian Sasaran Strategis 10

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
1	Opini Laporan Keuangan	Indikator terukur kualitatif atas opini BPK atas pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan	WTP	WTP	100.00 %	Sangat Tinggi
2	Indeks Persepsi Korupsi	Indikator Indeks Persepsi Korupsi menggunakan skala numerik untuk mengukur tingkat korupsi dalam pemerintah daerah di sejumlah kota di Indonesia	6.9	7.18	104.06 %	Sangat Tinggi

No	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Tahun 2021			Predikat
			Target	Realisasi	Capaian	
3	Survey Kepuasan Masyarakat	Survei Kepuasan Masyarakat terukur atas Indeks Kepuasan Masyarakat. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat tidak harus disajikan dalam bentuk skoring/ angka absolut, tetapi dapat pula disajikan dalam bentuk kualitatif (baik atau buruk)	80.36	82.50	102.66 %	Sangat Tinggi
4	Nilai Evaluasi LAKIP	Penilaian hasil evaluasi AKIP berdasarkan predikat dengan Skala Scoring: AA = 90 - 100 A = 80 - 90 BB = 70 - 80 B = 60 - 70 CC = 50 - 60 C = 40 - 50 D = 0 - 30	75	68.68	91.57%	Sangat Tinggi
5	Penilaian Kepatuhan	Hasil Penilaian dan Kompetensi Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan dan Kompetensi Penyelenggara Pelayanan oleh Ombudsman RI	79	99.25	125.63 %	Sangat Tinggi
6	Indeks Profesionalitas ASN	IP ASN adalah nilai hasil pengukuran indeks profesionalitas ASN yang didasarkan pada dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin dari para ASN.	87	92.05	105.80 %	Sangat Tinggi
Rata - Rata Capaian Kinerja					104.96 %	Sangat Tinggi

2.3.1 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) Yang Telah Dicapai

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah dapat melihat dari tingkat efisiensi penggunaan anggaran. Pada tahun 2021 realisasi anggaran yang mendukung sasaran daerah adalah Rp. 2.259.461.733.915,- dari pagu anggaran Rp. 2.838.907.307.519,- sehingga dapat diperoleh persentase efisiensi anggaran sebesar 20,41%.

Realisasi anggaran pendukung sasaran daerah pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20

Realisasi Anggaran Tahun 2021

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021					
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	10,53	10,91	103,61%	Rp 703.913.127.728	Rp 547.786.735.262	22,18%
		2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	15,73	14,22	90,40%			
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat berkelanjutan	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	74,04	74,76	100,97%	Rp 442.947.963.219	Rp 300.675.056.480	32,12%
3	Menurunnya Jumlah Pengangguran	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4,55%	8,94%	50,89%	Rp 7.615.138.028	Rp 6.870.174.018	9,78%
		5	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,92%	64,29%	99,03%			
4	Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	79,53	80,71	101,48%	Rp 29.810.010.598	Rp 25.549.621.706	14,29%
		7	Tingkat Kemiskinan (TKm)	2,30%	2,89%	79,58%			
		8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	92	89,65	97,45%			
5	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	60,46	69,66	115,22%	Rp 687.052.633.672	Rp 572.466.663.484	16,68%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	TAHUN 2021					
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PAGU	REALISASI ANGGARAN	EFISIENSI ANGGARAN
6	Meningkatkan Kenyamanan, Keamanan dan Ketertiban Lingkungan	10	<i>Livable City Index</i>	74,5	78,48	105,34%	Rp 116.569.157.529	Rp 107.156.029.704	8,08%
7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	79	78,73	99,66%	Rp 67.980.177.972	Rp 61.316.707.649	9,80%
8	Meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat	12	Indeks Gini Ratio (GR)	0,3	0,311	103,67%	Rp 44.798.019.428	Rp 36.515.740.434	18,49%
		13	PDRB perkapita (Rp. Juta)	126,64	155,98	123,17%			
9	Mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan	14	PDRB Non Migas (Rp. Triliun)	38,62	40,61	105,15%	Rp 72.679.024.782	Rp 62.638.131.319	13,82%
10	Tata Kelola Pemerintahan yang baik	15	Opini Laporan Keuangan	WTP	WTP	100,00%	Rp 665.542.054.563	Rp 538.486.873.859	19,09%
		16	Indeks Persepsi Korupsi	6,9	7,18	104,06%			
		17	Survey Kepuasan Masyarakat	80,36	82,50	102,66%			
		18	Penilaian Kepatuhan	79	99,25	125,63%			
		19	Nilai Evaluasi LAKIP	75	68,99	91,99%			
		20	Indeks Profesionalitas ASN	87	92,05	105,80%			

Sumber data : Bappeda Litbang dan BPKAD Kota Balikpapan, diolah

2.3.2 Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

Dalam mendukung pencapaian target kinerja tersebut tidak terlepas dari dilaksanakan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang mendukung tercapainya target kinerja Pemerintah Kota Balikpapan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.21

Program dan Kegiatan Yang Mendukung Tercapainya Target Kinerja Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 314,643,175,698	Rp 284,228,962,586	90.33%
		2	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)		Program Pengelolaan Pendidikan	Rp 373,696,040,020	Rp 251,148,933,510	67.21%
					Program Pengembangan Kurikulum	Rp 728,949,100	Rp 526,831,629	72.27%
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Rp 1,907,383,050	Rp 1,384,492,805	72.59%
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Rp 1,398,970,000	Rp 1,303,657,032	93.19%
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Rp 1,372,850,000	Rp 1,056,598,426	76.96%
		Dinas Perpustakaan Dan Arsip	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,220,400,960	Rp 6,395,489,615	77.80%		

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Pembinaan Perpustakaan	Rp 1,295,359,150	Rp 1,172,550,378	90.52%
					Program Pengelolaan Arsip	Rp 649,999,750	Rp 569,219,280	87.57%
2	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Berkelanjutan	3	Angka Harapan Hidup (AHH)	Dinas Kesehatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 102,517,850,758	Rp 85,879,805,340	83.77%
				Dinas Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 177,997,504,754	Rp 119,899,772,926	67.36%
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 11,749,201,500	Rp 6,955,364,853	59.20%
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Rp 382,683,500	Rp 255,090,000	66.66%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 3,744,359,575	Rp 3,109,729,950	83.05%
				RSIA Sayang Ibu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 21,502,588,500	Rp 10,979,040,913	51.06%
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 4,010,020,224	Rp 3,893,026,889	97.08%
				RSUD Beriman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 78,121,521,000	Rp 42,768,763,799	54.75%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 34,604,233,408	Rp 21,686,783,111	62.67%
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 8,318,000,000	Rp 5,247,678,698	63.09%
3	Menurunnya Jumlah Pengangguran	4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Dinas Ketenagakerjaan	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 958,616,500	Rp 785,824,083	81.97%
		5	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Dinas Ketenagakerjaan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 163,888,000	Rp 129,075,500	78.76%
					Program Hubungan Industrial	Rp 226,209,200	Rp 164,614,955	72.77%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,266,424,328	Rp 5,790,659,480	92.41%
4	Meningkatkan Kualitas Hidup Dan Kesejahteraan Masyarakat Secara Menyeluruh Dan Berkelanjutan	6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	BPS Kota Balikpapan				
		7	Tingkat Kemiskinan (TKm)	Dinas Sosial	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,375,663,652	Rp 7,529,391,035	89.90%
					Program Pemberdayaan Sosial	Rp 1,369,162,600	Rp 1,334,273,900	97.45%
					Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1,497,858,068	Rp 1,202,428,870	80.28%
					Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Rp 1,579,737,550	Rp 1,448,096,150	91.67%
					Program Penanganan Bencana	Rp 741,471,100	Rp 618,995,601	83.48%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 336,056,833	Rp 328,898,110	97.87%
		8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Rp 586,352,100	Rp 579,180,030	98.78%
					Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp 3,412,922,450	Rp 2,051,871,789	60.12%
					Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Rp 1,504,396,600	Rp 1,247,563,559	82.93%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,661,945,612	Rp 6,968,196,434	90.95%
				Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Rp 249,999,910	Rp 222,182,990	88.87%
					Program Perlindungan Perempuan	Rp 834,189,550	Rp 547,241,069	65.60%
					Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Rp 219,086,360	Rp 193,501,537	88.32%
					Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	Rp 293,146,400	Rp 276,037,286	94.16%
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Rp 229,297,700	Rp 225,512,305	98.35%
					Program Perlindungan Khusus Anak	Rp 918,724,113	Rp 776,251,041	84.49%
5	Meningkatkan Kualitas	9	Indeks Kualitas Lingkungan	Dinas Pertanahan Dan	Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 207,975,000	Rp 201,799,250	97.03%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
	Lingkungan Hidup		Hidup	Penataan Ruang	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 5,000,000,000	Rp 12,651,240	0.25%
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp 1,914,073,600	Rp 1,430,477,822	74.73%
					Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Rp 40,000,000	Rp 3,487,500	8.72%
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Rp 39,684,394,000	Rp 26,854,114,471	67.67%
					Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	Rp 291,199,700	Rp 280,565,200	96.35%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7,299,165,758	Rp 6,294,656,294	86.24%
				Dinas Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 297,999,736	Rp 233,463,704	78.34%
					Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Rp 956,150,954	Rp 888,127,357	92.89%
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Rp 5,453,811,925	Rp 4,893,674,166	89.73%
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Rp 1,695,113,028	Rp 1,437,060,187	84.78%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp 79,000,000	Rp 78,015,950	98.75%
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 528,053,500	Rp 467,715,844	88.57%
					Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp 34,988,500	Rp 33,853,000	96.75%
					Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Rp 99,643,000	Rp 80,016,230	80.30%
					Program Pengelolaan Persampahan	Rp 50,113,893,160	Rp 45,329,791,191	90.45%
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 30,286,890,047	Rp 25,065,925,265	82.76%
				Dinas Pekerjaan Umum	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 19,213,632,612	Rp 14,477,671,381	75.35%
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Rp 12,170,000,000	Rp 10,768,878,847	88.49%
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rp 19,500,082,910	Rp 17,555,802,023	90.03%
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Rp 71,353,516,837	Rp 41,829,174,090	58.62%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Drainase			
					Program Pengembangan Permukiman	Rp 164,961,999,700	Rp 131,294,525,643	79.59%
					Program Penataan Bangunan Gedung	Rp 72,397,122,000	Rp 67,668,314,319	93.47%
					Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Rp 30,950,000,000	Rp 29,721,774,175	96.03%
					Program Penyelenggaraan Jalan	Rp 150,420,460,705	Rp 143,485,631,833	95.39%
					Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp 250,000,000	Rp 226,029,503	90.41%
				Dinas Perumahan Dan Permukiman	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Rp 1,853,467,000	Rp 1,853,467,000	100.00%
6	Meningkatkan Kenyamanan. Keamanan Dan Ketertiban Lingkungan	10	Livable City Index	Dinas Perumahan Dan Permukiman	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11,197,610,202	Rp 9,465,256,193	84.53%
					Program Pengembangan Perumahan	Rp 4,155,000,000	Rp 3,383,523,057	81.43%
					Program Kawasan Permukiman	Rp 2,301,511,000	Rp 2,240,710,045	97.36%
					Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh			
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Rp 23,550,590,916	Rp 22,067,980,840	93.70%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
				Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3,567,724,388	Rp 3,234,696,328	90.67%
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Rp 286,875,000	Rp 156,329,256	54.49%
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Rp 1,509,997,960	Rp 1,360,328,979	90.09%
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Rp 1,824,995,000	Rp 1,308,840,450	71.72%
					Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Rp 432,525,000	Rp 421,695,723	97.50%
				Satuan Polisi Pamong Praja	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 27,632,004,013	Rp 26,281,684,120	95.11%
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp 5,236,793,492	Rp 4,497,833,533	85.89%
				Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25,530,119,946	Rp 24,508,606,977	96.00%
					Program Penanggulangan Bencana	Rp 3,674,105,300	Rp 3,260,008,585	88.73%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp 5,669,305,312	Rp 4,968,535,617	87.64%
7	Terwujudnya Infrastruktur Yang Handal	11	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar	Dinas Perhubungan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 25,367,490,272	Rp 22,711,669,891	89.53%
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 42,322,687,700	Rp 38,344,966,758	90.60%
					Program Pengelolaan Pelayaran	Rp 290,000,000	Rp 260,071,000	89.68%
8	Meningkatkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	12	Indeks Gini Ratio (GR)	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah Dan Perindustrian	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Rp 8,983,416,345	Rp 6,687,178,370	74.44%
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Rp 79,985,700	Rp 37,693,200	47.12%
		13	PDRB perkapita (Rp. Juta)		Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Rp 200,000,000	Rp 183,050,000	91.53%
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,735,108,150		Rp 7,389,139,025	84.59%		
		Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp 77,485,550		Rp 44,808,050	57.83%		
		Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp 545,304,000		Rp 486,185,667	89.16%		

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp 317,099,800	Rp 274,925,250	86.70%
					Program Pengembangan UMKM	Rp 116,399,900	Rp 110,443,600	94.88%
				Dinas Perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13,765,892,294	Rp 11,378,611,357	82.66%
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp 10,753,734,482	Rp 8,875,801,328	82.54%
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp 99,945,000	Rp 71,104,753	71.14%
					Program Pengembangan Ekspor	Rp 474,918,000	Rp 435,079,664	91.61%
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp 548,880,207	Rp 459,710,881	83.75%
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp 99,850,000	Rp 82,009,290	82.13%
9	Mendorong Pembangunan Ekonomi Yang Berkelanjutan	14	PDRB Non Migas (Rp. Triliun)	Dinas Pemuda, Olah Raga Dan Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Rp 4,027,329,212	Rp 3,818,396,755	94.81%
					Program Pemasaran Pariwisata	Rp 2,546,792,608	Rp 2,500,375,872	98.18%
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Rp 480,000,000	Rp 474,237,250	98.80%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata			
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,764,745,382	Rp 9,704,115,181	90.15%
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rp 4,874,755,000	Rp 3,941,318,483	80.85%
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Rp 11,289,843,064	Rp 9,663,174,809	85.59%
					Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Rp 1,000,000,000	Rp 1,000,000,000	100.00%
				Dinas Pangan, Pertanian Dan Perikanan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 17,766,799,022	Rp 14,764,525,329	83.10%
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 609,589,536	Rp 580,890,645	95.29%
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 100,000,000	Rp 63,227,821	63.23%
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 848,004,446	Rp 673,077,571	79.37%
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 1,455,869,827	Rp 1,293,898,085	88.87%
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat	Rp 783,315,540	Rp 654,977,570	83.62%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Veteriner			
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 98,850,000	Rp 93,980,600	95.07%
					Program Penyuluhan Pertanian	Rp 444,960,672	Rp 291,000,213	65.40%
					Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp 99,999,300	Rp 99,034,995	99.04%
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 638,440,072	Rp 535,426,718	83.86%
				Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11,754,911,403	Rp 10,218,350,569	86.93%
					Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp 249,994,400	Rp 15,707,200	6.28%
					Program Promosi Penanaman Modal	Rp 299,999,800	Rp 197,184,494	65.73%
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp 999,002,148	Rp 716,288,036	71.70%
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp 564,889,598	Rp 422,657,813	74.82%
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp 980,933,752	Rp 916,285,310	93.41%
10	Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	15	Opini Laporan Keuangan	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah			
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 36,542,904,676	Rp 34,978,854,205	95.72%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp 120,228,031,228	Rp 90,825,488,016	75.54%
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp 22,583,600,000	Rp 20,350,201,942	90.11%
				Sekretariat Daerah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Rp 2,333,174,631	Rp 1,648,413,421	70.65%
		16	Indeks Persepsi Korupsi	Inspektorat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12,078,399,696	Rp 10,747,781,757	88.98%
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp 177,300,000	Rp 112,209,500	63.29%
				Sekretariat Daerah	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Rp 57,793,815,231	Rp 37,529,712,179	64.94%
		17	Survey Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 98,648,412,690	Rp 82,862,091,991	84.00%
				Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 39,315,849,530	Rp 26,452,735,362	67.28%
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp 6,835,392,900	Rp 5,916,287,730	86.55%
				Dinas Komunikasi Dan Informatika	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 6,118,733,801	Rp 5,014,250,019	81.95%
					Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Rp 4,114,464,880	Rp 3,500,114,936	85.07%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Aplikasi Informatika	Rp 3,652,497,300	Rp 3,406,696,807	93.27%
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp 217,150,000	Rp 195,772,000	90.16%
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp 49,918,000	Rp 8,800,000	17.63%
				Sekretariat DPRD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 70,584,498,824	Rp 59,257,755,396	83.95%
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Rp 15,909,285,600	Rp 13,882,356,904	87.26%
				Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 9,304,434,752	Rp 8,209,982,062	88.24%
					Program Pendaftaran Penduduk	Rp 2,486,442,576	Rp 2,040,729,744	82.07%
					Program Pencatatan Sipil	Rp 632,786,396	Rp 591,252,857	93.44%
					Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp 942,117,716	Rp 891,305,734	94.61%
				Kecamatan Balikpapan Barat	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13,837,265,534	Rp 12,269,107,870	88.67%
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 2,765,890,000	Rp 2,505,141,019	90.57%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 3,155,760,650	Rp 2,398,547,310	76.01%
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 99,424,900	Rp 31,936,500	32.12%
				Kecamatan Balikpapan Tengah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 14,890,617,184	Rp 13,247,926,626	88.97%
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 3,115,055,250	Rp 3,077,758,988	98.80%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 1,940,440,474	Rp 1,826,031,675	94.10%
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 47,905,000	Rp 47,905,000	100.00%
				Kecamatan Balikpapan Kota	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 13,506,739,076	Rp 11,041,463,732	81.75%
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 2,471,349,500	Rp 2,291,112,942	92.71%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 2,790,032,517	Rp 2,369,333,450	84.92%
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 187,131,207	Rp 131,078,000	70.05%
				Kecamatan Balikpapan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 15,020,133,234	Rp 13,255,077,239	88.25%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
				Utara	Kabupaten/Kota			
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 4,235,456,800	Rp 4,081,145,571	96.36%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 1,620,683,050	Rp 1,257,562,750	77.59%
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 217,675,000	Rp 33,275,000	15.29%
				Kecamatan Balikpapan Selatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 16,909,973,552	Rp 14,707,137,569	86.97%
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 3,879,341,025	Rp 3,566,498,686	91.94%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 3,130,944,110	Rp 2,210,924,830	70.62%
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 326,282,000	Rp 156,147,000	47.86%
				Kecamatan Balikpapan Timur	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11,863,739,444	Rp 9,760,892,358	82.28%
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 2,652,232,200	Rp 2,282,660,670	86.07%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 1,897,463,756	Rp 1,586,995,890	83.64%

NO	SASARAN	NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	PD PENGAMPU	PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2021		CAPAIAN
						PAGU	REALISASI	
					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 212,180,000	Rp 202,547,200	95.46%
		18	Nilai Evaluasi LAKIP	Inspektorat	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp 511,435,000	Rp 414,812,500	81.11%
				Sekretariat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 71,998,800	Rp 31,768,000	44.12%
				Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian Dan Pengembangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 10,234,553,941	Rp 8,721,879,951	85.22%
					Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp 2,437,613,450	Rp 1,567,940,615	64.32%
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Rp 587,312,250	Rp 577,766,000	98.37%
		19	Penilaian Kepatuhan	Seluruh Unit Pelayanan Publik				
		20	Indeks Profesionalitas ASN	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 8,815,361,006	Rp 7,736,170,805	87.76%
					Program Kepegawaian Daerah	Rp 3,734,393,090	Rp 2,033,383,772	54.45%
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rp 7,826,461,136	Rp 4,642,151,780	59.31%

Sumber data : Bappeda Litbang dan BPKAD Kota Balikpapan, diolah

2.3.3 Capaian Prestasi dan Penghargaan

Selama tahun 2021, Pemerintah Kota Balikpapan telah mendapatkan beberapa penghargaan dan prestasi yang berhasil diraih yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Secara keseluruhan, penghargaan yang berhasil diraih berjumlah 52 penghargaan dari berbagai lembaga, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah (swasta). Adapun penghargaan dan prestasi yang diraih disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.22
Nama dan Bentuk Penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Balikpapan

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	BENTUK PENGHARGAAN
1	Panji Keberhasilan Bidang Sektor Koperasi	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	Bendera Panji, Tropi, Piagam
2	Panji Keberhasilan Bidang Dekranasda	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	Bendera Panji, Tropi, Piagam
3	Panji Keberhasilan Bidang Perhubungan Kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dishub	Bendera Panji, Tropi, Piagam
4	Panji Keberhasilan Bidang Pendidikan	Provinsi	Pemprov Kaltim	Disdikbud	Bendera Panji, Tropi, Piagam
5	Panji Keberhasilan Bidang Apresiasi Bunda PAUD	Provinsi	Pemprov Kaltim	Disdikbud	Bendera Panji, Tropi, Piagam
6	Panji Keberhasilan Bidang	Provinsi	Pemprov Kaltim	Disdikbud	Bendera Panji,

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	BENTUK PENGHARGAAN
	Kebudayaan				Tropi, Piagam
7	Panji Keberhasilan Bidang Kepemudaan	Provinsi	Pemprov Kaltim	DPOP	Bendera Panji, Tropi, Piagam
8	Panji Keberhasilan Bidang Keolahragaan	Provinsi	Pemprov Kaltim	DPOP	Bendera Panji, Tropi, Piagam
9	Panji Keberhasilan Bidang Kesejahteraan Sosial	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dinsos	Bendera Panji, Tropi, Piagam
10	Panji Keberhasilan Bidang Lingkungan Hidup	Provinsi	Pemprov Kaltim	DLH	Bendera Panji, Tropi, Piagam
11	Panji Keberhasilan Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Provinsi	Pemprov Kaltim	DPMPPT	Bendera Panji, Tropi, Piagam
12	Panji Keberhasilan Bidang Daya Saing Daerah	Provinsi	Pemprov Kaltim	DPMPPT	Bendera Panji, Tropi, Piagam
13	Panji Keberhasilan Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur (PNS)	Provinsi	Pemprov Kaltim	BPKSDM	Bendera Panji, Tropi, Piagam
14	Panji Keberhasilan Bidang Pengembangan Iptek dan Inovasi	Provinsi	Pemprov Kaltim	Bappedalitbang	Bendera Panji, Tropi, Piagam
15	Panji Keberhasilan Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	Bag. Organisasi	Bendera Panji, Tropi, Piagam
16	Panji Keberhasilan Bidang Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas di Kabupaten/Kota Se-Kaltim	Provinsi	Pemprov Kaltim	Satpol PP	Bendera Panji, Tropi, Piagam

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	BENTUK PENGHARGAAN
17	Panji Keberhasilan Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi Kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	TP-PKK	Bendera Panji, Tropi, Piagam
18	Terbaik II Bidang Pembangunan Hukum & HAM	Provinsi	Pemprov Kaltim	Bag. Hukum	Tropi dan piagam
19	Terbaik II Bidang Pencegahan Korupsi	Provinsi	Pemprov Kaltim	Inspektorat	Tropi dan piagam
20	Terbaik II Bidang Pariwisata Kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	DPOP	Tropi dan piagam
21	Terbaik II Bidang Sektor Perdagangan	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dinas Perdagangan	Tropi dan piagam
22	Terbaik II Bidang Kesehatan	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dinkes	Tropi dan piagam
23	Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan	Provinsi	Pemprov Kaltim	Disnaker	Tropi dan piagam
24	Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang	Provinsi	Pemprov Kaltim	Disperkim	Tropi dan piagam
25	Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	Disdukcapil	Tropi dan piagam
26	Terbaik II Bidang Keberhasilan Pembangunan Keluarga Berencana Kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	DP3AKB	Tropi dan piagam
27	Terbaik II Bidang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)	Provinsi	Pemprov Kaltim	Bag. Pemerintahan	Tropi dan piagam
28	Terbaik II Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan	Provinsi	Pemprov Kaltim	Bag. Pemerintahan	Tropi dan piagam

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	BENTUK PENGHARGAAN
29	Terbaik III Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	Bag. Pemerintahan	Tropi dan piagam
30	Terbaik III Bidang Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik	Provinsi	Pemprov Kaltim	Diskominfo	Tropi dan piagam
31	Terbaik III Bidang Sektor Industri	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dinas koperasi, UMKM, dan perindustrian	Tropi dan piagam
32	Terbaik III Bidang Perpustakaan dan Minat Baca	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Tropi dan piagam
33	Terbaik III Bidang Tata Kelola Kearsipan	Provinsi	Pemprov Kaltim	Dinas Perpustakaan dan Arsip	Tropi dan piagam
34	Terbaik III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	DP3AKB	Tropi dan piagam
35	Terbaik III Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah	Provinsi	Pemprov Kaltim	BPKD	Tropi dan piagam
36	Terbaik II Camat Berprestasi se-Kaltim	Provinsi	Pemprov Kaltim	Kecamatan Balsei	Tropi dan piagam
37	Terbaik I Satpol PP se-kaltim	Provinsi	Pemprov Kaltim	Satpol PP	Piagam
38	Penghargaan Pelayanan Publik Sangat Baik	Nasional	KemePAN RB	Disdukcapil	Piagam
39	Penghargaan Pelayanan Publik Sangat Baik	Nasional	KemenPAN RB	DPMPPT	Piagam
40	Peringkat I Penghargaan Pembangunan Daerah kategori Kota	Provinsi	Pemprov Kaltim	Bappedalitbang	Piagam
41	Penghargaan	Nasional	KemenPAN	Bag.	Piagam

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	BENTUK PENGHARGAAN
	Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 Predikat B		RB	Organisasi	
42	Juara umum pada Lomba Hari Kesatuan Gerak (HKG) ke-49 tahun 2021 tingkat Provinsi Kalimantan Timur	Provinsi	TP PKK Pemprov Kaltim	TP-PKK Kota Balikpapan	Piagam dan Piala
43	Anugerah Parahati Ekapraya Kategori Pratama	Nasional	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia	DP3AKB	Piagam dan Piala
44	Pelayanan Psikososial Untuk Odgj	PROVINSI	Rumah Sakit Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam Samarinda	DINSOS	PLAKAT
45	45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021	Nasional	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)	Dinas Lingkungan Hidup	Piagam dan Piala
46	Penerimaan penghargaan penerpan sistem merit dalam manajemen ASN dengan predikat baik	Nasional	Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam
47	Opini Wajar tanpa pengecualian	Provinsi	Provinsi Kaltim	Pemerintah Kota Balikpapan	Piagam

NO	NAMA PENGHARGAAN	TINGKAT	INSTANSI YANG MEMBERIKAN	PENERIMA	BENTUK PENGHARGAAN
48	peringkat ketiga Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	Pemerintah Kota Balikpapan	PLAKAT
49	Adiwiyata Nasional Dan Adiwiyata Mandiri	Provinsi	Provinsi Kalimantan Timur	12 Sd Adiwiyata Nasional 3 Adiwiyata Mandiri Di Kota Balikpapan	
50	Penghargaan Menuju Smart City Kategori Smart Environment	Nasional	Kemenkominfo	Dinas Kominfo	
51	Peringkat Pertama dalam Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 kategori Pemerintah Kota.	Nasional	Ombudsman RI	Walikota	
52	ESC Award, Kota Ramah Lingkungan Se-Asia Tenggara	Internasional	ESC	Kota Balikpapan	Trofi

Adapun beberapa dokumentasi Kegiatan Penerimaan Penghargaan yang diterima oleh Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2021 sebagai berikut ini:


Tabel 2.23

Beberapa Dokumentasi Penerimaan Penghargaan

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
1		<ul style="list-style-type: none"> - Terbaik II Bidang Pembangunan Hukum dan HAM - Terbaik III Bidang Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kategori Kota - Terbaik II Bidang Pencegahan Korupsi - Terbaik III Bidang Keberhasilan Keterbukaan Informasi Publik - Terbaik II Bidang Pariwisata Kategori Kota - Terbaik III Bidang Sektor Industri - Terbaik II Bidang Sektor Perdagangan - Terbaik I Bidang Sektor Koperasi - Terbaik I Bidang Dekranasda - Terbaik I Bidang Perhubungan Kategori Kota 	<p>Panji keberhasilan diserahkan Gubernur Kalimantan Timur pada HUT Ke-64 Provinsi Kaltim. Dari keseluruhan 35 Penghargaan yang diraih Kota Balikpapan, 17 diantaranya adalah penghargaan Terbaik I berupa Panji Keberhasilan, kemudian 11 penghargaan adalah Terbaik II berupa trofi dan piagam, dan 7 penghargaan Terbaik III berupa trofi dan piagam.</p>


NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
		<ul style="list-style-type: none"> - Terbaik I Bidang Pendidikan - Terbaik I Bidang Apresiasi Bunda PAUD - Terbaik I Bidang Kebudayaan - Terbaik II Bidang Kesehatan - Terbaik II Bidang Ketenagakerjaan - Terbaik I Bidang Kepemudaan - Terbaik I Bidang Keolahragaan - Terbaik I Bidang Kesejahteraan Sosial - Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Penataan Ruang - Terbaik I Bidang Lingkungan Hidup - Terbaik I Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu - Terbaik I Bidang Daya Saing Daerah - Terbaik III Bidang Perpustakaan 	

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
		dan Minat Baca - Terbaik III Bidang Tata Kelola Kearsipan - Terbaik III Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kategori Kota - Terbaik II Bidang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kategori Kota - Terbaik I Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil (PNS) - Terbaik III Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah - Terbaik I Bidang Pengembangan Iptek dan Inovasi - Terbaik II Bidang Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Kategori Kota - Terbaik II Bidang	


NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
		Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) - Terbaik I Bidang Peningkatan Pelayanan Publik Kategori Kota -Terbaik I Bidang Penyelenggaraan Trantibum dan Satlinmas di Kabupaten/Kot a se-Kaltim - Terbaik I Bidang Tim Penggerak PKK Berprestasi Kategori Kota - Terbaik II Bidang Pemberdayaan	
2		Anugerah Parahati Ekapraya Kategori Pratama	Kota Balikpapan menerima penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya Kategori Pratama. Ini adalah penghargaan yang diberikan Kementerian untuk pemerintah daerah yang berkomitmen terhadap penerapan pembangunan dalam rangka pemberdayaan

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
			<p>perempuan yang responsif gender. Kendati penghargaan sudah ada sejak lama, namun baru di 2021 ini Balikpapan berhasil menjadi salah satu penerima penghargaan dimana salah satu indikator kelembagaan yaitu adanya komitmen dalam bentuk regulasi</p>
3		45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021	<p>Dari 3.176 inovasi yang terdaftar di Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021, dipilih 45 inovasi sebagai pemenang. Inovasi DIGITASI (Data dan Informasi Digital Tanaman Koleksi) Kebun Raya Balikpapan masuk 45 inovasi terpuji di KIPP Tahun 2021</p> <p>Inovasi DIGITASI Kebun Raya Balikpapan adalah suatu inovasi yang menyampaikan</p>

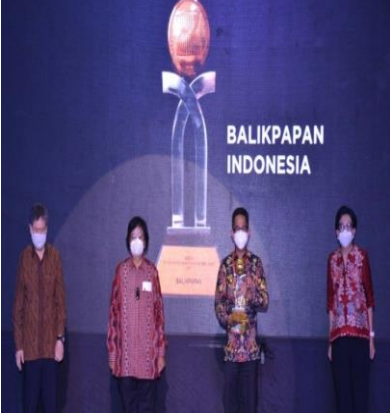
NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
			<p>semua informasi database tanaman koleksi yang ada di Kebun Raya Balikpapan secara digital melalui aplikasi Quick Response (QR) Code yang ada di tiap tanaman koleksi, serta dapat melalui situs web Kebun Raya Balikpapan (kebunraya.balikipapan.go.id), dengan memindai plang barcode yang terpasang di tiap tanaman koleksi di semua kawasan Kebun Raya Balikpapan</p> <p>Inovasi ini akan diterapkan di beberapa Hutan Kota, Taman Kota, Ruang Terbuka Hijau lainnya yang ada di Kota Balikpapan, serta akan dicoba diterapkan di pohon-pohon pinggir jalan besar di Kota Balikpapan dengan maksud untuk mengetahui</p>

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
			<p>data detail pohon tersebut, agar apabila akan dilakukan izin penebangan pohon dapat melihat data yang ada di dalam barcode sesuai Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengendalian Penebangan Pohon.</p>
4		Opini Wajar tanpa pengecualian	<p>Pemerintah Kota Balikpapan berhasil mempertahankan opini WTP sebanyak 8 kali, sehingga Balikpapan memperoleh penghargaan WTP 7 kali berturut-turut. Adapun tahapan penghargaannya adalah WTP 5 tahun berturut-turut, 7 kali berturut-turut dan 10 kali berturut-turut. Salah satu indikator perolehan opini WTP. Adalah menyusun anggaran sesuai dengan aturan pemerintah pusat.</p>

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
			Khususnya dalam penyusunan dan penatakelolaan.
5		Peringkat ketiga Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih peringkat ketiga untuk kategori Pemkab dan Pemkot tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021. Dalam penghargaan ini, Balikpapan mendapatkan predikat badan publik menuju informatif.
6		ADIWIYATA NASIONAL DAN ADIWIYATA MANDIRI	Balikpapan menerima penghargaan Adiwiyata terbanyak se-Kaltim dengan jumlah 15 Sekolah. Berikut daftar peraih Sekolah Adiwiyata di Kota Balikpapan:

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
			<p>Predikat Mandiri</p> <ul style="list-style-type: none"> - SDN 011 BPP Timur - SDN 020 BPP Timur - SMPN 22 Balikpapan <p>Predikat Nasional</p> <ul style="list-style-type: none"> -SDN 009 BPP Utara -SDN 003 BPP Utara -SDN 023 BPP Utara -SDN 008 BPP Barat -SDN 011 BPP Barat -SDN 004 BPP Tengah -SDN 011 BPP Tengah -SDN 017 BPP Tengah -SDN 003 BPP Selatan -SDIT Al Auliya 2 -SDIT Badan Amal -SMAN 9 Balikpapan
7		Penghargaan Menuju Smart City Kategori Smart Environment	Kota Balikpapan menjadi salah satu dari 100 kabupaten/ kota yang berhasil mengikuti implementasi program kota cerdas (smart

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
			<p>city) tahun 2021. Balikpapan berhasil menjadi kota yang mengimplemen tasikan gerakan menuju smart city kategori smart environment. Perolehan tersebut berdasarkan quickwin pemanfaatan gas metan di TPA Manggar. Penghargaan diberikan oleh Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika RI.</p>
8		<p>Peringkat Pertama dalam Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 kategori Pemerintah Kota.</p>	<p>Pemerintah Kota Balikpapan berhasil meraih peringkat pertama dalam Anugerah Predikat Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 kategori Pemerintah Kota oleh Ombudsman RI. Balikpapan bahkan memperoleh nilai nyaris sempurna, 99,25. Balikpapan berhasil</p>

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
			memperoleh peringkat pertama bersaing dengan 97 kota lain se Indonesia.
9		ESC Award, Kota Ramah Lingkungan Se-Asia Tenggara	Kota Balikpapan berhasil meraih penghargaan ASEAN Environmentally Sustainable Cities (ESC) Award ke 19 tahun 2021 mewakili Indonesia. Balikpapan memperoleh penghargaan ini bersama 9 kota dari 9 negara anggota ASEAN lainnya. Karena Balikpapan mewakili Indonesia menerima ASEAN ESC Award, maka dipastikan sudah memenuhi sebagai kota Clean Air, Clean Land, dan Clean Water. Termasuk ada aksi mitigasi perubahan iklim, dan inovasi lingkungan.

NO	DOKUMENTASI PENGHARGAAN	JENIS PENGHARGAAN	NARASI
10		Penghargaan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 Predikat B	Pemerintah Kota Balikpapan meraih penghargaan Evaluuasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan pemerintahannya Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dan Kota. Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah kepada daerah dan atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas Pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi.

Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu

penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pembangunan bagi daerah atau desa. Tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah kepada daerah atau desa meliputi sebagian tugas-tugas pemerintah yang apabila dilaksanakan oleh daerah akan lebih efisien dan efektif serta berkewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Pada Tahun Anggaran 2021, **Pemerintah Kota Balikpapan tidak mendapatkan alokasi dana Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.**

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, bahwa SPM Bidang Pendidikan meliputi:

a. Pendidikan Usian Dini

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini merupakan Peserta Didik yang berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

b. Pendidikan Dasar

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan dasar merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.

c. Pendidikan Kesetaraan

Penerima Pelayanan Dasar SPM Pendidikan pada pendidikan kesetaraan merupakan Peserta Didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

2. Target Pencapaian SPM

Target pencapaian SPM Kabupaten Kota sesuai dengan peraturan pemerintah No.2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal adalah sebagai berikut:

2.1 Pendidikan Anak Usia Dini

Tabel 4.1
Target pencapaian SPM Pendidikan Anak Usia Dini

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET
Persentase anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan anak usia dini	100%
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	

2.2 Pendidikan Dasar

2.2.1 Pendidikan Sekolah Dasar

Target Paendidikan Sekolah Dasar Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target pencapaian SPM Pendidikan Sekolah Dasar

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET
Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	100%
	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun	

2.2.2 Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

Target Paendidikan Sekolah Menengah Pertama Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Target pencapaian SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET
Persentase anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah menengah pertama	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah menengah pertama	100%
	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun	

3. Pendidikan kesetaraan

Target Paendidikan Sekolah Menengah Pertama Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.4
Target pencapaian SPM Pendidikan Kesetaraan

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET
Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan kesetaraan dasar dan	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan kesetaraan dasar dan	100%

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET
kesetaraan dasar dan menengah pertama	menengah	
	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun	

4. Realisasi

Realisasi pencapaian Bidang pendidikan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

4.1 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada pendidikan anak usia dini :

4.2

Tabel.4.5

Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pendidikan anak usia dini

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI SEMESTER 1		REALISASI SEMESTER 2	
		Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Persentase anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan anak usia dini	100%	7.464	28.20%	8.655	33.20%
	Jumlah anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun		26.470		26.064	

4.3 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar.

4.3.1 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan Dasar sebagai berikut

Tabel 4.6
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Sekolah Dasar

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI SEMESTER 1		REALISASI SEMESTER 2	
		Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	100%	65.728	83.07%	65.437	80.04%
	Jumlah anak usia 7 tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun		79.125		81.755	

4.2.2 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan pada Sekolah

Menengah Pertama sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Sekolah Menengah Pertama

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI SEMESTER 1		REALISASI SEMESTER 2	
		Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Persentase anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan sekolah dasar	100%	28.814	77.60%	33.987	89.07%
	Jumlah anak usia 13 (tiga belas) tahun		37.131		38.154	

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI SEMESTER 1		REALISASI SEMESTER 2	
		Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
belajar disatuan pendidikan sekolah menengah pertama	sampai dengan 17 (tujuh belas) tahun					

4.3 Pencapaian pemenuhan SPM Pendidikan kesetaraan.

Pemenuhan SPM Pendidikan kesetaraan Pencapaian Kota Balikpapan Tahun 2021 Sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pencapaian Pemenuhan SPM Pendidikan Kesetaraan

INDIKATOR	ELEMEN DATA	TARGET	REALISASI SEMESTER 1		REALISASI SEMESTER 2	
		Persen	Jumlah	Persen	Jumlah	Persen
Persentase anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah atau tamat sedang belajar disatuan pendidikan kesetaraan dasar dan menengah pertama	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan pendidikan kesetaraan dasar dan menengah pertama	100%	3.183	2.17%	3.341	2.20%
	Jumlah anak usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun		146.449		151.738	

5 Alokasi Anggaran

Hingga akhir Desember tahun 2021 alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan yang mendukung penyelenggaraan SPM sebagai berikut :

Tabel. 4.9
Anggaran SPM Bidang Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2021			
		PAGU		REALISASI	
Program Pendidikan Anak Usia Dini		Rp	7,509,223,490.00	Rp	5,568,289,702
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Rp	162,630,240.00	Rp	144,116,902.00
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Rp	7,346,593,250.00	Rp	5,424,172,800.00
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar		Rp	73,339,974,003.00	Rp	65,222,423,446.54
1	Penambahan Ruang Kelas Baru	Rp	2,350,000,000.00	Rp	2,150,000,000.00
2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Rp	67,658,261,541.00	Rp	59,778,626,343.00
3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Rp	242,000,000.00	Rp	234,451,700.00
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp	3,089,712,462.00	Rp	3,059,345,403.54
Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama		Rp	62,469,259,000.00	Rp	49,738,379,106
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Rp	23,908,457,000.00	Rp	20,400,262,339.64
2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Rp	2,135,700,000.00	Rp	2,083,712,100.00
3	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Rp	294,964,000.00	Rp	249,358,155.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN 2021			
		PAGU		REALISASI	
4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Rp	140,375,000.00	Rp	119,953,325.00
5	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Rp	16,000,000,000.00	Rp	11,667,086,769.75
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Rp	19,989,763,000.00	Rp	15,218,006,416.55
Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan		Rp	13,669,856,788.00	Rp	12,916,059,299
1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Rp	3,897,606,788.00	Rp	3,350,871,245
2	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Rp	8,824,730,000.00	Rp	8,705,891,900
3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rp	947,520,000.00	Rp	859,296,154

6 Dukungan Personil

Dukungan Personil untuk Penerapan SPM Bidang Pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Dukungan Personil Urusan Bidang Pendidikan Kota Balikpapan Tahun 2021

NAMA JABATAN	ESELON	JML	GOL/PANGKAT				JML	DIKLAT STRUKTURAL				JML
			I	II	III	IV		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
STRUKTURAL												
Kepala Dinas	II/b	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1
Sekretaris	III/a	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1
Kepala Bagian/ Bidang	III/b	5	-	-	1	4	5	-	-	3	2	5

NAMA JABATAN	ESELON	JML	GOL/PANGKAT				JML	DIKLAT STRUKTURAL				JML
			I	II	III	IV		PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV	
Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi	IV/a	15	-	-	8	7	15	-	-	-	11	11
Pelaksana Disdik	-	35	1	18	16	-	35	-	-	-	-	-
Penjaga SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		35	1	18	16	-	35	-	-	-	-	-
TOTAL		57	1	18	25	13	57	-	1	4	13	18
FUNGSIONAL												
Pengawas TK, SD, SMP, SMA, SMK	-	46	-	-	-	46	46	-	-	-	-	-
Guru TK	-	7	-	-	5	2	7	-	-	-	-	-
Guru SD	-	1,131	-	3	718	410	1,131	-	-	-	-	-
Guru SMP	-	493	-	2	218	273	493	-	-	-	-	-
Pamong (UPTD SKB)	-	4	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-
TOTAL	-	1,681	-	5	943	733	1,681	-	-	-	-	-

7 Permasalahan dan Solusi

1. Pengelolaan PAUD

a. Pengumpulan data

Belum optimalnya pendataan by name by address, dan Adanya pandemi covid 19 dan kompetensi terhadap pengolahan data disatuan PAUD yang masih

kurang, sehingga pengumpulan data tidak tepat yang mengakibatkan perbedaan dengan data di dapodik

b. Penghitungan Kebutuhan

Kurangnya kompetensi terhadap pengolahan data disatuan PAUD yang mengakibatkan pengumpulan data tidak tepat sehingga penghitungan kebutuhan menjadi tidak tepat

c. Perencanaan dan Penganggaran

Terkait perencanaan dan penganggaran tidak ditemukan permasalahan yang berarti karena sudah bisa dipenuhi.

d. Pelaksanaan

Belum terdapat rencana aksi pencapaian SPM, ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi covid 19

e. Pelaporan

Belum optimalnya monitoring capaian SPM setiap Triwulan, belum optimalnya akses data/informasi ketercapaian SPM Pendidikan pada website/medsos OPD

f. Solusi

1. Mengoptimalkan pendataan by name by address;
2. Mengoptimalkan ketersediaan data; -
3. Tidak bergantung sepenuhnya pada keuangan daerah dalam pemenuhan SPM;
4. Memaksimalkan ketersediaan anggaran/SDM dalam pelaksanaan SPM;

5. Membuat rencana aksi pelaksanaan SPM;
6. Mengoptimalkan money setiap Triwulan; dan
7. Mengoptimalkan ketersediaan data/informasi capaian SPM pada website/medsos OPD

2. Pengelolaan Pendidikan SD

a. Pengumpulan Data

Tidak ada permasalahan karena data SPM melalui Google Form cepat dan valid setelah diverval

b. Penghitungan Kebutuhan

Tidak ada permasalahan dalam menghitung kebutuhan per sekolah dari SPM terkait buku, perlengkapan belajar, rombel, akreditasi

c. Perencanaan dan Penganggaran

Tidak ada permasalahan karena RKA setiap tahun mengakomodir SPM

d. Pelaksanaan

Permasalahan SPM SD hanya Tenaga didik yang masih banyak berstatus non PNS dan sarana prasarana Ruang Kelas belum sesuai rombongan belajar.

e. Solusi

Melakukan pemetaan SD yang belum memenuhi SPM dengan melakukan survei ke sekolah dan pendampingan pengisian Dapodik yang optimal kepada satuan pendidikan. Khusus PTK dipenuhi dengan tenaga honor

dan P3K. Sedangkan untuk pemenuhan sarpras ruang kelas dengan skala prioritas

3. Pengelolaan Pendidikan SMP

a. Pengumpulan Data

Keterlambatan sekolah dalam mengirimkan data dan data dari sekolah kurang valid.

b. Penghitungan Kebutuhan

Jumlah siswa atau pendidik yang berubah setiap saat karena adanya mutasi (penambahan dan pengurangan)

c. Perencanaan dan Penganggaran

Perencanaan dan penganggaran tidak sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan karena adanya perubahan data

d. Pelaksanaan

Kendala adanya perubahan data sehingga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan dan pelaksanaan mundur

e. Pelaporan

Keterlambatan laporan.

f. Solusi

Diperlukan anggaran perubahan untuk menyesuaikan dengan perubahan data

4. Pengelolaan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan

a. Pengumpulan Data

pengumpulan data masih dilakukan secara manual dan

ketidak sesuaian data laporan bulanan dengan sinkronisasi di dapodik

b. Penghitungan Kebutuhan

penghitungan kebutuhan tergantung dengan jumlah data yang direkap oleh lembaga yang dilakukan secara manual sehingga penghitungan data masih tidak tepat

c. Perencanaan dan Penganggaran

Terkait perencanaan dan penganggaran tidak ditemukan permasalahan yang berarti karena sudah bisa dipenuhi

d. Pelaksanaan

Terkait perencanaan dan penganggaran tidak ditemukan permasalahan yang berarti karena sudah bisa dipenuhi

e. Pelaporan

Ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan pandemi covid 19.

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berikut adalah jenis pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019:

Tabel 4.11
Jenis layanan standar pelayanan minimal Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Sesuai standar pelayanan antenatal	Ibu Hamil	Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Sesuai standar pelayanan persalinan	Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Sesuai standar pelayanan kesehatan bayi baru lahir Bayi	bayi baru lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan
4	Pelayanan kesehatan balita	sesuai standar pelayanan kesehatan balita	Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Sesuai standar skrining kesehatan usia pendidikan dasar	Anak pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Sesuai standar skrining kesehatan usia produktif	Warga Negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Sesuai standar skrining kesehatan usia lanjut	Warga Negara Indonesia usia 60 tahun ke atas.	setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Penderita hipertensi	setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standa
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Sesuai standar pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Penderita Diabetes Melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	MUTU LAYANAN DASAR	PENERIMA LAYANAN DASAR	STANDAR PELAYANAN
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Sesuai standar pelayanan kesehatan jiwa.	Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Sesuai standar pelayanan kesehatan tuberculosis	orang dengan TB	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Sesuai standar mendapatkan pemeriksaan HIV	Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

Penerima Pelayanan Dasar dan Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel.4.12
Target Capaian SPM Bidang Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Setiap Warga Negara penderita hipertensi yang mendaplayanan kesehatan	100%	Setiap Tahun
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	100%	Setiap Tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 4.13

Pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	$\frac{10.633}{10.999} \times 100$	96.67%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{10.148}{10.494} \times 100$	96.70%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{10.062}{9.999} \times 100$	100.63%
4	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	$\frac{41.451}{49.689} \times 100$	83.42%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Setiap anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{31.972}{58.919} \times 100$	54.26%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Setiap warga negara Indonesia usia 15 s.d. 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	$\frac{175.414}{439.124} \times 100$	39.95%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	setiap warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.	$\frac{24.104}{58.063} \times 100$	41.51%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{38.722}{184.755} \times 100$	20.96%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{9.633}{17.103} \times 100$	56.32%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	$\frac{522}{707} \times 100$	73.83%
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	$\frac{4.058}{13.598} \times 100$	29.84%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar	$\frac{11.887}{17.409} \times 100$	97.77%

Rincian Pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan di Kota Balikpapan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 4.14

Indikator Pencapaian SPM bidang urusan Kesehatan.

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
1 .	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	10,999	10,633	366
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
1	Buku KIA	10,999	10,633	366
2	Tablet Tambah Darah	10,999	10,633	366
3	Vaksin Tetanus Difetri (Td)	10,999	10,633	366
4	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu	10,999	10,633	366
5	Alat Deteksi Resiko Ibu Hamil * Test Kehamilan * Pemeriksaan HB * Pemeriksaan Golongan Darah * Pemeriksaan Glukoprotein Urin	10,999	10,633	366
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan		

NO		INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
		• Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
			10,494	10,148	346
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
1		Kartu Ibu (Rekam Medis Ibu)	10,494	10,148	346
2		Buku KIA	10,494	10,148	346
3		Formulir Fotograf	10,494	10,148	346
3		Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan		
		• Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
			9,999	10,062	0
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
1		Vaksin Hepatitis BO	9,999	10,062	100%
2		Vitamin K1 Injeksi	9,999	10,062	0
3		Salep/Tetes Mata Antibiotik	9,999	10,062	0
4		Formulir Bayi Baru Lahir	9,999	10,062	0
5		Formulir MTBM	9,999	10,062	0
6		Buku KIA	9,999	10,062	0
4		Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan		
		• Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
			49,689	41,451	8,238
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
1		Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standart lain yang berlaku	49,689	41,451	8,238
2		Formulir DDTK	49,689	41,451	8,238
3		Buku KIA	49,689	41,451	8,238
4		Vitamin A Biru	49,689	41,451	8,238
5		Vitamin A Merah	49,689	41,451	8,238

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
6	Vaksin Imunisasi Lanjutan : * DPT -HB - Hib * Campak Rubella	49,689	41,451	8,238
7	Jarum Suntik dan BHP	49,689	41,451	8,238
8	Peralatan Anafilaktik	49,689	41,451	8,238
9	Vaksin Imunisasi Dasar: * HBO * BCG * Polio * IPV * DPT -HB - Hib * Campak Rubell	49,689	41,451	8,238
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga negara usia pendidikan dasar yang mendapat layanan kesehatan		
• Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
		58,919	31,972	26,947
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
1	Buku Raport Sehatanku	58,919	31,972	26,947
2	Buku Pemantauan Kesehatan	58,919	31,972	26,947
3	Kuesioner Skrining Kesehatan	58,919	31,972	26,947
4	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	58,919	31,972	26,947
5	Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah	58,919	31,972	26,947
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan		
• Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
		439,124	175,414	263710
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	jumlah yang belum terlayani
1	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	439,124	175,414	263710

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
2	Pedoman dan Media KIE * Alat Ukur Berat Badan * Alat Ukur Tinggi Badan * Alat Ukur Lingkar Perut * Tensimeter * Glukometer * Tes Strip Gula Darah * Lancet * Kapas Alkohol * KIT IVA Tes	439,124	175,414	263710
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan		
• Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
		58,063	24,104	33959
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	jumlah yang belum terlayani
1	Strip Uji Pemeriksaan * Gula Darah * Kolesterol	58,063	24,104	33,959
2	Buku Kesehatan Lansia	58,063	24,104	33,959
3	Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	58,063	24,104	33,959
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan		
• Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
		184,755	38,722	146,033
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	jumlah yang belum terlayani
1	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE	184,755	38,722	146,033
2	Tensimeter	184,755	38,722	146,033
3	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	184,755	38,722	146,033

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara Penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan layanan kesehatan		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
		17,103	9,633	7470
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	jumlah yang belum terlayani
1	* Glukometer * Strip Tes Gula Darah * Kapas Alkohol * Lancet	17,103	9,633	7470
2	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM	17,103	9,633	7470
3	Pedoman dan Media KIE	17,103	9,633	7470
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara Dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) yang terlayani Kesehatan		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
		707	522	185
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	jumlah yang belum terlayani
1	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	707	522	185
2	Kit Berisi 2 Alat Fiksasi	707	522	185
3	Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan	707	522	185
4	Media KIE	707	522	185
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan		

NO		INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
		• Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	jumlah total yang belum Terlayani
			13,598	4,058	9540
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	jumlah t yang belum Terlayani
1		Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	13,598	4,058	9540
2		Reagen Zn TB	13,598	4,058	9540
3		Masker Jenis Rumah Tangga dan Masker N95	13,598	4,058	9540
4		Catridge Tes Cepat Molekuler	13,598	4,058	9540
5		Formulir Pencatatan dan Pelaporan	13,598	4,058	9540
6		Pedoman/Standar Operasional Prosedur	13,598	4,058	9540
7		Pot Dahak, Kaca Slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/ Bunsen, Ose/Lidi), Rak Pengering	13,598	4,058	9540
12		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Jumlah Warga Negara Dengan Risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan Layanan Kesehatan		
		• Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani
			17,409	13,887	3,522
			Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
1		Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	17,409	13,887	3,522
2		Tes Cepat HIV (RDT) Pertama	17,409	13,887	3,522

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
3	Bahan Medis Habis Pakai * Handschoen * Alkohol Swab * Plester * Lancet/ Jarum Steril * Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan jarum sesuai *Alat tulis * Rekam Medis yang berisi Nomor Rekam Medis, Nomor Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pelaksana, Nomor KTP/NIK	17,409	13,887	3,522

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Kesehatan antara lain:

Tabel 4.15

Pembiayaan Program/Kegiatan SPM Kesehatan Tahun 2021

NO	INDKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	ANGGARAN 2021	
		PAGU	REALISASI
1	Pengelolaan pelayanan Ibu hamil	Rp 1.099.681.700	Rp 471.392.125
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Rp 1.403.813.000	Rp 480.602.700
3	Pengelolaan Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Rp 230.589.950	Rp 136.592.300
4	Pengelolaan Pelayanan kesehatan balita	Rp 1.008.116.950	Rp 583.660.570
5	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Rp 487.399.400	Rp 214.716.600
6	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Rp 186.161.000	Rp 66.607.500

NO	INDKATOR KINERJA/ JENIS LAYANAN SPM	ANGGARAN 2021	
		PAGU	REALISASI
7	Pengelolaan Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Rp 705.365.000	Rp 364.399.000
8	Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Rp 194.905.500	Rp 41.352.500
9	Pengelolaan Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Rp 47.159.750	Rp 25.511.200
10	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat	Rp 166.725.000	Rp 70.705.000
11	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis	Rp 637.677.250	Rp 418.637
12	Pengelolaan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Rp 382.077.946	Rp 223.468

5. Dukungan Personil

Tabel. 4.16

Dukungan Personil

NO	URAIAN	NAMA PEJABAT
1	Kepala Dinas	dr.Andi Sri Julyarti, M.Kes
2	Sekretaris Dinas	Dra Alwiati
3	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	dr Elizabet Rassi
4	Kepala Bidang Pencegahan dan pengendalian Penyakit	drg Ahmad Jais
5	Plt.Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan	Drg.Wuryansari
6	Plt Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Rinda Setiawati,SKM

NO	URAIAN	NAMA PEJABAT
7	UPT Puskesmas Teritip	dr.Umi Sartika
8	UPT Puskesmas Lamaru	drg.Rudi Raharjo
9	UPT Puskesmas Manggar Baru	dr.Ronni Nente
10	UPT Puskesmas Manggar	drg.Ida Kurniati
11	UPT Puskesmas Sepinggan	drg.Sulastri
12	UPT Puskesmas Damai	drg Sekar Dianing
13	UPT Puskesmas Gunung Bahagia	Sulaiman, SKM
14	UPT Puskesmas Klandasan Ilir	drg.Sri Mulyati
15	UPT Puskesmas Telaga Sari	dr.Rusna Azizah
16	UPT Puskesmas Prapatan	dr.Tien Fatimatuhzahra
17	UPT Puskesmas Mekar Sari	drg.Lily Anggraini
18	UPT Puskesmas Gunung Sari Ilir	drg.Titing Wardani
19	UPT Puskesmas Gunung Sari Ulu	drg.Farida
20	UPT Puskesmas Karang Rejo	dr.Nurina Ani
21	UPT Puskesmas Sumber Rejo	drg.Ida Higiawati
22	UPT Puskesmas Karang Jati	drg Niken Anggraini
23	UPT Puskesmas Muara Rapak	Fahmi Rosadi
24	UPT Puskesmas Gunung Samarinda	drg Sulis
25	UPT Puskesmas Batu Ampar	drg Nurlin
26	UPT Puskesmas Graha Indah	dr Desy Cristiani
27	UPT Puskesmas Karang Joang	dr.Agus Jiwani
28	UPT Puskesmas Baru Ilir	dr.Erika Sembiring
29	UPT Puskesmas Margasari	dr.Susliani
30	UPT Puskesmas Baru Tengah	drg Rulida Osma
31	UPT Puskesmas Margo Mulyo	Dina Savitri
32	UPT Puskesmas Baru Ulu	dr.James Kalengkongan
33	UPT Puskesmas Kariangau	dr.Mira
34	RSKD	
35	RS Tentara	
36	RS Bhayangkara	
37	Rs Pertamina	
38	RSUD Beriman	
39	RS Restu Ibu	
40	RS Siloam	

NO	URAIAN	NAMA PEJABAT
41	RS Hermina	
42	RS Balikpapan Baru	
43	Kantor Kesehatan Pelabuhan	
44	Rutan	
45	Lapas	
46	RS Sayang Ibu	

6. Permasalahan dan Solusi

a. Pengumpulan Data

Tidak ada SDM pengumpul data, Penghitungan Kebutuhan belum disesuaikan dengan jumlah sasaran, misalnya kebutuhan alat penunjang pemeriksaan,

b. Penghitungan Kebutuhan

Penghitungan Kebutuhan belum disesuaikan dengan jumlah sasaran, misalnya kebutuhan alat penunjang pemeriksaan.

c. Perencanaan Dan Penganggaran

Perencanaan program belum dirumuskan oleh bidang perencanaan sesuai hasil analisa data dan penganggaran belum sesuai dengan penghitungan kebutuhan program

d. Pelaksanaan

Pelaksanaan program tidak optimal karena Beban kerja SDM overload

e. Pelaporan

Pelaporan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan sering kurang ada koordinasi dengan lintas program terkait dan pemahaman DO yang masih kurang

f. Solusi

1. Pemenuhan SDM sesuai kebutuhan (Dinkes)
2. Analisa beban kerja untuk pelaksana di lapangan (PKM)
3. Mengembalikan Tupoksi petugas di lapangan (PKM)
4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala oleh bidang perencanaan

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bahwa jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Pekerjaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan terdiri dari :

- 1) Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari;
- 2) Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang lingkungan hidup secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.

a. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-Hari

Pengukuran SPM Sub Bidang Air Minum adalah persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota.

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah Rumah Tangga Terlayani}}{\text{Jumlah Rumah Tangga di Kabupaten/Kota}} \times 100$$

b. Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya.

Capaian SPM

$$= \frac{\text{Jumlah Rumah Yang Memiliki Akses Pengolahan Berupa Cubluk Atau Tangki Septik}}{\text{Jumlah Rumah di Wilayah Pengembangan SPALDS Dengan Kepadatan Penduduk Pada Wil. Terbangun < 25 jiwa/Ha}} \times 100$$

Adapun jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.17

Target Pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100%	Setiap Tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestic	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Capaian SPM Pekerjaan Umum di Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1 Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari:

Tabel. 4.18

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT
I	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Kebutuhan pokok Air Minum Sehari Hari

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani
	Jumlah yang Harus Dilayani :	704,110	550,185	153,925
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani
1	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	704,110	550,185	153,925
2	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	0	0	0
CAPAIAN SPM		78.14%		

Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Pemenuhan Kebutuhan Air Minum Sehari-hari Kota Balikpapan tahun 2021 adalah 78.14%.

3.2 Realisasi Capaian SPM Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik.

Realisasi capaian SPM Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik Kota Balikpapan Tahun 2021 Sebagai berikut:

Tabel 4.19

Indikator Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Penyediaan Pelayanan Air Limbah Domestik Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	232.370 Rumah Tangga x 1 Rumah Tangga (Asumsi 3 Jiwa) = 697.110 Jiwa	188.685 Rumah Tangga x 1 Rumah Tangga (3 Jiwa) = 566.055 Jiwa	43.685 Rumah Tangga x 1 Rumah Tangga (3 Jiwa) = 131.005 Jiwa
		Jumlah warga negara yang berhak mendapat layanan	Jumlah warga negara yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
1		Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T dengan kualitas pelayanan akses aman penerima : masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-T	232.370 Rumah Tangga x 1 Rumah Tangga (Asumsi 3 Jiwa) = 697.110 Jiwa	Pelayanan Penyediaan prasarana dan /atau jasa melalui SPALD-T, 4939 SR/Rumah Tangga x (Asumsi 4 Jiwa) = 19.756 Jiwa
2	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas Pelayanan Akses dasar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan dan memiliki kepadatan penduduk lebih kecil dari 25 jiwa/ha	0	0	0
3	Pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses aman bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pengembangan SPALD-S dengan kondisi wilayah pedesaan yang memiliki kepadatan penduduk lebih besar dari 25 jiwa/ha dan seluruh wilayah perkotaan	0	0	0

4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.20

Alokasi Anggaran Tahun 2021

NO	INDKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	ANGGARAN 2021	
		PAGU	REALISASI
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Rp 18,746,868,000.00	Rp 16,836,961,667.08
1.1	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Rp 14,816,868,000.00	Rp 13,481,408,357.68
1.2	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan perkotaan	Rp 3,930,000,000.00	Rp 3,355,553,309.40
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1,853,467,000	Rp 1,853,467,000
2.1	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	Rp 1,853,467,000	Rp 1,853,467,000

5. Dukungan Personil

Tabel 4.21

Dukungan Personil

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	GOL/PANGKAT				JUMLAH
			I	II	III	IV	
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	1	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	2	-	-	1	1	2

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	GOL/PANGKAT				JUMLAH
			I	II	III	IV	
4	Kepala Seksi	10	-	-	10	-	10
5	Kepala Sub Bagian/Sub Koordinator	3	-	-	3	-	3
6	Kepala UPTD Perawatan Jalan Jembatan	1	-	-	1	-	1
7	Kepala Sub TU UPTD Perawatan Jalan Jembatan	1	-	-	1	-	1
8	Staff Pelaksana	43	5	23	15	-	43
9	Staff Pelaksana Bid. Air Minum (Non PNS)	7	-	-	-	-	7

Dukungan personil SPM pekerjaan umum pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari Dan untuk bidang urusan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota personil atau pegawai berjumlah 69 personil.

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

Masih belum adanya pendataan masyarakat by name by adres

b. Solusi

Dilakukan pendataan secara menyeluruh kepada masyarakat berdasarkan by name by adres

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Pelayanan dasar bidang perumahan rakyat merupakan jenis pelayanan publik yang mendasar agar masyarakat mampu menghuni rumah layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Maka jenis Pelayanan Dasar SPM Bidang Perumahan Rakyat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan terdiri dari :

- 1) Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota;
- 2) Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Adapun batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang Perumahan Rakyat secara bertahap sesuai dengan indikator-indikator yang ditetapkan.

1. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota.

Penyediaan rumah merupakan kegiatan menyediakan unit rumah yang memenuhi kriteria layak huni dilaksanakan melalui pembangunan baru dan/atau pembangunan kembali rumah. Pembangunan baru dalam kegiatan ini merupakan pembangunan rumah layak huni bagi korban bencana alam yang harus direlokasi ke lokasi baru yang aman dari bencana.

Adapun cara penghitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun } n}{\text{Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun } n} \times 100$$

2. Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Relokasi perumahan daerah rawan bencana dalam hal ini dapat dilakukan apabila ada Surat Penetapan Bupati/Walikota bahwa daerah tersebut tidak layak untuk perumahan. Rumah Susun Umum adalah rumah susun yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Rumah khusus adalah rumah yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan khusus. Penyediaan rumah khusus adalah pembangunan rumah khusus yang berbentuk rumah tunggal dan/atau rumah deret dengan tipologi berupa rumah tapak atau rumah panggung yang dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas umum. Adapun rumus perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Capaian SPM} = \frac{\text{Rumah Tangga Penerima Fasilitas Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Total Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang Memenuhi Kriteria Penerima Pelayanan}} \times 100$$

Jenis pelayanan, indikator, dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat di Kota Balikpapan adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 4.22

Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	Setiap Tahun

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel.4.23

Realisasi Pencapaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Yang Berhak Memperoleh Rumah Layak Huni		
	• Jumlah yang Harus Dilayani :	jumlah total yang harus dilayani 17 unit rumah	jumlah total yang Terlayani 12 unit rumah	yang belum Terlayani 5 Unit rumah
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang Terlayani	yang belum Terlayani
1.1	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	5	1	4
1.2	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	12	11	1
1.3	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	0	0	0
1.4	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana.	0	0	0

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN / OUTPUT		
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni		
• Jumlah yang Harus Dilayani :		jumlah total yang harus dilayani N/A	jumlah total yang Terlayani N/A	yang belum Terlayani N/A
		jumlah total yang harus dilayani N/A	jumlah total yang Terlayani N/A	yang belum Terlayani N/A
2.1	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan	N/A	N/A	N/A
2.2	Subsidi Uang Sewa	N/A	N/A	N/A
2.3	Penyediaan Rumah Layak Huni	N/A	N/A	N/A

Tabel.4.24

Realisasi SPM Urusan Perumahan Rakyat Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN	CAPAIAN
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	$\frac{17}{12} \times 100\%$	70.59%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	$\frac{0}{0} \times 100\%$	Tidak ada masyarakat yang terkena relokasi

4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat antara lain:

Tabel.4.25

Alokasi Anggaran Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2021

NO	INDKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	ANGGARAN 2021	
		PAGU	REALISASI
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Rp 385,000,000.00	Rp 385,000,000.00
A	Belanja jasa untuk tenaga ahli untuk penyusunan bidang SPM	Rp 100,000,00.00	Rp 100,000,00.00
B	Koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan	Rp 285,000,000.00	Rp 285,000,000.00

5. Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat didinas Perumahan dan kawasan permukiman Kota Balikpapan sebagai berikut:

Tabel 4.26

Dukungan Personil

No	INDIKATOR PELAYANAN	DUKUNGAN PERSONIL		
		PNS	NON PNS	TOTAL
1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	3	1	4
2	Sosialisasi dan persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	3	1	4
3	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau relokasi Program Kabupaten/kota	3	1	4
4	pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program/kota	3	1	4
5	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	2	1	3
Jumlah		19		

6. Permasalahan dan Solusi

Belum tersedianya data acuan sebagai dasar pembangunan rumah Kegiatan, dan baru diadakan pada TA. 2022, dengan Penyediaan APBD Kota.

E. BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, bahwa Jenis Pelayanan Dasar Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari 5 (lima) Jenis Pelayanan Dasar, terdiri dari:

- 1) Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran.

Di Kota Balikpapan pengampu SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Sedangkan pengampu SPM Sub Urusan Kebakaran dan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

1. Jenis Pelayanan Dasar.

Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

Tabel 4.27

Target Pencapaian SPM oleh Daerah.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara	100%	Setiap Tahun
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	Setiap Tahun
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Setiap Tahun
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Setiap Tahun
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

Realisasi Pelayanan SPM Bidang ketentraman dan ketertiban Umum kota Balikpapan Tahun 2021 sebagai berikut:

- a. **Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum sebagai berikut:**

Tabel 4.28

Realisasi Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN		
1 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi		
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
		0	0	0
	OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
a	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian materil	0	0	0
b	warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0
2 .	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda Sesuai Mutu	Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu		
		jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	jumlah total yang belum terlayani
		3,443	3,443	100%
	OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
a	Penegakan Perda sesuai SOP	771	771	100%
b	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan	8.432	8.432	100%

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN		
	standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar			
c	Pelaksanaan penegakan Perda menggunakan Sarpras sesuai standar	1.125	1.125	100%

b. Pelayanan informasi rawan bencana sebagai berikut:

Tabel 4.29

Realisasi Pelayanan informasi rawan bencana

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	Persentase capaian
		550 Jiwa	950 Jiwa	172,13%
	OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	capaian capaian
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	38883 titik	38883 titik	100%
2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	2666 Jiwa	2666 Jiwa	100%
3	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	2666 jiwa	2666 jiwa	100%
4	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
5	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	6 buah / lokasi	6 buah / lokasi	100%

c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai berikut:

Tabel. 4.30

Realisasi Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

NO	INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN		
4	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	950 Jiwa	950 Jiwa	100%
OUTPUT		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani
a	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	950 Jiwa	950 jiwa	100%

d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sebagai berikut:

Tabel 4.31

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	Persentase Capaian
		1058 Jiwa	1058 Jiwa	100%
	OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	23 Jiwa	23 Jiwa	100%
2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	1058 Jiwa	1058 Jiwa	100%
3	Melakukan respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) dan respon cepat darurat bencana	116 Kejadian	116 Kejadian	100%
4	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	116 Kejadian	116 Kejadian	100%
5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	4 Jiwa	4 Jiwa	100%
6	Respon cepat Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	38328 jiwa	38328 jiwa	100%

e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran sebagai berikut;

Tabel. 2.32

Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	jumlah total yang harus dilayani	jumlah total yang terlayani	Persentase Capaian
		56 Kejadian	56 Kejadian	100%
	OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Capaian

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Indikator Pencapaian		
1	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	1058 Jiwa	1058 Jiwa	100%
2	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	56 Kegiatan	56 Kegiatan	100%

Tabel 4.33

Realisasi Realisasi Pelayanan SPM Bidang ketentraman dan ketertiban Umum kota Balikpapan Tahun 2021.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	$\frac{8972}{9557} \times 100$	93.88 %
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	$\frac{950}{550} \times 100$	172.73%
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan	$\frac{950}{950} \times 100$	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN
		terhadap bencana		
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	$\frac{1058}{1058} \times 100$	100%
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	$\frac{56}{56} \times 100$	100%

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pelayanan SPM Bidang ketenteraman dan ketertiban Umum kota Balikpapan Tahun 2021 sebagai berikut;

Tabel 4.34

Alokasi Anggaran Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum

NO	PROGRAM / JENIS LAYANAN SPM	ANGGARAN 2021	
		PAGU	REALISASI S/D DESEMBER
1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5,013,399,492	Rp.4,321,350,933
a	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Rp2,193,548,000	Rp1,962,826,660

NO	PROGRAM / JENIS LAYANAN SPM	ANGGARAN 2021	
		PAGU	REALISASI S/D DESEMBER
b	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Rp2,319,651,492	Rp1,918,832,273
c	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 500,200,000	Rp 439,692,000
d	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Rp 76,436,000	Rp 70,406,000
e	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 26,300,000	Rp 25,733,500
2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp. 83,640,000	Rp. 46,155,000
a	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 2,240,000	Rp 2,150,000
b	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Rp 81,400,000	Rp 44,005,000
3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rp 37,018,000	Rp 34,188,100
a	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Rp 37,018,000	Rp 34,188,100

Tabel 4.35
Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibum Badan
Penanggulangan Bencana Daerah

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran 2021	
		Pagu	Realisasi
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 78.562.000,00
a	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Rp 80.000.000	Rp 78.562.000,00
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Rp 1.801.565.300	Rp 1.578.213.785,00
a	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Rp 269.916.000	Rp 228.722.016,00
b	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Rp 1.249.649.300	Rp 1.077.654.111,00
c	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Rp 250.000.000	Rp 243.810.758
d	Penguatan Kapasitas Kawasan Untuk Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	Rp 32.000.000	Rp 28.026.900
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Rp 1.617.540.000	Rp 1.430.795.800
a	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit	Rp 717.540.000	Rp 646.531.550
b	Penyediaan Logistik Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Rp 900.000.000	Rp 784.264.250
4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Rp 175.000.000	Rp 172.437.000
a	Kerjasama Antar Lembaga Dan Mitraan Dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Rp 175.000.000	Rp 172.437.000
b	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.943.455.312	Rp 4.590.394.622
5	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, Dan	Rp 4.943.455.312	Rp 4.590.394.622

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran 2021	
		Pagu	Realisasi
	Penanganan Bahan Berbahaya Dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota		
6	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	Rp 725.850.000	Rp 378.140.995
a	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi Dan Edukasi Masyarakat	Rp 725.850.000	Rp 378.140.995
7	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 19.940.148.150	Rp 19.186.058.658
a	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Rp 19.940.148.150	Rp 19.186.058.658
8	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 650.000.000	Rp 632.146.900
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Rp 650.000.000	Rp 632.146.900
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 699.971.800	Rp 688.748.954
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp 9.995.500	Rp 9.872.500
b	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Rp 109.977.000	Rp 108.089.300
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 134.999.300	Rp 153.470.770
d	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	Rp 60.000.000	Rp 39.239.750
e	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 25.000.000	Rp 18.296.700
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd	Rp 360.000.000	Rp 359.779.934
10	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 634.999.996	Rp 522.428.900
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rp 399.999.996	Rp 300.824.529
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 235.000.000	Rp 221.604.371
11	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 3.605.000.000	Rp 3.479.223.565

No	Indikator Kinerja / Jenis Layanan SPM	Anggaran 2021	
		Pagu	Realisasi
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp 2.585.000.000	Rp 2.468.611.264
b	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp 1.020.000.000	Rp 1.010.612.301

5. Dukungan Personil

Adapun jumlah personil yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Balikpapan Tahun 2021 adalah 233 orang yang terdiri dari Laki-laki 198 orang dan perempuan 35 orang, dari keseluruhan jumlah pegawai PNS dan Non PNS 55 orang.

Tabel. 4.36
Dukungan Personil Untuk Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Trantibumlinmas

NO	NAMA JABATAN	GOL/PANGKAT				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Kepala Satuan				1	1
2	Sekretaris				1	1
3	Kepala Bagian/ Bidang				3	3
4	Kepala Sub Bagian/ Kepala Sub Bidang/ Kepala Seksi			9		9
5	Staf	2	172	3		177
6	NABAN/BANPOL					55

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban masyarakat antara lain :

1. Pelayanan ketenteraman dan ketertiban Umum.

Permasalahan:

- a. Jumlah Personil dalam melakukan pelayanan masih kurang.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Solusi.
- c. kebutuhan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas operasional Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/ instansi terkait.

Solusi:

- a. Diperlukan Penambahan personil Satpol PP yang berkompeten.
- b. Mengusulkan penambahan anggaran ke Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan.
- c. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.

2. Pelayanan informasi rawan bencana.

- a. Pengumpulan data

Data selalu berubah karena tidak semua penduduk yang tinggal dikawasan rawan bencana ber KTP Balikpapan

dari segi lokasi bencana bisa mengalami perubahan setiap tahun

b. Penghitungan kebutuhan

Pendataan lokasi bencana dan jumlah penduduk tidak dilakukan setiap tahun sehingga ada selisih data

c. Perencanaan dan penganggaran

Alokasi anggaran yang tersedia tidak mampu untuk menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat rutin setiap tahun untuk semua orang yang berada di lokasi rawan bencana.

d. Pelaksanaan

Tahun 2021 masa pandemi covid-19 sehingga ada pembatasan terkait sosialisasi dan edukasi secara tatap muka

e. Pelaporan

Kurangnya data pendukung dari bidang sehingga sulit dalam membuat laporan capaian SPM.

f. Solusi

Jumlah masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana mendapatkan sosialisasi tidak setiap tahun, melakukan pendataan setiap tahun, melakukan pendataan setiap tahun update lokasi dan jumlah warga yang tinggal di kawasan rawan bencana.

3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.

g. Pengumpulan data

Data penduduk yang harus mendapat sosialisasi selalu berubah ubah

h. Penghitungan kebutuhan

Dalam pendataan hanya berdasarkan warga yang ber KTP Balikpapan sehingga warga yang tidak ber KTP Balikpapan tidak terdata.

i. Perencanaan dan penganggaran

Target tahun 2021 lebih kecil karena alokasi anggaran masih fokus pada penanganan covid-19

j. Pelaksanaan

Masih kurang minatnya warga untuk datang ke tempat pelatihan dan simulasi kebencanaan

k. Pelaporan

Kegiatan dan pencegahan dan kesiapsiagaan yang non anggaran tidak ikut dilaporkan padahal ini mampu mendongkrak jumlah kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan.

l. Solusi

Kegiatan yang dilaksanakan non anggaran juga dilaporkan.

4. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

m. Pengumpulan data

Data kejadian bencana setiap tahun sulit diprediksi

n. Penghitungan kebutuhan

Sulit dalam menentukan target tahunan

o. Perencanaan dan penganggaran

Anggaran hanya berbasis data kejadian sebelumnya.

p. Pelaksanaan

Keberhasilan kegiatan ini sangat ditentukan kapasitas dan kualitas personil lapangan.

q. Solusi

Sertifikasi keahlian petugas penanggulangan bencana perlu ditingkatkan.

5. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

r. Pengumpulan data

Jumlah kejadian kebakaran diprediksikan

s. Penghitungan kebutuhan

Sulit dalam menentukan target tahunan

t. Perencanaan dan penganggaran

Anggaran hanya berbasis data kejadian sebelumnya

u. Pelaksanaan

Respon time dalam penanganan kebakaran harus selalu ditingkatkan

v. Solusi

Perlu adanya penambahan jumlah pos pemadam agar semua wilayah masuk dalam kawasan WMK (Wilayah Manajemen).

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM bidang sosial di daerah kabupaten/kota terdiri atas :

- 1) Rehabilitasi sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di luar panti:
- 2) Rehabilitasi sosial dasar Anak Terlantar di luar panti:
- 3) Rehabilitasi sosial dasar Lanjut Usia Terlantar di luar panti:
- 4) Rehabilitasi sosial dasar Tuna Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di luar panti:
- 5) Perlindungan dan Jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target pencapaian SPM oleh daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 adalah 100% (seratus persen) selama 1 (satu) tahun anggaran.

Tabel. 4.37

Target Pencapaian SPM Urusan Sosial oleh Daerah.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	TARGET CAPAIAN	BATAS WAKTU CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	Setiap Tahun
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	100%	Setiap Tahun

3. Realisasi

3.1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial.

Tabel 4.38

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah total yang belum terlayani	capaian %
OUTPUT	69	31	38	44.93%
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan	0	0	0	0%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
baru				
Penyediaan permakanan	32	32	0	100%
Penyediaan sandang	2	2	0	100%
Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan social	0	0	0	0%
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	0	0	0	0%
Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%
Layanan rujukan	0	0	0	0%
Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0%
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki	0	0	0	0%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti				

3.2 Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti,

Capaian Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti kota Balikpapan Tahun 2021 sebagai berikut;

Tabel 4.39

Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
Jumlah yang harus dilayani	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah total yang belum terlayani	capaian %
	22	7	15	31.82%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
Penyediaan permakanan	10	2	8	20%
Penyediaan sandang	4	0	4	0%
Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan social	0	0	0	0%
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas anak terlantar	0	0	0	0%
Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	4	2	2	50%
Layanan rujukan	4	3	1	75%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%
Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0%

3.3 Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti

Tabel. 4.40

Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti			
Jumlah yang harus dilayani	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah total yang belum terlayani	capaian %
	122	122	0	100%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Layanan data dan pengaduan	170	62	108	36.47%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	0	0	0	0%
Penyediaan permakanan	232	62	170	26.72%
Penyediaan sandang	102	42	60	41.17%
Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan social	0	0	0	0%
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas lanjut usia terlantar	0	0	0	0%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	22	12	10	54.54%
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	52	42	10	80.77%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	7	2	5	28.57%
Layanan rujukan	19	9	10	47.36%

3.4 Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti,

Capaian Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti pemerintah kota Balikpapan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 4.41

Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah warga negara/ Gelandangan dan Pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di Luar Panti Sosial			
Jumlah yang harus dilayani	Jumlah total yang harus dilayani	Jumlah total yang terlayani	Jumlah total yang belum terlayani	capaian %
	24	0	24	0.00%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan	0	0	0	0%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
kendaraan baru				
Penyediaan permakanaan	0	0	0	0%
Penyediaan sandang	0	0	0	0%
Penyediaan alat bantu	0	0	0	0%
Penyediaan perbekalan kesehatan	0	0	0	0%
Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual dan sosial	0	0	0	0%
Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas gelandangan dan pengemis terlantar	0	0	0	0%
Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan/atau Kartu Identitas Anak	0	0	0	0%
Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	0	0	0	0%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	0	0	0	0%
Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	0	0	0	0%

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Layanan rujukan	0	0	0	0%
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	0	0	0	0%
Layanan data dan pengaduan	0	0	0	0%
Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar panti	0	0	0	0%

3.5 Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota.

Tabel. 4. 42

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana kab/kota

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial			
Jumlah yang harus dilayani	Jumlah total yang harus	Jumlah total yang terlayani	Jumlah total yang belum terlayani	capaian %

INDIKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	INDIKATOR PENCAPAIAN			
	dilayani			
	305	1219	+914	399.67%
OUTPUT	Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	capaian %
Penyediaan permakanaan	305	442	+137	144.92%
Penyediaan sandang	305	442	+137	0%
Penyediaan tempat penampungan pengungsi	0	0	0	0%
Penanganan khusus bagi kelompok rentan	0	0	0	0%
Pelayanan dukungan psikososial	0	0	0	0%

Capaian pelayanan SPM Bidang Sosial pemerintah kota

Balikpapan Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel. 4.43

Realisasi Pencapaian SPM Bidang Sosial Kota Balikpapan Tahun 2021

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	$\frac{31}{69} \times 100$	44.93%
2	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	$\frac{7}{22} \times 100$	31.82%
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	$\frac{122}{122} \times 100$	100%

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDIKATOR PELAYANAN	PERHITUNGAN CAPAIAN	CAPAIAN
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	$\frac{0}{24} \times 100$	0.0%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagi korban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan social	$\frac{1219}{305} \times 100$	399.67%

4. Alokasi Anggaran

Tabel 4.44
Alokasi Anggaran SPM Urusan Sosial Tahun 2021

NO	INDKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	ANGGARAN 2021	
		PAGU	REALISASI
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial	Rp 363,182,362.00	Rp 230,054,622.00
a	Penyediaan permakanan	Rp 218,600,000.00	Rp 164,653,358.00
b	Penyediaan sandang	Rp 19,582,362.00	Rp 15,401,264.00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial	Rp 155,373,375.00	Rp 23,715,750.00
a	Penyediaan permakanan	Rp 133,840,000.00	Rp 3,750,000.00
b	Penyediaan sandang	Rp 21,397,375.00	Rp 19,965,750.00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial	Rp 103,751,102.00	Rp 101,803,402.00

NO	INDKATOR KINERJA / JENIS LAYANAN SPM	ANGGARAN 2021	
		PAGU	REALISASI
a	Penyediaan permakanan	Rp 86,004,902.00	Rp 84,294,902.00
b	Penyediaan sandang	Rp 17,746,200.00	Rp 17,508,500.00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Rp 875,187,229.00	Rp 846,855,095.00
a	Penyediaan permakanan	Rp 384,180,000.00	Rp 370,585,000.00
b	Penyediaan sandang	Rp 7,008,609.00	Rp 5,400,000.00
c	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Rp 379,000,000.00	Rp 369,260,695.00
d	Layanan rujukan	Rp 104,998,620.00	Rp 101,609,400.00
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota	Rp 650,471,400.00	Rp 531,165,000.00
a	penyediaan pemakaman	Rp 49,359,400.00	Rp 7,155,000.00
b	penyediaan sandang	Rp 576,310,000.00	Rp 499,380,000.00
c	penyediaan tempat penampungan pengungsi	Rp 24,802,000.00	Rp 24,630,000.00

5. Dukungan Personil

Dalam upaya mendorong pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kota Balikpapan adalah Tahun 2021 adalah 13 orang sebagai berikut:

Tabel 4.45
Dukungan Personil

NO	URAIAN	DUKUNGAN PERSONIL
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris	1
3	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	1
4	Kepala Bidang Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1
5	Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	1
6	Kepala Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Dan Lanjut Usia	1
7	Kepala Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial Dan Korban Tindak Kekerasan	1
8	Kepala Seksi Perlindungan Korban Bencana	1
9	Pekerja Sosial	3
10	Administrasi Khusus	2

6. Permasalahan dan Solusi

Beberapa permasalahan yang timbul dalam pencapaian target pelayanan SPM bidang sosial Pemerintah Kota Balikpapan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

a. **Permasalahan**

Tabel. 4.46
Permasalahan Bidang Sosial

URAIAN	PERMASALAHAN					
	PENGUMPULAN DATA	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	PELAKSANAAN	PELAPORAN	LAIN-LAIN
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Pantii Sosial	Diperluka petugas khusus untuk pengelolaan data penyandang disabilitas (opertor bank data)	Menyedikan sarana dan prasarana yang ramah serta tempat untuk berkarya bagi pennyandang disabilitas	Berdaarkn kepada jeni kebutuhan terdiri dari kemampuan dan keterampilan yang potensiya serta pelayanan yang diperlukan oleh penyandang disabilitas	Pelaksanaan kegiatan mengacu kepada jumlah annggaran yag tersedia dan sarana praarana yang mendukung bagi penyandang disabilitas	Pelaporan dibuat berdaarkan pada hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh penyandang disabilitas	Belum tersedianya tempat untuk penyandang disbilits terlantar dan kurangnya sarana dan praarana yang ramah bagi penyandang disabilitas
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Pantii Sosial	Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Anak masih terbatas yang hanya dilayani / dirujuk ke Dinas Sosial	Tidak dapat dihitung kebutuhan secara terperinci karena tergantung trend kasus anak di tahun berjalan	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti krn tergantung kasus yang ada	Sesuai dengan kasus yang terjadi	Sesuai dengan pelaksanaan kasus yang terjadi	Belum ada kendaraan operasional, LPKS milik pemerintah kota dan UPTD khusus yang melayani PMKS anak, pelayanan di RPSA belum maksimal krn fasilitas, sarana dan prasarana masih terbatas
Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Pantii Sosial	Data lanjut usia terlantar masih terbatas yang hanya dilayani / dirujuk ke Dinas Sosial	Tidak dapat dihitung kebutuhan secara terperinci karena tergantung trend kasus lanjut usia di tahun berjalan	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti krn tergantung kasus yang ada	Sesuai dengan kasus yang terjadi	Sesuai dengan pelaksanaan kasus yang terjadi	Belum ada kendaraan operasional, UPTD khusus yang melayani lanjut usia, pelayanan di RPLUT belum maksimal krn fasilitas, sarana dan prasarana masih terbatas

URAIAN	PERMASALAHAN					
	PENGUMPULAN DATA	PENGHITUNGAN KEBUTUHAN	PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN	PELAKSANAAN	PELAPORAN	LAIN-LAIN
Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	Diperlukan petugas khusus untuk pengelolaan data PMKS lainnya (operator bank data) untuk mengetahui jenis penanganan yang diperlukan	Kebutuhan PMKS lainnya tidak dapat diprediksi karena berdasarkan pada kasus yang terjadi di masyarakat	Berdasarkan kepada jumlah kasus PMKS lainnya yang ditangani sehingga penganggaran sulit untuk diprediksi	Pelaksanaan kegiatan berdasarkan pada jumlah kasus PMKS lainnya yang diberikan pelayanan berupa rehabilitasi sosial	Pelaporan kegiatan berdasarkan pada jumlah kasus PMKS lainnya yang diberikan pelayanan berupa rehabilitasi sosial	Belum adanya tempat khusus yang permanen bagi PMKS lainnya yang terlantar yang tidak memiliki identitas dan keluarga
Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/ Kota	Data Korban Bencana diambil dari pihak Kelurahan yang terjadi bencana	Tidak dapat dihitung kebutuhan secara terperinci karena tergantung trend kasus di tahun berjalan	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti krn tergantung kasus yang ada	Perencanaan dan Penganggaran bersifat tidak pasti krn tergantung kasus yang ada	Pelaporan dibuat setiap bulan	Belum tersedianya gudang yang memenuhi standar (Representatif) dan jumlah bantuan belum bisa terpenuhi sesuai dengan Anggaran

b. Solusi

Untuk menjawab permasalahan yang terjadi dibidang sosial maka Dinas Sosial Kota Balikpapan melakukan beberapa langkah yang akan dilakukan untuk mendukung tercapainya pelayanan SPM Bidang sosial sebagai berikut;

1. Mendirikan UPTD khusus melayani PMKS disabilitas,pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana ,pengadaan kendaraan operasional.
2. Mendirikan UPTD khusus melayani PMKS anak,mendirikan LPKS milik pemerintah daerah,pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di RPSA,pengadaan kendaraan operasional.
3. Mendirikan UPTD khusus melayani lanjut usia terlantar,pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana di RPLUT,pengadnan kendaraan operasional.
4. Mendirikan UPTD khusus melayani Gelandangan dan Pengemis,pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana,pengadnan kendaraan operasional.
5. Membuat SOP tangggap darurat lintas OPD.



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 188.45-40/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KOTA BALIKPAPAN

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Wali Kota wajib menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data yang diperlukan sesuai dengan indikator kinerja dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- b. bahwa untuk mengumpulkan dan mengolah data sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Tim Penyusun LPPD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusun LPPD Kota Balikpapan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun LPPD Kota Balikpapan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penyusun LPPD sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu terdiri atas:
- a. Tim Penyusun Kota; dan
 - b. Tim Penyusun Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tim Penyusun Kota sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:
- a. membuat perencanaan kegiatan penyusunan LPPD setiap tahun anggaran;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi/teknis yang diperlukan dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal lainnya;
 - c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi teknis yang diperlukan dengan Tim LPPD Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Tim LPPD Tingkat Pusat, serta pengembangan kapasitas pengumpulan data capaian kinerja dalam rangka penyusunan LPPD;
 - d. melaksanakan koordinasi kegiatan penghimpunan bahan penyusunan LPPD dari seluruh Perangkat Daerah penyelenggara urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sesuai materi LPPD, termasuk dengan instansi vertikal terkait;
 - e. melaksanakan sinkronisasi dan verifikasi data laporan penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah, penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dari masing-masing Perangkat Daerah;
 - f. melakukan penyusunan data capaian kinerja yang meliputi:
 1. penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum;
 2. realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah;
 3. tugas pembantuan;
 4. tugas umum pemerintahan;
 5. penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal; dan
 6. akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah.
 - g. melakukan penyusunan materi LPPD berpedoman pada format dan sistematika laporan LPPD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunannya;
 - h. menyampaikan LPPD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Timur;
 - i. memberikan penjelasan akuntabilitas dan transparansi materi LPPD kepada semua pihak yang memerlukan penjelasan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota terkait perencanaan, koordinasi dan fasilitasi penyusunan LPPD.

- KEEMPAT : Tim Penyusun Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas:
- a. menyediakan dokumen/data penyelenggaraan urusan konkuren, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan umum, realisasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah, penerapan dan pencapaian standar pelayanan minimal dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan untuk 1 (satu) tahun anggaran yang telah dilaksanakan Perangkat Daerah;
 - b. menyusun dokumen/data sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai format/daftar isian data indikator kinerja kunci LPPD dari masing-masing Perangkat Daerah; dan
 - c. memberikan penjelasan akuntabilitas dan transparansi dokumen/data sebagaimana dimaksud pada huruf b, dalam hal diperlukan sinkronisasi dan verifikasi dokumen/data oleh Tim Penyusun Kota, Tim Evaluasi LPPD Provinsi Kalimantan Timur dan Tim Evaluasi LPPD Tingkat Pusat.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 10 Pebruari 2021

WALI KOTA BALIKPAPAN,



M. RIZAL EFFENDI

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda (sebagai laporan);
2. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Camat di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

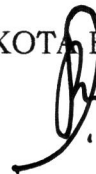
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 188.45-40/2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN LAPORAN PENYELENGGARAAN
 PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN
 LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Wali Kota Balikpapan	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kota Balikpapan	Ketua	
3	Asisten Tata Pemerintahan Sekretaris Daerah Kota Balikpapan	Wakil Ketua	
4	Kepala Bagian Pemerintahan	Sekretaris	
A. UNSUR TIM PENYUSUN KOTA:			
1	Kasubbag Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah	Anggota	Bagian Pemerintahan
2	Staf Subbag Tata Pemerintahan Umum dan Pengembangan Otonomi Daerah	Anggota	Bagian Pemerintahan
B. UNSUR TIM PENYUSUN PERANGKAT DAERAH:			
NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	
2	Kepala Dinas Kesehatan	Anggota	
3	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	
4	Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman	Anggota	
5	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota	
6	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota	
7	Kepala Dinas Sosial	Anggota	
8	Kepala Dinas Ketenagakerjaan	Anggota	
9	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	Anggota	
10	Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	Anggota	
11	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota	
12	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota	
13	Kepala Dinas Perhubungan	Anggota	
14	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	

NO	NAMA JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
15	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	Anggota	
16	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Anggota	
17	Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip	Anggota	
18	Kepala Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Anggota	
19	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	Anggota	
20	Kepala Dinas Perdagangan	Anggota	
21	Inspektur	Anggota	
22	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Anggota	
23	Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah	Anggota	
24	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	
25	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota	Sekretariat Daerah
26	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Anggota	Sekretariat Daerah
27	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	Sekretariat Daerah

WALI KOTA BALIKPAPAN,



M. RIZAL EFFENDI

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dalam rangka wujud pertanggung jawaban Kepala Daerah terhadap tugas pokok, kewenangan, pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan serta program dan kegiatan. Selain daripada itu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja serta alat untuk mendorong terwujudnya good governance.

Dalam Perspektif yang lebih luas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik yang selanjutnya akan disusun dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2021 yang akan dipublikasikan secara luas melalui website Pemerintah Kota Balikpapan, selain Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan menginputan Sistem Informasi Elektronik Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (E-LPPD) Tahun 2021 Kota Balikpapan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini disusun, semoga pihak-pihak yang berkepentingan dapat memanfaatkan informasi yang terkandung dalam laporan ini sebagai bahan koreksi guna meningkatkan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Balikpapan.

Balikpapan Kubangun, Kujaga dan Kubela.